



Kementerian Agama
Republik Indonesia

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015 (Audited)



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kementerian Agama adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Menteri Agama selaku Pengguna Anggaran/Barang pada Kementerian Agama mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas APBN yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 177 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015 *Audited* disusun dan disajikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan laporan keuangan yang diterima dari Unit Eselon I selaku UAPPA-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I) yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Direktorat Jenderal Bimas Buddha, Inspektorat Jenderal, serta Badan Litbang dan Diklat.

Pada Tahun Anggaran 2015, Kementerian Agama menerbitkan tiga Laporan Keuangan secara terpisah, yaitu:

- a. Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2015;
- b. Laporan Keuangan Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2015;
- c. Laporan Keuangan Badan Pengelola Dana Abadi Umat (DAU) Tahun 2015

Laporan Keuangan Kementerian Agama adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan atas penerimaan yang masuk ke APBN melalui Kementerian Agama dan penggunaan anggaran Kementerian Agama yang bersumber dari APBN.

Laporan Keuangan PIH adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan atas penerimaan yang sumber dananya berasal dari setoran awal calon jemaah haji dan nilai optimalisasinya dan pertanggungjawaban atas penggunaan setoran awal beserta nilai optimalisasinya/pengembangannya. Nilai aset bersih (*net equity*) pada Neraca PIH disajikan pada kelompok aset lainnya akun dana yang dibatasi penggunaannya pada Neraca Kementerian Agama.

Laporan Keuangan BP DAU adalah bentuk pertanggungjawaban dari penerimaan yang sumber dananya berasal dari sisa efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan pengembangan serta pemanfaatannya. Laporan Keuangan BP DAU disampaikan ke Kementerian Keuangan dan menjadi suplemen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015 *Audited* menyajikan tiga hal pokok yaitu:

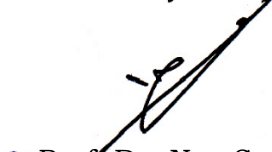
1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang pendapatan dan belanja. Realisasi Anggaran Pendapatan Kementerian Agama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.019.877.460.038,00 atau 96,35 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp2.096.453.793.700,00. Sementara itu realisasi belanja netto Kementerian Agama adalah sebesar Rp53.826.568.922.700,00 atau 88,67 persen dari anggaran sebesar Rp60.704.910.168.000,00;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2015. Neraca Kementerian Agama menginformasikan nilai aset Kementerian Agama sebesar Rp40.122.856.191.410,00, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp853.580.016.549,00, Aset Tetap sebesar Rp37.584.723.077.216,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp(22.500.832,00), Aset Lainnya sebesar Rp1.684.575.598.477,00. Sedangkan kewajiban Kementerian Agama sebesar Rp2.370.831.417.205,00, sehingga ekuitas dana Kementerian Agama per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp37.752.024.774.205,00
3. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp1.905.820.326.505,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp51.161.124.611.212,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(49.255.304.284.707,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp118.987.804.347,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(49.136.316.480.360,00)

4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp34.945.301.997.964,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp(49.136.316.480.360,00) yang ada di LPE, kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai aset senilai Rp104.283.703.894,00, koreksi-koreksi senilai Rp(17.377.814.472,00) dan transaksi antar entitas senilai total Rp51.856.133.367.179,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp37.752.024.774.205,00
5. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca termasuk pengungkapan-pengungkapan penting lainnya.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Agama. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 26 April 2016
Sekretaris Jenderal



Prof. Dr. Nur Syam, M. Bi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Pernyataan Telah Direviu	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
III. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Agama	11
A.2. Dasar Hukum	14
A.3. Profil Kementerian Agama	15
A.4. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama	41
A.5. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	42
A.6. Kebijakan Akuntansi	44
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	52
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	53
B.2. Belanja Negara	62
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	83
C.1. Aset Lancar	83
C.2. Aset Tetap	95
C.3. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	108
C.4. Aset Lainnya	109
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	114
C.6. Ekuitas	117
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	
D.1. Pendapatan	118
D.2. Beban Pegawai	118
D.3. Beban Persediaan	119
D.4. Beban Barang dan Jasa	120
D.5. Beban Pemeliharaan	121
D.6. Beban Perjalanan Dinas	122
D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	122
D.8. Beban Bantuan Sosial	123
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	124
D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	124
D.11. Beban Lain-lain	125
D.12. Kegiatan Non Operasional	125

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	126
E.1. Ekuitas Awal	126
E.2. Surplus (Defisit) LO	126
E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	126
E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset	126
E.4. Dampak Kumulatif Prbhn Keb Akuntansi/Kesalahan Mendasar	126
E.5 Koreksi Nilai Persediaan	126
E.6 Selisih Revaluasi Aset Tetap	127
E.7 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	127
E.8 Transaksi Antar Entitas	127
E.9 Kenaikan/Penurunan Ekuitas	127
E.10 Ekuitas Akhir	127
D. Pengungkapan Penting Lainnya	128

Lampiran Pendukung LKKA Tahun 2015 *Audited*

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Melalui KPPN dan BUN
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Melalui KPPN dan BUN
4. Laporan Realisasi Anggaran Kembali Pendapatan Negara dan Hibah Melalui KPPN dan BUN
5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Melalui KPPN dan BUN Menurut Jenis Satuan Kerja
6. Laporan Realisasi Anggaran Kembali Belanja Melalui KPPN dan BUN Menurut Jenis Satuan Kerja
7. Neraca
8. Neraca Percobaan
9. Laporan Pengguna Barang TA 2015
10. Laporan Keuangan BPIH Tahun 1436 H/2015 M
11. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU TA 2015
12. Ikhtisar Laporan Keuangan Dana Abadi Umat Tahun 2015
13. Ikhtisar Laporan Keuangan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
14. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)
15. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Wakaf Indonesia (BWI)
16. Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
17. Daftar Saldo Kas di BLU dan Deposito pada Satker BLU

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Anggaran Awal dan Anggaran setelah Revisi TA 2015	52
Tabel 2 : Anggaran Awal dan Anggaran setelah Revisi Menurut Program TA 2015	53
Tabel 3 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2015	53
Tabel 4 : Rincian Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2015	54
Tabel 5 : Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya TA 2015 dan TA 2014	55
Tabel 6 : Rekap Data Peristiwa Nikah dan Rujuk Tahun 2015 dan Tahun 2014	56
Tabel 7 : Perbandingan Jumlah Mahasiswa Menurut Tahun Akademik Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri - Non BLU	59
Tabel 8 : Perbandingan Jumlah Mahasiswa Menurut Tahun Akademik Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri - Non BLU	60
Tabel 9 : Perbandingan Jumlah Mahasiswa Menurut Tahun Akademik Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri - Non BLU	60
Tabel 10 : Perbandingan Jumlah Mahasiswa Menurut Tahun Akademik Perguruan Tinggi Agama Buddha Negeri - Non BLU	60
Tabel 11 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU	61
Tabel 12 : Perbandingan Jumlah Mahasiswa Menurut Tahun Akademik pada Perguruan Tinggi Agama Negeri - BLU	62
Tabel 13 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015	63
Tabel 14 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan Tahun TA 2014	64
Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Fungsi TA 2015 dan TA 2014	65
Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pelayanan Umum Per Unit Eselon I TA 2015 dan TA 2014	65
Tabel 17 : Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Fungsi Agama Per Unit Eselon I TA 2015 dan TA 2014	66
Tabel 18 : Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pendidikan Per Unit Eselon I TA 2015 dan TA 2014	67
Tabel 19 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015	68
Tabel 20 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2015	69
Tabel 21 : Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2015 dan TA 2014	69
Tabel 22 : Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Rupiah Murni Per Unit Eselon I TA 2015 dan TA 2014	70
Tabel 23 : Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Pinjaman Luar Negeri Per Unit Eselon I TA 2015 dan TA 2014	70
Tabel 24 : Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Rupiah Murni Pendamping Per Eselon I TA 2015 dan TA 2014	71
Tabel 25 : Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana PNBP Per Unit Eselon I TA 2015 dan TA 2014	72
Tabel 26 : Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana BLU Per Unit Eselon I TA 2015 dan TA 2014	72

Tabel 27	: Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Hibah Langsung Dalam Negeri Per Unit Eselon I TA 2015 dan TA 2014	73
Tabel 28	: Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara Per Unit Eselon I TA 2015 dan TA 2014	74
Tabel 29	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015	74
Tabel 30	: Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan TA 2014	75
Tabel 31	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014	76
Tabel 32	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014	77
Tabel 33	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014	77
Tabel 34	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2015 dan TA 2014	78
Tabel 35	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 dan TA 2014	79
Tabel 36	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015 dan TA 2014	79
Tabel 37	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2015 dan TA 2014	80
Tabel 38	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 dan TA 2014	81
Tabel 39	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2015 dan TA 2014	81
Tabel 40	: Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 dan TA 2014	82
Tabel 41	: Rincian Aset Lancar	83
Tabel 42	: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Unit Eselon I	84
Tabel 43	: Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Unit Eselon I	85
Tabel 44	: Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum Per Satker BLU	86
Tabel 45	: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Unit Eselon I	87
Tabel 46	: Perbandingan rincian Investasi Jangka Pendek	88
Tabel 47	: Rincian Piutang Bukan Pajak Per Unit Eselon I	88
Tabel 48	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Unit Eselon I	89
Tabel 49	: Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional per Satker BLU	90
Tabel 50	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	90
Tabel 51	: Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Per Satker BLU	91
Tabel 52	: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-piutang dari keg. Non Operasional BLU	92
Tabel 53	: Rincian Belanja Dibayar Dimuka	92
Tabel 54	: Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	93
Tabel 55	: Rincian Persediaan Per Unit Eselon I	94
Tabel 56	: Rincian Persediaan BLU Per Satker BLU	95
Tabel 57	: Rincian Aset Tetap	95
Tabel 58	: Rincian Tanah Per Unit Eselon I	96
Tabel 59	: Rincian Tanah Badan Layanan Umum Per Satker BLU	97

Tabel 60	: Rincian Peralatan dan Mesin Per Eselon I	98
Tabel 61	: Rincian Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Per Satker BLU	99
Tabel 62	: Rincian Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I	100
Tabel 63	: Rincian Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Per Satker BLU	101
Tabel 64	: Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Unit Eselon I	102
Tabel 65	: Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum Per Satker BLU	103
Tabel 66	: Rincian Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I	104
Tabel 67	: Rincian Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Per Satker BLU	105
Tabel 68	: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Unit Eselon I	106
Tabel 69	: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum Per Satker BLU	107
Tabel 70	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	108
Tabel 71	: Rincian Aset Lainnya	109
Tabel 72	: Rincian Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon I	110
Tabel 73	: Rincian Aset Tak Berwujud Per Satker BLU	111
Tabel 74	: Rincian Aset Lain-lain Per Unit Eselon I	112
Tabel 75	: Rincian Aset Lain-lain Per Satker BLU	113
Tabel 76	: Rincian Akumulasi Aset Lainnya	114
Tabel 77	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek	114
Tabel 78	: Rincian Utang Pada Pihak Ketiga Per Unit Eselon I	115
Tabel 79	: Rincian Utang Jangka Pendek per Eselon I	116
Tabel 80	: Rincian Pendapatan di Terima Di Muka Per Unit Eselon I	117
Tabel 81	: Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2015 dan TA 2014	118
Tabel 82	: Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2015 dan TA 2014	119
Tabel 83	: Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2015 dan TA 2014	120
Tabel 84	: Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2015 dan TA 2014	121
Tabel 85	: Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2015 dan TA 2014	122
Tabel 86	: Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat TA 2015 dan TA 2014	123
Tabel 87	: Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2015 dan TA 2014	123
Tabel 88	: Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2015 dan TA 2014	124
Tabel 89	: Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2015 dan TA 2014	124
Tabel 90	: Perbandingan Rincian Beban Lain- lain TA 2015 dan TA 2014	125



PERNYATAAN TELAH DIREVIU



KEMENTERIAN AGAMA RI INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN RS FATMAWATI NOMOR 33A CIPETE PO BOX 3687
TELEPON 021 – 73916038, 7697853, 7691849 FAX. 021-7692112
JAKARTA 12420

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMATAHUN 2015

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Agama untuk Tahun Anggaran 2015, berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Agama.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.



Jakarta, 19 Februari 2016
Inspektur Jenderal,

Mech. Jasin
Mech. Jasin

NIP 195806141985031013 w



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015 *Audited* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 29 April 2016
Menteri Agama


Lukman Hakim Saifuddin



RINGKASAN

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.019.877.460.038,00 atau mencapai 96,35 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.096.453.793.700,00.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp53.826.568.922.700,00 atau mencapai 88,67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp60.704.910.168.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp40.122.856.191.410,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp853.580.016.549,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp(22.500.832,00); Aset Tetap (neto) sebesar Rp37.584.723.077.216,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.684.575.598.477,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.370.831.417.205,00 dan Rp37.752.024.774.205,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.905.820.326.505,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp51.161.124.611.212,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(49.255.304.284.707,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp118.987.804.347,00 dan Rp0,00 sehingga entitas

mengalami Defisit-LO sebesar Rp(49.136.316.480.360,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp34.945.301.997.964,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp(49.136.316.480.360,00), kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai aset senilai Rp104.283.703.894,00 koreksi-koreksi senilai Rp(17.377.814.472,00) dan transaksi antar entitas senilai total Rp51.856.133.367.179,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp37.752.024.774.205,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN AGAMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

Uraian		Catatan	TA 2015			TA 2014
			Anggaran	Realisasi	% Terhadap	Realisasi
PENDAPATAN		B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak						
1	PNBP Lainnya	B.1.1				
	a Pendapatan Jasa KUA		1.077.605.765.000,00	733.105.375.793,00	68,03	360.507.728.410,00
	b Pendapatan Pendidikan		278.975.336.563,00	327.034.625.314,00	117,23	281.252.804.287,00
	c Pendapatan Umum		484.837.137,00	161.694.050.327,00	33.350,18	295.649.838.607,00
	Jumlah PNBP Lainnya		1.357.065.938.700,00	1.221.834.051.434,00	90,03	937.410.371.304,00
2	PNBP BLU	B.1.2				
	a Pendapatan BLU		739.387.855.000,00	798.043.408.604,00	107,93	627.118.335.490,00
	Jumlah PNBP BLU		739.387.855.000,00	798.043.408.604,00	107,93	627.118.335.490,00
	Jumlah Pendapatan		2.096.453.793.700,00	2.019.877.460.038,00	96,35	1.564.528.706.794,00
B. BELANJA OPERASI		B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.4.1	35.613.250.275.000,00	32.270.917.657.206,00	90,61	25.814.875.037.765,00
2.	Belanja Barang	B.2.4.2	18.331.024.663.000,00	15.930.199.356.610,00	86,90	6.868.581.538.515,00
3.	Belanja Modal	B.2.4.3	4.727.801.931.000,00	4.035.683.467.597,00	85,36	2.110.878.780.273,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	B.2.4.4	2.032.833.299.000,00	1.589.768.441.287,00	78,20	10.864.500.496.249,00
	Jumlah Belanja		60.704.910.168.000,00	53.826.568.922.700,00	88,67	45.658.835.852.802,00



NERACA FACE

KEMENTERIAN AGAMA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NAMA PERKIRAAN		CATATAN	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
ASET				
Aset Lancar		C.1		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	12.466.714.369,00	4.303.320.797,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	4.689.631.678,00	8.779.981.129,00
	Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.3	620.506.163.294,00	422.188.881.629,00
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.4	27.119.291.379,00	81.195.567.274,00
	Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	C.1.5	22.000.000.000,00	30.886.000.000,00
	Piutang Bukan Pajak	C.1.6	27.321.686.073,00	44.578.978.332,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.1.7	(1.433.713.723,00)	(586.562.848,00)
	Piutang Bukan Pajak (Netto)		25.887.972.350,00	43.992.415.484,00
	Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.8	22.844.460.027,00	19.789.499.395,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.1.9	(1.407.195.110,00)	(167.015.663,00)
	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)		21.437.264.917,00	19.622.483.732,00
	Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.1.10	5.465.610.192,00	6.619.778.199,00
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.1.11	(459.858.064,00)	(438.344.703,00)
	Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)		5.005.752.128,00	6.181.433.496,00
	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.12	1.935.774.562,00	79.075.000,00
	Uang Muka Belanja (prepayment)	C.1.13	0,00	125.698.016,00
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.1.14	11.368.913.052,00	
	Persediaan	C.1.15	92.213.683.492,00	59.664.688.425,00
	Persediaan Badan Layanan Umum	C.1.16	8.948.855.328,00	9.435.782.343,00
Jumlah Aset Lancar			853.580.016.549,00	686.455.327.325,00

Aset Tetap	C. 2		
Tanah	C.2.1	12.066.004.403.231,00	11.911.986.673.758,00
Tanah Badan Layanan Umum	C.2.2	3.608.861.460.401,00	3.567.133.729.390,00
Peralatan dan Mesin	C.2.3	4.850.510.141.566,00	3.943.894.559.057,00
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	C.2.4	1.527.707.753.396,00	1.409.012.506.521,00
Gedung dan Bangunan	C.2.5	16.636.965.153.797,00	14.661.086.032.077,00
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	C.2.6	3.387.111.494.329,00	3.139.798.998.268,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.7	338.143.940.333,00	272.471.057.289,00
Jalan Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum	C.2.8	173.538.253.567,00	162.071.909.996,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.9	981.525.550.714,00	887.872.605.807,00
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	C.2.10	148.123.052.581,00	136.618.435.211,00
KDP	C.2.11	744.966.878.706,00	817.950.299.672,00
KDP Badan Layanan Umum	C.2.12	1.036.776.910.692,00	578.616.573.814,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.13	(3.293.774.386.930,00)	(2.723.524.920.525,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin BLU	C.2.13	(1.135.318.118.047,00)	(1.062.266.042.075,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.13	(2.867.210.703.138,00)	(2.450.521.227.214,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan BLU	C.2.13	(386.627.663.704)	(344.070.296.611,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.13	(96.877.480.948,00)	(83.221.924.537,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	C.2.13	(82.743.279.452,00)	(70.201.976.245,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	C.2.13	(51.490.752.487,00)	(42.215.190.396,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU	C.2.13	(1.469.531.391,00)	(1.334.798.876,00)
Jumlah Aset Tetap		37.584.723.077.216,00	34.711.157.004.381,00
Piutang Jangka Panjang	C.3		
Piutang Tagihan TP/TGR	C.3.1	(21.758.102,00)	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Tagihan TP/TGR	C.3.2	(742.730,00)	0,00
Tagihan TP/TGR (Netto)		(22.500.832,00)	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		(22.500.832,00)	0,00
Aset Lainnya	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	87.533.022.965,00	79.768.834.512,00
Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum	C.4.2	34.255.714.111,00	28.795.789.316,00
Aset Lain-Lain	C.4.3	138.316.764.424,00	117.097.834.877,00

	Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum	C.4.4	26.203.937.931,00	14.151.872.055,00
	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.5	1.505.597.044.704,00	1.657.177.288.743,00
	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.6	(107.330.885.658,00)	(88.709.499.011,00)
	Jumlah Aset Lainnya		1.684.575.598.477,00	1.808.282.120.492,00
	JUMLAH ASET		40.122.856.191.410,00	37.205.894.452.198,00
	KEWAJIBAN			
	Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
	Uang Muka dari KPPN	C.5.1	12.466.714.369,00	4.303.320.797,00
	Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.2	2.303.205.177.801,00	2.243.984.194.207,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.3	165.964.858,00	230.608.938,00
	Pendapatan Yang Ditangguhkan	C.5.4		43.068.019.962,00
	Hibah Yang Belum Disahkan	C.5.5	35.342.855.000,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.6	19.650.705.177,00	12.074.330.292,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.370.831.417.205,00	2.303.660.474.196,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		2.370.831.417.205,00	2.303.660.474.196,00
	EKUITAS DANA	C.6		
	Ekuitas Dana Lancar		-	39.972.141.872,00
	Ekuitas Dana Investasi		-	34.862.261.836.130,00
	Ekuitas	C.6	37.752.024.774.205,00	-
	JUMLAH EKUITAS DANA		37.752.024.774.205,00	34.902.233.978.002,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		40.122.856.191.410,00	37.205.894.452.198,00



LAPORAN OPERASIONAL FACE

**KEMENTERIAN AGAMA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	2015	2014
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
Pendapatan Pajak Penghasilan		0,00	0,00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		0,00	0,00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan		0,00	0,00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		0,00	0,00
Pendapatan Cukai		0,00	0,00
Pendapatan Pajak Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Bea Masuk		0,00	0,00
Pendapatan Bea Keluar		0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Perpajakan		0,00	0,00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba		0,00	0,00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.905.820.326.505,00	0,00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1.905.820.326.505,00	0,00
PENDAPATAN HIBAH			
Pendapatan Hibah		0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah		0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		1.905.820.326.505,00	0,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	32.686.059.428.307,00	0,00
Beban Persediaan	D.3	332.124.014.892,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	12.477.588.790.387,00	0,00
Beban Pemeliharaan	D.5	672.309.838.562,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.640.817.337.061,00	0,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	561.545.903.106,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	D.8	1.599.185.342.852,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.186.927.433.529,00	0,00

Uraian		Cat	2015	2014
	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	4.604.013.428,00	0,00
	Beban Transfer		0,00	0,00
	Beban Lain-Lain	D.11	(37.490.912,00)	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL			51.161.124.611.212,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			(49.255.304.284.707,00)	0,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	2.478.168.506,00	0,00
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar		(13.734.547.370,00)	0,00
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			(11.256.378.864,00)	0,00
	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		133.562.245.766,00	0,00
	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.318.062.555,00	0,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			130.244.183.211,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			118.987.804.347,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
	Beban Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA			0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO			(49.136.316.480.360,00)	0,00



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS FACE

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN AGAMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2015	2014	Jumlah	%
EKUITAS AWAL	E.1	34.945.301.997.964,00	-	34.945.301.997.964,00	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(49.136.316.480.360,00)	-	(49.136.316.480.360,00)	-
PENYESUAIAN TAHUN BERJALAN	E.3	104.283.703.894,00	-	104.283.703.894,00	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	104.283.703.894,00	-	104.283.703.894,00	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban		-	-	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.4	(17.377.814.472,00)	-	(17.377.814.472,00)	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.5	2.826.008.701,00	-	2.826.008.701,00	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.6	(4.529.615.787,00)	-	265.428.134.290,00	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.7	(38.145.851.772,00)	-	(38.145.851.772,00)	-
Koreksi Atas Beban		-	-	-	-
Koreksi Atas Pendapatan		-	-	-	-
Koreksi Lain-Lain-Hibah Masuk/Keluar		-	-	-	-
Lain-lain		22.471.644.386,00	-	22.471.644.386,00	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	51.856.133.367.179,00	-	51.856.133.367.179,00	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.9	2.806.722.776.241,00	-	2.806.722.776.241,00	-
EKUITAS AKHIR	E.10	37.752.024.774.205,00	-	37.752.024.774.205,00	-



CALK

PENDAHULUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Agama

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 9 ayat (g) mengamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Laporan Keuangan adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menteri Agama sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Agama berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.

Dalam melaksanakan APBN, Menteri Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama yang diberi pendelegasian wewenang kepada pimpinan satuan kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama.

Kementerian Agama semenjak tahun 2011 melakukan restrukturisasi program dan anggaran yang menetapkan bahwa satu Satker hanya boleh melaksanakan satu Program sehingga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memiliki menjadi beberapa Satker sesuai dengan jumlah Program yang dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan jumlah Satker di Kementerian Agama menurut

DIPA sebanyak 7.011 sedangkan menurut struktur organisasi sebanyak 4.553 terdiri dari Kanwil sebanyak 34 Satker, Kankemenag Kab sebanyak 413 Satker, Kankemenag Kota sebanyak 99 Satker, UIN sebanyak 11 Satker, IAIN sebanyak 26 Satker, STAIN sebanyak 18 Satker, IDHN sebanyak 1 Satker, STABN sebanyak 2 Satker, STAKN sebanyak 7 Satker, STAHN sebanyak 2 Satker, MAN sebanyak 765 Satker, MTsN sebanyak 1.444 Satker, MIN sebanyak 1.690 Satker, Balai Diklat sebanyak 14 Satker, Balai Litbang sebanyak 3 Satker, Misi Haji sebanyak 1 Satker, Balai Lajnah sebanyak 1 Satker, LPQ sebanyak 1 Satker, dan Asrama Haji sebanyak 9 Satker. Sedangkan Satker yang menjadi entitas akuntansi sebanyak 4.495 Satker..

Laporan Keuangan Kementerian Agama disusun secara berjenjang sesuai dengan struktur Sistem Akuntansi Instansi (SAI) mulai dari tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 sampai kepada tingkat UAPA sesuai dengan PMK Nomor 177/PMK.05/20015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2015 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Agama. Prinsip umum kebijakan Akuntansi dan Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) adalah bentuk pertanggungjawaban Kementerian Agama atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKKA disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode akuntansi. Penyusunan dan penyajian LKKA menjadi tanggung jawab setiap pimpinan entitas atau pejabat yang ditunjuk. Penyajian LKKA harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset, dan/atau kewajiban dalam mata uang asing lain selain dari rupiah

harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral.

Penyajian LKKA menggunakan basis akuntansi kas dan akrual. Basis akuntansi kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan basis akuntansi akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akuntansi kas digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan basis akuntansi akrual digunakan dalam penyusunan Laporan Operasioanal (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca. Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LKKA serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dapat menghasilkan LKKA yang akurat dan akuntabel.

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, maka Laporan Keuangan harus direviu oleh Aparat Pengawas Internal/Inspektorat Jenderal pada Kementerian Agama. Hasil reviu atas LKKA dituangkan dalam Surat Pernyataan Telah Direviu yang merupakan komponen dari Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015 *Audited* dan sebagai dasar untuk penandatanganan Statement Of Responsibility atau Pernyataan Tanggung Jawab oleh Menteri Agama selaku Pengguna Anggaran

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Laporan Keuangan Kementerian Agama periode 31 Desember 2015 *Audited* terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) di lampiri ikhtisar laporan keuangan pada satker Badan Layanan Umum (BLU)

PTAN.

A.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara dan Lembaga;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama.

15. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2015 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Agama
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. PROFIL KEMENTERIAN AGAMA

A.3.1. Sejarah

Pada masa kemerdekaan, kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai. Berdirinya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan, berdasarkan pada sifat dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas, sekaligus juga sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan yuridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1 dan 2:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

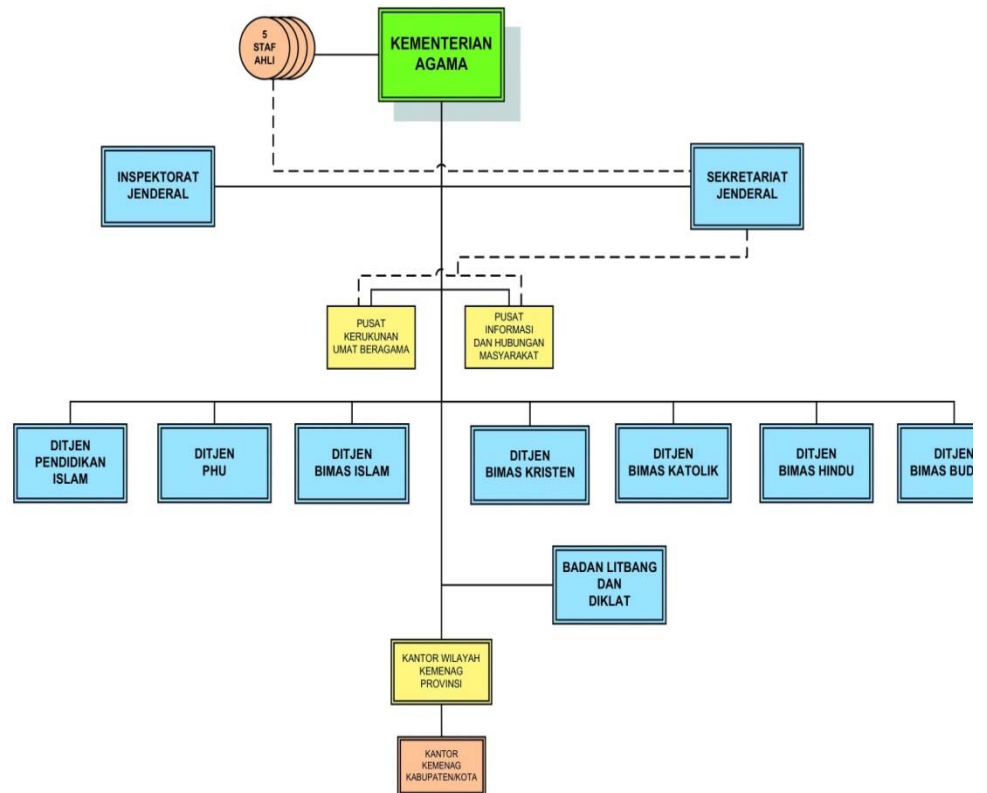
Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai Kementerian yang tersentralisasi secara vertikal, Kementerian Agama memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain untuk

mencapai tujuan pembangunan bidang agama sebagaimana yang telah diamanatkan melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan, Kementerian Agama diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai tambah (*added value*) dalam mengisi tugas-tugas pembangunan di setiap lini, baik pada tingkat pusat maupun jajaran tingkat daerah. Nilai tambah ini tercermin baik melalui program pembangunan yang dikelola (agama dan pendidikan), sumber daya manusia, koordinasi struktural hingga ke kecamatan, serta interrelasi dengan para stakeholders baik dari para pemuka agama hingga para pengelola satuan pendidikan yang berasal dari masyarakat.

Dalam pelaksanaannya nilai tambah yang diharapkan dari Kementerian Agama belum dapat terwujud dengan maksimal bila tanpa didukung peran serta dan koordinasi lintas sektoral. Hal ini dapat dilihat melalui penerbitan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 yang menegaskan tentang perlunya Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral. Instruksi ini berisi imbauan Menteri Agama kepada segenap jajarannya di daerah untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan agama di daerahnya masing-masing. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa belanja dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Demikian pula struktur penganggaran program Kementerian Agama dipilah berdasarkan organisasi, fungsi dan jenis belanja. Dengan kata lain program-program yang akan dijalankan oleh Kementerian Agama struktur penganggarnya juga diatur oleh Undang-Undang terkait

A.3.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama adalah sebagaimana tampak dalam bagan di bawah ini:



Struktur organisasi Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah instansi vertikal yang memiliki Kantor Wilayah (setingkat eselon II) di setiap provinsi di Indonesia atau dengan kata lain Kementerian Agama yang berada di provinsi-provinsi. Kantor Wilayah ini membawahi kantor-kantor Kementerian Agama kabupaten/kota (setingkat eselon III) yang membawahi Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Madrasah-madrasah di lingkungan daerahnya.



Lokasi Kantor Wilayah Kementerian Agama tampak seperti dalam peta di atas:

1. Kanwil Kementerian Agama Prov. Aceh di Banda Aceh
2. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara di Medan
3. Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau di Pekanbaru
4. Kanwil Kementerian Agama Prov. Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
5. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Barat di Padang
6. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jambi di Jambi
7. Kanwil Kementerian Agama Prov. Bengkulu di Bengkulu
8. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan di Palembang
9. Kanwil Kementerian Agama Prov. Bangka Belitung di Pangkal Pinang
10. Kanwil Kementerian Agama Prov. Lampung di Bandar Lampung
11. Kanwil Kementerian Agama Prov. Banten di Serang
12. Kanwil Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta
13. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Barat di Bandung
14. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah di Semarang
15. Kanwil Kementerian Agama Prov. D.I. Yogyakarta di Yogyakarta
16. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur di Surabaya
17. Kanwil Kementerian Agama Prov. Bali di Denpasar
18. Kanwil Kementerian Agama Prov. NTB di Mataram

19. Kanwil Kementerian Agama Prov. NTT di Kupang
20. Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Barat di Pontianak
21. Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Tengah di Palangkaraya
22. Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Selatan di Banjarmasin
23. Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Timur di Samarinda
24. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Utara di Manado
25. Kanwil Kementerian Agama Prov. Gorontalo di Gorontalo
26. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat di Mamuju
27. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah di Palu
28. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan di Makassar
29. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari
30. Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku Utara di Ternate
31. Kanwil Kementerian Agama Prov. Maluku di Ambon
32. Kanwil Kementerian Agama Prov. Papua Barat di Manokwari
33. Kanwil Kementerian Agama Prov. Papua di Jayapura
34. Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Utara

A.3.3 KONDISI UMUM

Kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama yang mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

A.3.3.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama antara lain dilakukan melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama, penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.

A.3.3.2 Penyediaan Penyuluh Agama

Penyuluh agama merupakan salah satu ujung tombak dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat. Sampai tahun 2015, penyuluh agama berstatus PNS untuk pemeluk agama Islam berjumlah 5.586 orang, sedangkan penyuluh agama Non PNS berjumlah 75.313 orang yang tersebar diseluruh provinsi untuk melayani penduduk Muslim yang berjumlah 207.176.162 orang (sensus penduduk BPS tahun 2010). Hal ini berarti rasio ketersediaan penyuluh Agama Islam dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1.2612, artinya 1 orang penyuluh harus melayani 2.612 orang.

Untuk pemeluk agama Kristen jumlah tenaga penyuluh PNS sebanyak 264 orang, dan Non PNS sebanyak 17.208 orang. Dengan jumlah penduduk sebanyak 16.528.513 orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 946 orang.

Di lingkungan agama Katolik, penyuluh agama berstatus PNS berjumlah 224 orang, dan tenaga penyuluh non PNS Katolik berjumlah sebanyak 4.000 orang. Dengan jumlah penduduk sebanyak 6.907.873 orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 1.635 orang.

Jumlah tenaga penyuluh agama Hindu berstatus PNS sebanyak 198 orang, dan Penyuluh Non PNS agama Hindu berjumlah 3.789 orang. Dengan jumlah penduduk sebanyak 4.012.116 orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 1.006 orang.

Agama Buddha telah memiliki 60 orang penyuluh PNS dan 1.722 orang non PNS. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.703.254

orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 956 orang. Para Penyuluh tersebut didukung oleh 1.981 Pandita dan 1.372 Dharma Duta.

Selain itu juga terdapat sebanyak 100 orang penyuluh NonPNS agama Khonghucu. Saat ini Umat Khonghucu belum mempunyai penyuluh agama berstatus PNS. Dengan jumlah penduduk sebanyak 117.091 orang, berarti 1 orang penyuluh harus melayani 1.171 orang.

A.3.3.3 Festival Keagamaan

Penyelenggaraan festival keagamaan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan ritual keagamaan bagi umat beragama yang berperan penting dalam penanaman nilai-nilai ajaran agama. Kementerian Agama telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, termasuk penyelenggaraan lomba membaca kitab suci tiap agama, seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, dan Swayamwara Tripitaka Gatha (STG), Sippa Dhamma Samajja dan Mahaniti Loka Dhamma.

A.3.3.4 Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan

Diperhitungkan ada 7.444 lembaga sosial keagamaan Islam, 900 lembaga persekutuan gerejawi/sinode gereja/yayasan Kristen, 1.900 keuskupan/paroki/lembaga keagamaan Katolik, 1.122 lembaga keagamaan Hindu, 419 lembaga keagamaan Buddha dan 242 lembaga keagamaan Khonghucu yang turut berperan serta dalam melayani umat beragama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan merupakan strategi yang sangat penting dan telah dan terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya.

A.3.3.5 Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan beragama pada hakikatnya merupakan nilai-nilai luhur yang telah lama diajarkan dan diwariskan oleh nenek

moyang bangsa Indonesia. Banyak sekali tradisi dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang berhasil dikonstruksi bangsa ini untuk menciptakan suasana hidup rukun dan damai di tengah masyarakat yang plural. Namun demikian, mengingat kerukunan beragama merupakan sebuah kondisi dinamis yang secara terus-menerus harus dipelihara, Pemerintah bersama-sama seluruh komponen masyarakat harusterus senantiasa berupaya menjaga dan melestarikannya.

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi “kerukunan substantif”, yang bukan hanya sekedar “kerukunan simbolis”, Kementerian Agama telah menetapkan empat sasaran kegiatan Kerukunan Umat Beragama, yakni (1) perumusan dan sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama; (2) peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan; (3) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lembaga keagamaan, dan institusi media; dan (4) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama.

A.3.3.6 Penguatan Aspek Regulasi/Kebijakan

Kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, terutama bagi agama-agama yang baru dipeluk oleh penduduk Indonesia atau kepercayaan yang diklaim sebagai agama baru di Indonesia. Namun demikian disadari bahwa regulasi tentang kehidupan umat beragama yang ada sekarang ini masih tersebar secara parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan banyak regulasi tersebut yang hanya diatur dalam peraturan setingkat Menteri yang daya ikatnya dianggap sebagian kalangan masih sangat lemah.

Untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap regulasi yang ada telah dilakukan sosialisasi terhadap

produkperundangan yang telah disusun. Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang memiliki daya jangkauan yang lebih luas, Kementerian Agama membuat sejumlah materi publikasi sebagai media sosialisasi, baik dalam bentuk cetakmaupun noncetak, yang didesiminasikan melalui media cetak,elektronik, maupun online. Selain melalui strategi inovatif tersebut,kegiatan sosialisasi dalam bentuk konvensional juga dilakukan, yaknidengan menggelar pertemuan dengan para tokoh dan aparatpemerintahan sebagai upaya menyambung tali silaturrahim dikalangan para aktor kerukunan yang memang dalam keadaanapapun juga harus tetap dipelihara.

A.3.3.7 Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan UmatBeragama

Pemerintah khususnya Kementerian Agama telah berupaya memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan umat beragama melalui kemitraan dengan seluruh komponen masyarakat yang terdiri atas tokoh masyarakat-tokoh agama (toma-toga), tokoh perempuan, insanjurnalis, serta unsur pemuda yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Kapasitas personal mereka juga terus ditingkatkanmelalui berbagai kegiatan kerukunan, seperti peningkatkan wawasanmultikultur, kemampuan manajemen pencegahan dan penanganan konflik, maupun kegiatan promosi kerukunan beragama maupunpenyiaran media yang berorientasi pada jurnalisme damai (peacejournalism).

Selama ini Pemerintah telah mempraktikkan sejumlah strategi,pendekatan, dan kegiatan yang secara aktif melibatkan berbagaikomponen aktor kerukunan. Di samping tokoh agama dan tokohmasyarakat, unsur penting kerukunan lainnya yang dilibatkan adalah tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam seluruh kegiatanyang dilaksanakan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan selama ini,kehadiran tokoh perempuan dan unsur pemuda semakinmemperkuat upaya pembangunan kerukunan. Oleh karena itu,Pemerintah juga telah mendorong kehadiran

tokoh perempuan dan unsur pemuda tidak hanya pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, namun juga pada setiap struktur kelembagaan yang terkait dengan kerukunan umat beragama. Pelibatan dan peran aktif seluruh aktor kunci kerukunan inilah yang memberikan optimisme Pemerintah untuk benar-benar dapat mewujudkan kondisi kerukunan substantif dalam rangka mewujudkan cita-cita Gerakan Nasional Hidup Rukun.

A.3.3.8 Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media

Sampai saat ini, FKUB telah terbentuk hampir di semua provinsi dan kabupaten/kota. Dari 34 provinsi yang ada, hanya satu FKUB provinsi yang belum terbentuk, yakni di provinsi Kalimantan Utara, sebuah provinsi yang baru lahir. Sementara dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, telah terdapat 465 FKUB kabupaten/kota yang telah dibentuk. Dengan jumlah tersebut diseluruh Indonesia, tidak terlalu berlebihan jika organisasi kemasyarakatan ini bisa disebut sebagai organisasi kemasyarakatan lintas agama terbesar sedunia. Untuk itu, Pemerintah telah menyelenggarakan Kongres FKUB secara nasional dan regional yang diikuti oleh FKUB Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota secara berkala sebagai bagian dari upaya penguatan fungsi FKUB.

Sementara itu, pemberdayaan FKUB telah dilakukan melalui penyelenggaraan program-program peningkatan kemampuan manajerial, penanganan/negosiasi konflik, penanganan pascakonflik, peningkatan wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan juga secara terus menerus dilakukan di kalangan personel kepengurusannya. Kemudian dalam rangka mendukung operasionalisasi FKUB, Pemerintah memfasilitasi penyediaan biaya operasional, membangun gedung sekretariat FKUB yang dilengkapi dengan peralatan kerja, serta memperbantukan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang secara khusus ditugasi membantudi

bidang kesekretariatan di FKUB.

A.3.3.9 Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama

Pemeliharaan kerukunan dilakukan oleh Pemerintah melaluistrategi pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama di kalangan masyarakat secara luas, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional. Upaya yang dilakukan dalam berbagaibentuk, seperti pembentukan Desa Sadar Kerukunan, penyebarluasan pamflet, foto-foto, dan iklan layanan masyarakat yang akan menggugah masyarakat untuk menyadari tentangpentingnya pemeliharaan kerukunan di Indonesia.

Di samping itu, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pemeliharaan kerukunan juga memiliki urgensi yangsangat tinggi, khususnya dari kalangan pemuda, mahasiswa, danpelajar sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, berbagaikegiatan yang memiliki unsur pelibatan masyarakat akar rumputtelah dilakukan, seperti dalam bentuk pemberian Anugerah BidangKerukunan (Harmony Award) bagi tokoh agama, individu yangberjasa, dan insan jurnalis; Karnaval Kerukunan (Inter-ReligiousHarmony Carnival); Kemah Pemuda Lintas Agama (Interfaith YouthCamp) ataupun berbagai ajang kompetisi/lomba lainnya terkaitkerukunan beragama bagi kalangan masyarakat.

Di tingkat pusat, Kementerian Agama juga membangun Pusat Harmoni Lintas Iman (Inter-Religious Harmony Centre), suatutempat edukatif di mana masyarakat dapat memperoleh informasimengenai berbagai aspek tentang agama dan kehidupan keagamaan,melalui buku-buku, gambar/foto, dan video ataupun melalui dialogdengan tenaga ahli/laboran. Di samping itu dalam rangka turut sertamewujudkan ketertiban dunia, Pemerintah juga berperan serta dalamkegiatan Interfaith and Intercultural Dialogue baik secara regional,bilateral, maupun multilateral. Kementerian Agama RI bekerjasamadengan Direktorat Jenderal

Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI secara rutin merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Interfaith Dialogue sebagai “soft power diplomacy” dalam mempromosikan perdamaian dunia.

A.3.3.10 Pembinaan Aliran Keagamaan

Selama lima tahun terakhir, aliran-aliran keagamaan masih menjadi salah satu fenomena yang mewarnai kehidupan keagamaan di Indonesia. Kementerian Agama secara proaktif melakukan berbagai langkah penanganan dengan tetap menjamin hak-hak dasar warga negara, antara lain sosialisasi pentingnya menjaga kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dengan tidak melakukan penodaan agama, mendorong dan memfasilitasi tokoh-tokoh agama agar melakukan pembinaan terhadap umatnya secara intens dan simultan, serta memberikan pemahaman dan pencegahan dini agar masyarakat tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menangani berbagai permasalahan paham keagamaan.

A.3.3.11 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

A.3.3.11.1 Pelayanan Administrasi Keagamaan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama yang menempati posisi terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan umat Islam. Jumlah KUA pada Tahun 2015 adalah 5.497 KUA menyesuaikan pemekaran wilayah di beberapa daerah dan masih terdapat 501 KUA baru yang diusulkan untuk mendapat persetujuan dari Kemenpan RB agar pelayanan masyarakat di wilayah pemekaran dapat terselenggara. Dari seluruh KUA yang definitif tersebut baru tersedia 1.741 atau 32% KUA yang telah memenuhi standar pelayanan masyarakat.

Secara tipologi terdapat 706 KUA yang berada dalam tipologi D1 yaitu KUA Kecamatan berada pada lokasi terpencil di daerah daratan dan sejumlah 248 KUA bertipologi D2 yaitu KUA Kecamatan yang berada pada lokasi terpencil di daerah kepulauan

dan daerahperbatasan.

Berdasarkan kondisi bangunan gedung KUA terdapat 5.026 unit telah memiliki gedung dan lahan sendiri, 3.931 KUA kondisibangunannya masih baik, 806 KUA kondisinya rusak ringan, 289 kondisinya rusak berat. Selebihnya, 471 KUA belum memiliki lahan dan gedung sendiri.

Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan masyarakat, sejak tahun 2014 KUA memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebesar Rp3.000.000,- perbulan. Jumlah pegawai KUA seluruhnya 17.569, termasuk 4.445 tenaga fungsional Penghulu, yang melayani tidak kurang dari 2.300.000 peristiwa nikah setiaptahunnya. Meskipun demikian, masih terdapat 1.500 KUA yang hanya memiliki SDM kurang dari 3 pegawai diantaranya 800 KUA dengan jumlah 2 orang pegawai dan 700 KUA dengan jumlah 1 orang pegawai.

Di samping pelayanan administrasi keagamaan, di KUA juga terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan lain, seperti layanan perwakafan, produk halal, layanan hisab rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan manasik haji, konsultasi keluargasakinah, dan lain-lain. Kini KUA telah menjadi lembaga publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS), dan Sistem Informasi Manajemen Penghulu (SIM Penghulu). Satu langkah penting capaian dalam pelayanan keagamaan adalah telah terjalinnnya kerja sama (MoU) dengan Kemendagri dan MA dalam integrasi pengelolaan data kependudukan. Infografis layanan administrasi keagamaan tentang pencatatan nikah pada KUA

Terkait pelayanan administrasi keagamaan bagi Umat Khonghucu, sejak lima tahun terakhir pencatatan pernikahan masyarakat Khonghucu sudah mulai tertata dengan baik. Hal ini berkat kerjasama Kementerian Agama dengan

Kementerian Dalam Negeri melalui Sosialisasi Pelayanan Hak-hak Sipil, kepada Umat Agama Khonghucu di kabupaten/kota, yang mengikutsertakan peserta dari Kepala Dinas Adminduk, Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sebagaimana surat Menteri Agama No. 12 Tahun 2006 perihal Status Perkawinan menurut Agama Khonghucu dan Pendidikan Agama Khonghucu, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional.

A.3.3.11.2 Penyediaan Kitab Suci

Upaya meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dilakukan melalui pengembangan sarana ibadah, antara lain pemberian kitab suci umat beragama secara cuma-cuma. Pada kurun 2004-2012, Kementerian Agama telah melakukan penggandaan kitab suci Al-Qur'an sebanyak 3.480.250 eksemplar yang didistribusikan ke 33 provinsi. Penggandaan Al-Qur'an terdiri dari Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Juz Amma dan Terjemahnya, Tafsir Al-Qur'an, Surah Yasin, Al-Qur'an Saku, Tafsir Ilmi, dan Tafsir Tematik.

Kementerian Agama juga telah mengadakan kitab suci/buku keagamaan umat Kristen sebanyak 216.343 eksemplar dan untuk umat Katolik sebanyak 169.450 eksemplar. Untuk umat Hindu, kitab suci Hindu yang sudah dicetak sebanyak 38 judul buku keagamaan/kitab suci dengan jumlah 201.293 eksemplar yang konsep pengadaannya diarahkan pada buku-buku yang tergolong dalam kodifikasi Weda yang telah direkomendasikan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat. Sementara untuk umat Buddha, Kementerian Agama telah melakukan pengadaan kitab suci Tipitaka/Tripitaka sebanyak 21.798 eksemplar berupa beberapabagian dari kitab suci Sutta Pitaka, yaitu Abhidhamma Pitaka dan Millinda Panha, Petavathu, riwayat Buddha Gautama bergambar, dan Dhammapada sebanyak 5.000 eksemplar serta Buku Tuntunan Puja Bhakti sebanyak 5000 eksemplar dan buku-buku keagamaan lainnya.

Selanjutnya buku-buku tersebut telah distribusikan kepadamasing-masing komunitas umat beragama.

Terkait pengadaan Kitab Suci agama Khonghucu, Kementerian Agama juga telah mencetak kitab suci Si Shu sebanyak 2000 eksemplar, Kitab suci Yak King sebanyak 500 eksemplar, Kitab Suci Li Ji sebanyak 500 eksemplar, dan Kitab Suci Shi Jing sebanyak 500 eksemplar. Kitab suci tersebut telah didistribusikan kepada Umat Khonghucu melalui Kanwil Kemenag Provinsi di 20 provinsi dimana terdapat kantong-kantong umat agama Khonghucu.

A.3.3.11.3 Pengembangan Rumah Ibadat

Berdasarkan jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadah tampak bahwa semua pemeluk agama telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan rumah ibadah (masjid, mushalla, gereja, pura, cetiya, vihara, dan klenteng), meski dalam rasio yang bervariasi. Satu masjid, misalnya, secara rata-rata digunakan oleh 715 pemeluk muslim, sementara satu gereja Kristen melayani 267 pemeluk Kristen, satu gereja Katolik melayani 874 pemeluk Katolik, satu pura digunakan 162 pemeluk Hindu, satu vihara melayani 510 pemeluk Buddha, dan satu kelenteng melayani 180 umat Khonghucu.

A.3.3.11.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi

Ekonomi Keagamaan

Dalam ajaran agama salah satu nilai yang diajarkan adalah pentingnya mengembangkan sikap saling berbagi dan membantudiantara umat manusia. Mekanisme yang digunakan dalam melakukan kebaikan terhadap sesama sesuai ajaran agamanya, salah satunya adalah melalui penyisihan sebagian harta atau asetnya agar dapat diberikan kepada sesamanya yang lebih membutuhkan. Kementerian Agama selama ini telah berupaya melakukan peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan dana dan aset umat

sebagai potensi ekonomi yang umumnya dikelola oleh lembaga keagamaan dalam rangka mengurangi dampak dari kesenjangan ekonomi yang dialami di antara umat beragama.

Pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu menggunakan instrumen pengelolaan dana dan aset umat antara lain seperti Zakat, Wakaf, Kolekte, Dana Punia, Dana Paramita, dan Dana Persembahan Kasih.

A. 3.3.11.5 Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat

Berdasarkan hasil survei Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2011 potensi zakat nasional mencapai Rp217 triliun per tahun atau 3,4% dari total PDB, namun demikian penghimpunan zakat yang dapat dilakukan baru sebagian kecilnya saja. Pada tahun 2010 baru Rp1,5 triliun yang berhasil dihimpun, tahun 2011 sebanyak Rp1,7 triliun, tahun 2012 Rp2,2 triliun, tahun 2013 Rp2,7 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp3,3 triliun.

Untuk mengoptimalkan potensi zakat beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah antara lain, menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi UU No. 38 Tahun 1999 sejalan dengan semangat integrasi pengelolaan zakat. Selanjutnya telah diterbitkan juga Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Inpres No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Pembayaran zakat orang pribadi pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang disahkan pemerintah memperoleh insentif dari negara, yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

A.3.3.11.6 Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf

Untuk wakaf, Kementerian Agama telah melakukan pengembangan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai database aset wakaf, dan pemetaan dan identifikasi potensi harta wakaf diseluruh tanah air. Sejak terbitnya regulasi bidang wakaf, baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, maupun lainnya telah terjadi gerak

dinamika dunia perwakafan ditanah air. Berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak tahun 2007 menjadi mitra strategis Kementerian Agama dalam mendorong perkembangan wakaf nasional.

Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2014, tanah wakaf tersebar di 435.395 lokasi dengan luas total 4.142.464.787,906 m² di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67,22% telah bersertifikat, sedangkan 32,78% masih belum bersertifikat. Data tersebut memperlihatkan masih cukup banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat sehingga berpotensi mengalami sengketa di kemudian hari. Info prosedur wakaf pada KUA Kroya, Jawa Tengah.

Langkah penting Kementerian Agama untuk melindungi tanah wakaf adalah melaksanakan program nasional percepatan sertifikasi tanah wakaf sesuai amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Program tersebut dijalankan dalam bentuk pemberian bantuan sertifikasi tanah wakaf pada sejumlah lokasi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat.

Selain itu, Pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan wakaf, antara lain melalui pemberian bantuan pemberdayaan wakaf produktif untuk pembangunan hotel syariah, rumah kost, pertokoan, mini market, peternakan, rumah sakit, SPBU, koperasi, perikanan, dan usaha mikro lainnya.

A.3.3.11.7 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Kolekte Umat Kristen

Gereja (umat Kristiani) sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia turut berpartisipasi dalam pembangunan khususnya pembangunan bidang agama dengan memanfaatkan dana kolekte yang diprioritaskan bagi pelayanan umat. Hal ini terlihat dari pengelolaan dana kolekte atau persembahan yang

dihimpun dari umat Kristiani pada saat ibadah (kebaktian). Dana yang terhimpun tersebut dikelola oleh gereja (umat Kristiani) yang pemanfaatannya antara lain untuk membiayai operasional gereja (ATK, telepon, listrik, transport, dll), pembangunan gedung gereja (tempat ibadah), dan sarana peribadatan (pengadaan alkitab, nyanyian rohani, alat musik).

Gereja juga berperan dalam pelayanan sosial (diakonia) yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi gereja yaitu membantu fakir-miskin, orang jompo, penanggulangan bencana alam, pendidikan dan kesehatan yang pendanaannya bersumber dari kolekte.

Dana tersebut di atas dikelola oleh gereja secara mandiri dan swadaya dengan akuntabel dan transparan melalui warta jemaat (penyampaian informasi kepada umat) saat pelaksanaan ibadah yang dibuat secara tertulis dan disampaikan berkala (minggu, bulan dan tahun).

A.3.3.11.8 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Kolekte Umat Katolik

Sejak berabad-abad umat Katolik membuat kolekte dengan tujuan menopang hidup para pelayan altar, perayaan ibadat ilahi, karya kerajinan, karya amal, memenuhi kebutuhan rumah atau tempat ibadah, serta mengatasi kemiskinan.

Kementerian Agama secara umum terus mendukung pengelolaan dana kolekte umat Katolik yang dikelola langsung oleh umat Katolik bersama Hirarki Gereja Katolik untuk penyelenggaraan pelayanan umat. Dana Kolekte tersebut juga merupakan tanda solidaritas dengan orang-orang yang membutuhkan, keluarga, lingkungan, wilayah dan paroki bahkan keuskupan atau siapa saja yang menderita kekurangan tanpa batas wilayah maupun agama. Maka di beberapa tempat kolekte itu menjadi sumber untuk membentuk dana solidaritas, antara lain untuk membangun dan melengkapi kebutuhan rumah sakit, panti asuhan atau rumah para lansia, rumah ibadah,

pastoran atau gedung paroki dan ruangserba guna untuk berbagai kegiatan umum.

A.3.3.11.9 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Punia

Untuk agama Hindu pengelolaan Dana Punia dikelolalangsung oleh Badan Dharma Dana Nasional (BDDN). BDDN inimerupakan lembaga yang didirikan oleh Parisada Hindu DharmaIndonesia (PHDI) melalui Bhisama No. IV/TAP/M.Sabha tentangDharma Dana Nasional yang keberadaannya diperkuat denganKeputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No : 43tahun 2012 tentang Badan Dana Nasional Yayasan Adikara DharmaParisada sebagai Lembaga yang sah menerima dan MengelolaDharma Dana Hindu Indonesia. Pengelolaan dana punia sebagaiupaya untuk menghimpun dana masyarakat dalam rangkameningkatkan kesejahteraan umat. Dana umat yang dikelola BDDNini memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan. Karena potensiekonomi dari dana yang dikumpulkan dari umat tersebut sangatberperan untuk memberikan bantuan pendidikan, kesehatan danmeningkatkan kesejahteraan umat.

A.3.3.11.10 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Paramita

Peran umat Buddha dalam membiayai kebutuhanoperasional harian rumah ibadah dilakukan salah satunya melaluipengelolaan Dana Paramita yang dikumpulkan secara sukarela.Pengelolaan Dana Paramita dilakukan oleh pengurus rumah ibadahyang langsung dikelola masyarakat Buddha. Selain melalui bantuanoperasional pendamping pengelolaan dana paramita, Pemerintahterus mendukung upaya peningkatan peran dan manfaatpengelolaan dana paramita, melalui proses pembentukan Wadah/Badan/ Lembaga yang mengelola Dana Paramita secara khusus.Dengan terbentuknya Lembaga Pengelola Dana Paramita, pengelolaanDana Paramita lebih tertata dengan baik sehingga Dana Paramitaidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional kebutuhanseharian rumah ibadah

tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

A.3.3.11.11 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain dilakukan melalui revitalisasi asrama haji, pengembangan sistem pendaftaran haji, pengembangan pelayanan haji, optimalisasi dana haji dan reformasi keuangan haji, rasionalisasi BPIH, peningkatan kualitas laporan keuangan haji, dan peningkatan akuntabilitas Dana Abadi Umat (DAU).

A.3.3.11.12 Revitalisasi Asrama Haji

Selama tahun 2010 s.d 2013 pengelolaan asrama haji selalu menjadi sorotan masyarakat khususnya terkait dengan pengelolaan dana asrama haji. Pada tahun 2014, Kementerian Agama telah berupaya memperbaiki pengelolaan asrama haji yaitu dengan menjadikan asrama haji sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kementerian Agama. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri & RB) sudah menyetujui 9 (sembilan) asrama haji yang akan ditetapkan sebagai UPT, hanya tinggal menunggu terbitnya Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri PAN & RB. Sembilan asrama haji yang akan ditetapkan sebagai UPT yakni asrama haji Aceh, Medan, Padang, Jakarta (Pondok Gede), Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan Nusa Tenggara Barat

Selain penetapan UPT tersebut, saat ini Kementerian Agama telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi asrama haji. Pada tahun 2013 dilakukan revitalisasi pada 4 asrama haji embarkasi dan sebuah asrama transit, selanjutnya pada tahun 2014 dilakukan revitalisasi terhadap 4 asrama haji embarkasi.

A.3.3.11.13 Pengembangan Sistem Pendaftaran Haji

Kebijakan dalam proses pendaftaran haji yang telah dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah dengan menerapkan prinsip first come first served berdasarkan urutan sesuai perolehan nomor porsi berdasarkan alokasi kuota secara nasional maupun provinsi. Pengembangan pendaftaran haji sistem online juga telah dilakukan secara bertahap yang diawali

dengan memanfaatkan main system milik Garuda Indonesia sebagai host Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, yang dimulai sejak tahun 1996. Siskohat yang dibangun dan terhubung sampai tingkat kabupaten/kota telah memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji nasional secara sistem, dan upaya memberikan kepastian pergi haji pada tahun berjalan, serta adil secara berurutan untuk memperoleh nomor porsi haji. Pendaftaran haji melalui Siskohat dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan setiap saat secara real time.

Siskohat pada awalnya didesain berbasis Green Screen (Aplikasi Power Term) dimana pengguna dan lisensi yang terbatas yaitu pengguna harus meng-install aplikasi khusus. Namun semakin berkembangnya teknologi, Siskohat yang dikembangkan sudah berbasis website yang dapat diakses dimanapun dengan menggunakan browser internet seperti Google Chrome, Internet Explorer dan Mozilla Firefox. Infografis alur layanan pendaftaran haji reguler

A.3.3.11.14 Pengembangan Pelayanan Haji

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Jemaah haji, telah ditempuh langkah-langkah perbaikan berupa pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM), penyusunan dan penerbitan ISO:9001 dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 yang telah diperoleh sejak Tahun 2010. Penerapan ISO 9001 diterapkan pada unit pelayanan haji di pusat, sebagian

daerah dan Arab Saudi. Untuk menjamin terlaksananya sistem ISO 9001 dilakukan internal audit dan eksternal audit (*surveillance*), untuk memungkinkan melakukan penyempurnaan SMM dan pembaruan *Standart Operating Procedure* (SOP) apabila diperlukan. Salah satu tuntutan penerapan sistem ISO 9001 adalah keharusan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan (jemaah haji).

Berdasarkan hasil survei kepuasan jemaah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama 5 tahun terakhir ini tingkat kepuasan jemaah dapat dipertahankan dalam kategori memuaskan. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan jemaah haji rata-rata tahun 2010 sebesar 81,45 %, tahun 2011 sebesar 83,31 %, tahun 2012 sebesar 81,32 %, Tahun 2013 sebesar 82,69%, dan tahun 2014 sebesar 81,52%.

A.3.3.11.15 Optimalisasi Dana Haji dan Reformasi Keuangan Haji

Pada tahun 2004 Kementerian Agama mulai menerapkan pendaftaran haji dengan menggunakan setoran awal. Optimalisasi setoran awal hanya berbentuk giro karena jumlah pendaftar masih sedikit, sehingga jumlah perolehan nilai manfaat masih sedikit dan digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan di Arab Saudi. Seiring dengan perkembangan jumlah pendaftar haji yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang juga berimplikasi terhadap meningkatnya akumulasi dana setoran haji maka telah diambil kebijakan optimalisasi dan reformasi pengelolaan dana haji.

Untuk mengoptimalkan dana setoran awal BPIH yang semakin besar, penempatan dana dari hanya pada rekening giro telah diperluas juga pada deposito, pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk, dan Penyertaan Saham pada Bank Muamalat Indonesia untuk mendapatkan nilai manfaat lebih besar.

A.3.3.11.16 Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Haji

Secara umum, tata kelola penyelenggaraan ibadah haji

telah berjalan dengan baik, yaitu dengan dibuktikan melalui upaya Kementerian Agama dalam melakukan optimalisasi dana haji dan reformasi keuangan haji yaitu dengan terbebasnya Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji dari opini Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2011, 2012 dan 2013 oleh BPK RI. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk tetap mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji dan akan terus ditingkatkan menjadi lebih baik, serta menunjukkan pula bahwa dana haji dikelola secara profesional, akuntabel dan transparan oleh Kementerian Agama. Secara jelas penilaian Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji sejak tahun 2009 - 2013 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

2.1 VISI, MISI DAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

2.1.1 Visi Pembangunan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

2.1.2 Misi Pembangunan Nasional

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA

2.2.1 Visi Kementerian Agama

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional sebagaimana telah disebut di atas, Visi Kementerian Agama 2015-2019 adalah: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONGROYONG”.

2.2.2 Misi Kementerian Agama

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Agama adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
4. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
6. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran

2.2.3.1 Tujuan

Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan.

Secara lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.

Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2015-2019 adalah:

TA.1 Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

TA.2 Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.

TA.3 Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.

TA.4 Peningkatan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan.

TA.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan dan akuntabel untuk pelayanan ibadah haji yang prima.

TA.6 Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan bidang

agamayang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah:

TP.1 Peningkatan akses pendidikan yang setara bagi masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).

TP.2 Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.

TP.3 Penurunan tingkat kegagalan masyarakat dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun).

TP.4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

TP.5 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melakukan proses mendidik yang profesional di seluruh satuan pendidikan.

TP.6 Peningkatan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang berkualitas.

TP.7 Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas.

2.2.3.2 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama, dan sasaran bidang pendidikan.

A.4. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN AGAMA

Secara umum ruang lingkup tugas Kementerian Agama sangat besar. Pada tahun 2015, struktur anggaran Kementerian Agama mengemban 3 fungsi, yaitu Pelayanan Umum, Agama, dan Pendidikan.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Agama Tahun 2010 – 2014 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2010 – 2014, program-program di lingkungan Kementerian Agama terdiri atas 11 program sesuai dengan jumlah unit Eselon I yang ada, dimana Sekjen mengemban dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negera Kementerian Agama.

Sedangkan Eselon I lainnya melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun kesebelas program yang terdapat pada Kementerian Agama pada tahun 2014 ini adalah:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam
5. Program Pendidikan Islam
6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen
7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik
8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu
9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha
10. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah
11. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.5. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan Laporan Operasional serta laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.5.1. Basis Akuntansi

Sejak tahun 2008 sampai dengan 2014, Kementerian Agama menerapkan basis *cash toward accrual* (CTA) dalam hal penyusunan Laporan Keuangannya. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.

Namun, sejak tahun 2015, Kementerian Agama dalam hal penyusunan Laporan Keuangannya telah menerapkan basis akrual. Perbedaan mendasar antara Laporan Keuangan basis Akrual dengan basis Kas Menuju Akrual adalah dari Komponen

Laporan Keuangan yang harus disajikan/dilaporkan. Komponen laporan keuangan yang menggunakan basis *cash toward accrual* (CTA) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan pada basis akrual terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Total nilai aset pada tahun 2014 *audited* akan menjadi saldo awal aset pada tahun 2015. Sedangkan yang menjadi saldo awal kewajiban tahun 2015 adalah total kewajiban *audited* 2014 dikurang dengan pendapatan yang ditangguhkan ditambah nilai hibah langsung yang belum disahkan (pada neraca percobaan tahun 2014). Sedangkan yang menjadi saldo awal ekuitas tahun 2015 adalah total ekuitas dana audited tahun 2014 ditambah dengan pendapatan yang ditangguhkan dikurang dengan nilai akun hibah langsung yang belum disahkan (pada neraca percobaan tahun 2014).

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5.2. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Agama dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai

wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya

aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam

Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar

nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis AkruaI
Pertama Kali*

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akruaI sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akruaI. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akruaI pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.



CALK LAPORAN REALISASI ANGGARAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Kementerian Agama telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Rincian perubahan berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Anggaran Awal dan Anggaran setelah Revisi Tahun 2015

Uraian	Estimasi Pendapatan 2015	
Pendapatan Negara dan Hibah		
PNBP Lainnya	Rp	1.357.065.938.700,00
PNBP BLU	Rp	739.387.855.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.096.453.793.700,00

Uraian	2015	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	Rp 27.223.763.324.000,00	Rp 35.613.250.275.000,00
Belanja Barang	Rp 13.682.288.639.000,00	Rp 18.331.024.663.000,00
Belanja Modal	Rp 4.140.297.787.000,00	Rp 4.727.801.931.000,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp 11.415.248.150.000,00	Rp 2.032.833.299.000,00
Jumlah Belanja	Rp 56.461.597.900.000,00	Rp 60.704.910.168.000,00

Sedangkan apabila dilihat dari Program Kementerian Agama, maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Anggaran Awal dan Anggaran setelah Revisi Menurut Program TA 2015

Kode Program	Program	2015	
		Anggaran Awal	Anggaran Revisi
025.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 2.176.917.518.000,00	Rp 2.976.568.679.000,00
025.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	Rp 128.200.000.000,00	Rp 129.200.000.000,00
025.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	Rp 149.566.567.000,00	Rp 166.505.829.000,00
025.04	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	Rp 466.372.280.000,00	Rp 524.524.685.000,00
025.06	Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah	Rp 1.076.570.217.000,00	Rp 1.089.936.493.000,00
025.07	Program Pendidikan Islam	Rp 45.211.576.365.000,00	Rp 46.672.494.491.000,00
025.08	Program Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 3.613.801.733.000,00	Rp 5.382.525.401.000,00
025.09	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 1.700.793.950.000,00	Rp 1.755.778.336.000,00
025.10	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 878.038.937.000,00	Rp 914.798.078.000,00
025.11	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 731.250.504.000,00	Rp 752.375.828.000,00
025.12	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	Rp 328.509.829.000,00	Rp 340.202.348.000,00
	Total	Rp56.461.597.900.000,00	Rp 60.704.910.168.000,00

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp2.019.877.460.
038,00*

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp2.019.877.460.038,00 atau mencapai 96,35 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.096.453.793.700,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Agama adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Rincian Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2015

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	(%)
1 PNBPN Lainnya	Rp 1.357.065.938.700,00	Rp 1.221.834.051.434,00	90,03
2 PNBPN BLU	Rp 739.387.855.000,00	Rp 798.043.408.604,00	107,93
Jumlah Pendapatan	Rp 2.096.453.793.700,00	Rp 2.019.877.460.038,00	96,35

*Realisasi
Pendapatan
Negara Bukan
Pajak Lainnya
Rp1.221.834.051.
434,00*

B.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.221.834.051.434,00 atau mencapai 90,03 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.357.065.938.700,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Rincian Anggaran dan Realisasi PNBPN Lainnya

No	Uraian	2015		% Realisasi Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Jasa KUA	Rp 1.077.605.765.000,00	Rp 733.105.375.793,00	68,03
2	Pendapatan Pendidikan	Rp 278.975.336.563,00	Rp 327.034.625.314,00	117,23
4	Pendapatan Umum	Rp 484.837.137,00	Rp 161.694.050.327,00	33.350,18
JUMLAH		Rp 1.357.065.938.700,00	Rp 1.221.834.051.434,00	90,03

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk TA 2015 dibandingkan dengan TA 2014 terdapat kenaikan sebesar 30,34 persen. Pendapatan jasa KUA menurun di bawah estimasi pendapatan disebabkan oleh target penerimaan jasa KUA tidak tercapai dikarenakan adanya perubahan tarif biaya Nikah jika melaksanakan di luar kantor dan jika dilaksanakan di dalam kantor maka tidak dipungut biaya nikah. Pendapatan pendidikan meningkat di atas estimasi karena bertambahnya jumlah mahasiswa yang disebabkan bertambahnya perguruan tinggi negeri islam maupun kristen.

Perbandingan realisasi PNBPN Lainnya TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

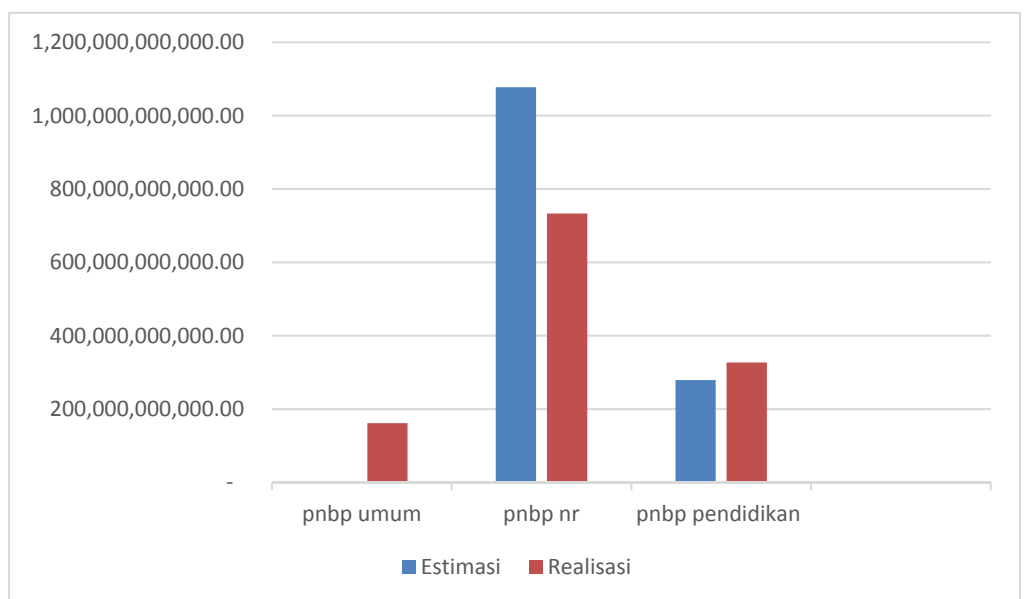
Tabel 5

Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya TA 2015 dan TA 2014

Uraian	Realisasi Pendapatan		Naik (Turun)	
	TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
Pendapatan Jasa KUA	Rp 733.105.375.793,00	Rp 360.507.728.410,00	Rp 372.597.647.383,00	103,35
Pendapatan Pendidikan	Rp 327.034.625.314,00	Rp 281.252.804.287,00	Rp 45.781.821.027,00	16,28
Pendapatan Umum	Rp 161.694.050.327,00	Rp 295.649.838.607,00	Rp (133.955.788.280,00)	(45,31)
JUMLAH	Rp 1.221.834.051.434,00	Rp 937.410.371.304,00	Rp 284.423.680.130,00	30,34

Grafik

Estimasi dan Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2015



Kenaikan realisasi pendapatan Jasa KUA mengalami peningkatan yg signifikan karena diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yaitu terjadinya perubahan tarif PNBPNR dari yang sebelumnya Rp30.000,00 per peristiwa nikah berubah menjadi Rp600.000,00 per peristiwa nikah. Perubahan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor No. 48 Tahun 2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis PNBPNR yang berlaku pada Departemen Agama yang ditindaklanjuti dengan PMA Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang kemudian direvisi menjadi PMA Nomor 46 Tahun 2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Pengelolaan PNBPNR atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan. Selain tarif, perubahan juga terjadi pada mekanisme pengelolaan dari yang sebelumnya pengelolaan lebih fokus di Kankemenag, menjadi terpusat di Bimas Islam di Jakarta. Penyetoran penerimaan yang sebelumnya melalui rekening Bendahara Penerimaan di Kankemenag berubah melalui rekening Bendahara Penerima pada Ditjen Bimas Islam Pusat di Jakarta. Rekap data peristiwa nikah dan rujuk tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut ini:

Tabel 6

Rekap Data Peristiwa Nikah dan Rujuk Tahun 2015 dan 2014

No.	Wilayah	TA 2015	TA 2014
1	Prov Aceh	42.673	40.565
2	Prov Sumatera Utara	83.660	92.935
3	Prov Sumatera Barat	42.736	59.515
4	Prov Riau	42.371	44.551
5	Prov Kep. Riau	13.190	14.140
6	Prov Jambi	24.752	28.265
7	Prov Sumatera Selatan	62.599	71.799
8	Prov Bangka Belitung	7.952	10.100
9	Prov Bengkulu	14.725	14.576
10	Prov Lampung	67.459	74.815
11	Prov DKI Jakarta	55.969	57.652
12	Prov Jawa Barat	441.800	421.867

13	Prov Banten	91.018	98.938
14	Prov Jawa Tengah	327.253	300.279
15	Prov D.I. Yogyakarta	23.734	24.161
16	Prov Jawa Timur	313.150	348.653
17	Prov Kalimantan Barat	23.407	24.263
18	Prov Kalimantan Tengah	16.790	17.888
19	Prov Kalimantan Timur	21.818	29.729
20	Prov Kalimantan Selatan	27.490	19.924
21	Prov Bali	3.169	3.504
22	Prov NTB	48.862	56.200
23	Prov. Nusa Tenggara Timur	3.506	2.434
24	Prov. Sulawesi Selatan	66.606	72.369
25	Prov. Sulawesi Barat	7.707	9.768
26	Prov. Sulawesi Tengah	19.798	21.089
27	Prov. Sulawesi Utara	6.805	7.412
28	Prov. Gorontalo	9.301	9.799
29	Prov. Sulawesi Tenggara	15.984	20.616
30	Prov. Maluku	6.234	7.870
31	Prov. Maluku Utara	7.825	8.974
32	Prov. Papua	4.292	4.552
33	Prov. Papua Barat	3.201	2.903
Jumlah		1.947.836	2.022.105

Atas PNBPN yang telah disetorkan ke kas negara, Kementerian Agama diberikan izin untuk menggunakan kembali penerimaan tersebut maksimal sebesar 80% dari PNBPN yang masuk ke kas negara.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.06/2001 tentang Ijin Penggunaan Sebagian PNBPN NR dan Kepdirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/748 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, PNBPN NR yang masuk ke kas negara dapat digunakan untuk:

- a. transpor penghulu/petugas yang melakukan layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor;

- b. honorarium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor;
- c. honorarium pengelola PNBP biaya nikah atau rujuk;
- d. kursus pra nikah;
- e. supervisi administrasi nikah atau rujuk

Selain kenaikan PNBP NR, kenaikan Realisasi PNBP lainnya juga disebabkan oleh naiknya realisasi pendapatan pendidikan. Realisasi pendapatan pendidikan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa yang mendaftar di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

Perbandingan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Agama Negeri menurut tahun akademik adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Perbandingan Jumlah Mahasiswa Menurut Tahun Akademik pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri – Non BLU

No.	Nama PTAN	Jumlah Mahasiswa	
		Tahun Akademik 2015-2016	Tahun Akademik 2014-2015
1	IAIN Samarinda	3.373	3.097
2	IAIN Dato Karama Palu	3.050	3.245
3	STAIN Watampone	3.983	3.566
4	STAIN Pare-Pare	2.965	2.190
5	IAIN Palopo	2.997	3.085
6	IAIN Kendari	2.725	2.849
7	IAIN Ternate	2.535	3.297
8	IAIN Bengkulu	5.946	5.300
9	STAIN Curup	3.732	4.505
10	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	8.221	7.570
11	STAIN Pekalongan	7.207	5.063
12	STAIN Kudus	7.257	6.982
13	IAIN Salatiga	6.510	3.140
14	IAIAN Purwokerto	5.630	5.444
15	IAIN Jember	5.242	4.827
16	IAIN Tulungagung	5.873	4.328
17	STAIN Kediri	3.955	4.246
18	STAIN Ponorogo	3.918	4.457
19	STAIN Pamekasan	4.541	3.383
20	IAIN Padang Sidempuan	4.742	4.346
21	IAIN Imam Bonjol	9.993	8.452
22	STAIN Batusangkar	5.570	4.541
23	IAIN Bukittinggi	4.940	5.875
24	STAIN Kerinci	4.156	4.589
25	IAIN Pontianak	4.448	3.236
26	IAIN Antasari Banjarmasin	6.620	7.203
27	IAIN Ambon	4.179	4.500
28	IAIN Manado	2.184	1.856
29	IAIN Gorontalo	3.723	4.000
30	IAIN Palangkaraya	2.710	2.550
31	STAIN Jurai Siwo Metro	6.346	6.209
32	IAIN Surakarta	7.486	6.353
33	STAIN Malikussaleh Lhokseumawe	4.065	4.418
34	STAIN AL-Fatah Jayapura	500	1.500
35	STAIN Bangka Belitung	1.764	1.891
36	STAIN Sorong	448	331
37	IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa	7.029	6.403
38	STAIN Gajah Putih	2.279	1.700
39	STAIN Meulaboh	1.896	207
40	STAIN Bengkulu	1.105	973
Jumlah		175.843	161.707

Tabel 8

Perbandingan Jumlah Mahasiswa Menurut Tahun Akademik pada Perguruan Tinggi Agama Kristen Negeri – Non BLU

No.	Nama PTAN	Jumlah Mahasiswa	
		Tahun Akademik 2015-2016	Tahun Akademik 2014-2015
1	STAKN Tarutung	1.217	1.181
2	STAKN Ambon	927	1.819
3	STAKN Sentani	912	994
4	STAKN Palangkaraya	584	1.266
5	STAKN Toraja	1.032	854
6	STAKN Manado	766	716
7	STAKN Kupang	2.280	1.813
Jumlah		7.718	8.643

Tabel 9

Perbandingan Jumlah Mahasiswa Menurut Tahun Akademik pada Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri – Non BLU

No.	Nama PTAN	Jumlah Mahasiswa	
		Tahun Akademik 2015-2016	Tahun Akademik 2014-2015
1	IHDN Denpasar	3.324	2.780
2	STAHN Tampung Penyang	1.220	558
3	STAHN Gde Pudja	692	349
Jumlah		5.236	3.687

Tabel 10

Perbandingan Jumlah Mahasiswa Menurut Tahun Akademik pada Perguruan Tinggi Agama Buddha Negeri – Non BLU

No	Nama PTAN	Jumlah Mahasiswa	
		Tahun Akademik 2015-2016	Tahun Akademik 2014-2015
1	STABN Sriwijaya Tangerang Banten	162	271
2	STABN Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah	102	120
Jumlah		264	391

Realisasi

*Pendapatan BLU
Rp798.043.408.604,00*

B.1.2. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan BLU adalah pendapatan dari Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Sampai dengan tahun 2015, Satuan Kerja yang telah menerapkan PPK-BLU adalah 15 (lima belas) yang semuanya merupakan Satuan Kerja PTKN. Pendapatan BLU terdiri dari :

- a. Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan,
- b. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya,
- c. Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan,
- d. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha
- e. Pendapatan BLU Lainnya.

Realisasi Pendapatan BLU Kementerian Agama pada TA 2015 adalah sebesar Rp798.043.408.604,00 atau mencapai 107,93 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp739.387.855.000,00.

Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 11

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU

No	Uraian	2015		(%)
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	Rp 697.778.105.000,00	Rp 726.332.282.180,00	104,09
2	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	Rp 13.803.190.000,00	Rp 26.556.504.014,00	192,39
3	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	Rp 57.920.000,00	Rp 2.763.282.057,00	4.770,86
4	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	Rp 13.420.294.000,00	Rp 21.634.884.927,00	161,21
5	Pendapatan BLU Lainnya	Rp 14.328.346.000,00	Rp 20.756.455.426,00	144,86
JUMLAH		Rp 739.387.855.000,00	Rp 798.043.408.604,00	107,93

Tabel 12
Perbandingan Jumlah Mahasiswa Menurut Tahun Akademik
Pada Perguruan Tinggi Agama Negeri-BLU

No.	Nama PTAN	Jumlah Mahasiswa	
		Tahun Akademik 2015-2016	Tahun Akademik 2014-2015
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	17.871	16.377
2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	23.020	21.686
3	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	13.255	11.270
4	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	19.256	23.367
5	UIN Alauddin Makassar	21.612	16.439
6	UIN Walisongo Semarang	10.516	10.383
7	UIN Sumatera Utara	12.141	9.203
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	25.782	19.401
9	IAIN Sultan Thaha Jambi	7.180	8.630
10	UIN Sunan Ampel Surabaya	11.146	12.262
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	6.105	5.802
12	IAIN Raden Intan Lampung	12.377	91.257
13	UIN Raden Fatah Palembang	15.390	7.965
14	IAIN Mataram	6.892	6.932
15	UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh	13.258	9.925
Jumlah		215.801	270.899

B.2. BELANJA

*Realisasi Belanja
Kementerian
Agama
Rp53.826.568.922.
700,00*

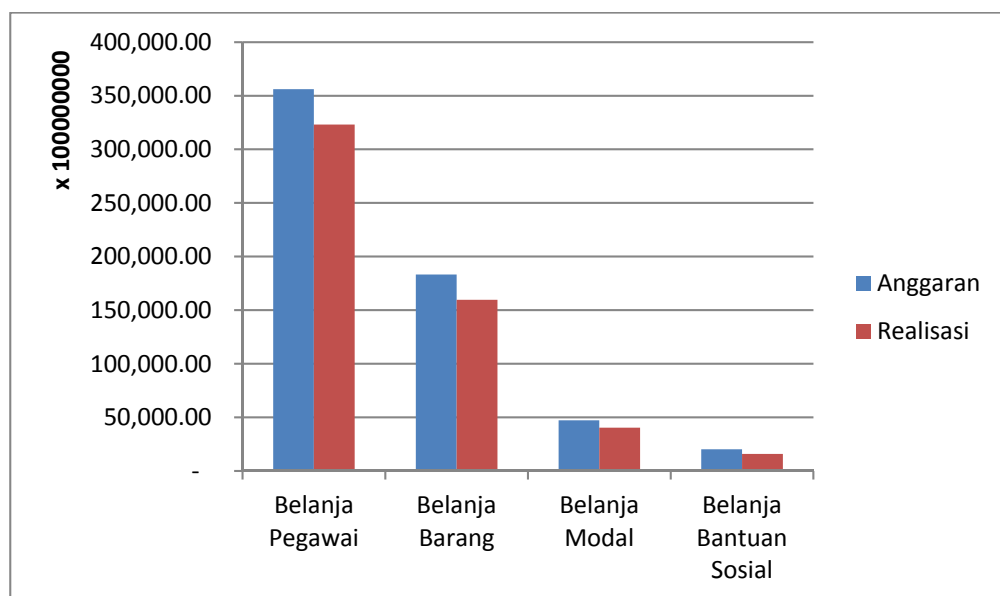
Realisasi Belanja Kementerian Agama pada TA 2015 adalah sebesar Rp53.826.568.922.700,00 atau 88,67% dari anggaran belanja sebesar Rp60.704.910.168.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja T.A. 2015

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	2015		Realisasi
		Anggaran	Realisasi	(%)
51	Belanja Pegawai	Rp 35.613.250.275.000,00	Rp 32.307.844.307.580,00	90,72
52	Belanja Barang	Rp 18.331.024.663.000,00	Rp 15.972.120.532.556,00	87,13
53	Belanja Modal	Rp 4.727.801.931.000,00	Rp 4.036.206.098.012,00	85,37
57	Belanja Bantuan Sosial	Rp 2.032.833.299.000,00	Rp 1.598.398.877.215,00	78,63
	Jumlah Belanja Bruto	Rp 60.704.910.168.000,00	Rp 53.914.569.815.363,00	88,81
	Pengembalian Belanja	Rp -	Rp (88.000.892.663,00)	-
	JUMLAH	Rp 60.704.910.168.000,00	Rp 53.826.568.922.700,00	88,67

Komposisi anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:



Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan TA 2015

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
51	Belanja Pegawai	Rp 32.270.917.657.206,00	Rp 25.814.875.037.765,00	Rp 6.456.042.619.441,00	25,01
52	Belanja Barang	Rp 15.930.199.356.610,00	Rp 6.868.581.538.515,00	Rp 9.061.617.818.095,00	131,93
53	Belanja Modal	Rp 4.035.683.467.597,00	Rp 2.110.878.780.273,00	Rp 1.924.804.687.324,00	91,18
57	Belanja Bantuan Sosial	Rp 1.589.768.441.287,00	Rp 10.864.500.496.249,00	Rp (9.274.732.054.962,00)	(85,37)
JUMLAH		Rp 53.826.568.922.700,00	Rp 45.658.835.852.802,00	Rp 8.167.733.069.898,00	17,89

Realisasi Belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar **Rp8.167.733.069.898,00** atau 17,89 persen dibandingkan pada TA 2014. Kenaikan belanja terdapat pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

1. Kenaikan belanja pegawai ini disebabkan karena kenaikan gaji PNS yang terealisasi setelah pemerintah menerbitkan PP Nomor 30 Tahun 2015 dan kenaikan tunjangan kinerja pegawai.
2. Kenaikan Belanja barang ini disebabkan karena:
 - a. Inflasi atau kenaikan harga barang;
 - b. Adanya perubahan akun Belanja Bantuan Sosial ke akun Belanja Barang, yaitu 521119 dan 52611X.
3. Kenaikan Belanja Modal ini disebabkan karena adanya peningkatan kegiatan pengadaan barang/asset dalam rangka mendukung rencana kerja strategis;
4. Penurunan Belanja Sosial disebabkan antara lain karena akun Belanja Sosial telah direvisi menjadi akun Belanja Barang sesuai dengan peruntukannya.

B.2.1. Belanja Menurut Fungsi

Realisasi Belanja Kementerian Agama dapat dikelompokkan menurut fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, agama, dan pendidikan.

Perbandingan realisasi belanja menurut fungsi TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

*Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja menurut Fungsi
TA 2015 dan TA 2014*

Kode	Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)
		TA 2015	TA 2014	%
01	Pelayanan Umum	Rp 2.897.510.825.946,00	Rp 2.085.397.761.734,00	38,94
09	Agama	Rp 5.525.022.375.213,00	Rp 3.995.828.357.609,00	38,27
10	Pendidikan	Rp 45.404.035.721.541,00	Rp 39.577.609.733.459,00	14,72
JUMLAH		Rp 53.826.568.922.700,00	Rp 45.658.835.852.802,00	17,89

Realisasi belanja menurut fungsi pelayanan umum pada TA 2015 sebesar Rp2.897.510.825.946,00 atau 73,34 persen dari anggarannya sebesar Rp3.951.043.932.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp(19.635.085.081,00).

Perbandingan realisasi belanja menurut fungsi pelayanan umum per unit eselon I adalah sebagai berikut:

*Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja menurut Fungsi Pelayanan Umum
Per Unit Eselon I TA 2015 dan TA 2014*

Kode Eselon I	Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
01	Sekretariat Jenderal	Rp 2.126.351.951.418,00	Rp 1.619.701.617.848,00	Rp 506.650.333.570,00	31,28
02	Inspektorat Jenderal	Rp 133.765.935.394,00	Rp 117.695.275.320,00	Rp 16.070.660.074,00	13,65
03	Ditjen Bimas Islam		Rp -	Rp -	-
04	Ditjen Pendidikan Islam	Rp (7.128.970,00)	Rp 104.198.872,00	Rp (111.327.842,00)	(106,84)
05	Ditjen Bimas Kristen	Rp 119.074.525.781,00	Rp 57.170.240.618,00	Rp 61.904.285.163,00	108,28
06	Ditjen Bimas Katolik	Rp 120.688.570.405,00	Rp 83.563.890.860,00	Rp 37.124.679.545,00	44,43
07	Ditjen Bimas Hindu	Rp 61.249.912.489,00	Rp 4.425.655.640,00	Rp 56.824.256.849,00	1.283,97
08	Ditjen Bimas Buddha	Rp 36.761.534.301,00	Rp 14.837.671.203,00	Rp 21.923.863.098,00	147,76
09	Ditjen Peny. Haji dan Umrah	Rp 95.467.390,00	Rp -	Rp 95.467.390,00	-
11	Badan Litbang dan Diklat	Rp 299.530.057.738,00	Rp 187.899.211.373,00	Rp 111.630.846.365,00	59,41
JUMLAH		Rp 2.897.510.825.946,00	Rp 2.085.397.761.734,00	Rp 812.113.064.212,00	38,94

Realisasi belanja menurut fungsi agama pada TA 2015 sebesar Rp5.525.022.375.213,00 atau 78,63 persen dari anggarannya sebesar Rp7.026.486.072.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp(21.793.830.362,00).

Perbandingan realisasi belanja menurut fungsi agama per unit eselon I adalah sebagai berikut:

*Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja menurut Fungsi Agama
Per Unit Eselon I TA 2015 dan TA 2014*

Kode Eselon I	Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
01	Sekretariat Jenderal	Rp 108.033.219.968,00	Rp 83.984.485.711,00	Rp 24.048.734.257,00	28,63
02	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -	-
03	Ditjen Bimas Islam	Rp 4.225.704.371.354,00	Rp 2.954.460.783.656,00	Rp 1.271.243.587.698,00	43,03
04	Ditjen Pendidikan Islam	Rp (2.596.495,00)		Rp (2.596.495,00)	-
05	Ditjen Bimas Kristen	Rp 118.203.720.000,00	Rp 114.030.873.579,00	Rp 4.172.846.421,00	3,66
06	Ditjen Bimas Katolik	Rp 55.017.213.389,00	Rp 64.479.580.158,00	Rp (9.462.366.769,00)	(14,67)
07	Ditjen Bimas Hindu	Rp 85.767.575.621,00	Rp 65.694.627.997,00	Rp 20.072.947.624,00	30,55
08	Ditjen Bimas Buddha	Rp 48.668.837.820,00	Rp 19.578.977.272,00	Rp 29.089.860.548,00	148,58
09	Ditjen Peny. Haji dan Umrah	Rp 844.590.305.766,00	Rp 666.565.778.781,00	Rp 178.024.526.985,00	26,71
11	Badan Litbang dan Diklat	Rp 39.039.727.790,00	Rp 27.033.250.455,00	Rp 12.006.477.335,00	44,41
JUMLAH		Rp 5.525.022.375.213,00	Rp 3.995.828.357.609,00	Rp 1.529.194.017.604,00	38,27

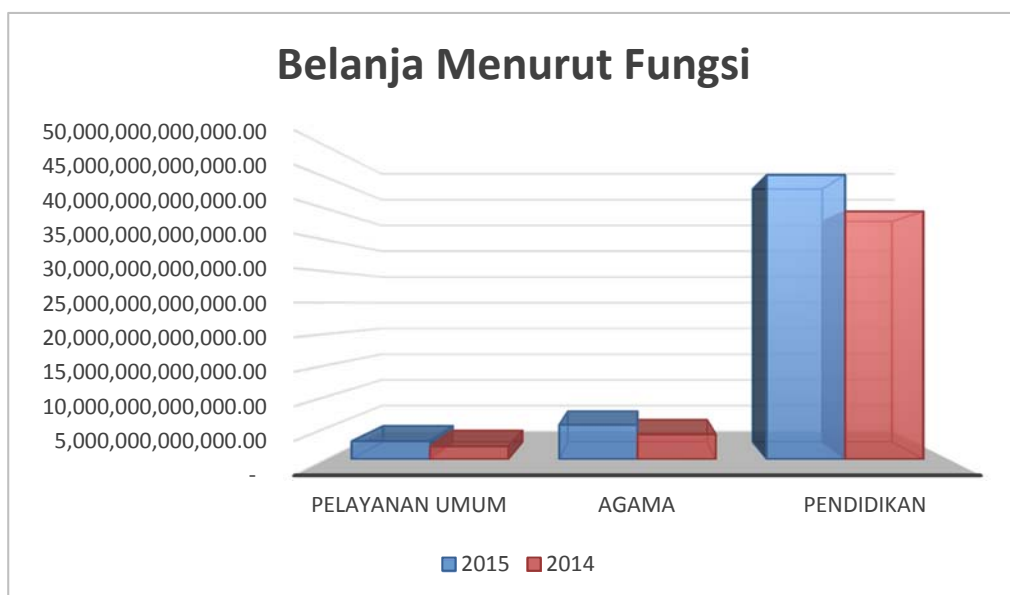
Realisasi belanja menurut fungsi pendidikan pada TA 2015 sebesar Rp45.404.035.721.541,00 atau 91,31 persen dari anggarannya sebesar Rp49.727.380.164.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp(33.331.965.034,00).

Perbandingan realisasi belanja menurut fungsi pendidikan per unit eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja menurut Fungsi Pendidikan
Per Unit Eselon I TA 2015 dan TA 2014

Kode Eselon I	Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
01	Sekretariat Jenderal	Rp 4.963.492.192,00	Rp 5.407.483.451,00	Rp (443.991.259,00)	(8,21)
02	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -	-
03	Ditjen Bimas Islam	Rp 613.637.893,00	Rp -	Rp 613.637.893,00	-
04	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 42.730.488.000.197,00	Rp 37.450.078.554.356,00	Rp 5.280.409.445.841,00	14,10
05	Ditjen Bimas Kristen	Rp 1.314.172.864.781,00	Rp 970.545.583.819,00	Rp 343.627.280.962,00	35,41
06	Ditjen Bimas Katolik	Rp 600.000.324.661,00	Rp 516.281.228.019,00	Rp 83.719.096.642,00	16,22
07	Ditjen Bimas Hindu	Rp 499.489.335.158,00	Rp 433.779.297.400,00	Rp 65.710.037.758,00	15,15
08	Ditjen Bimas Buddha	Rp 177.234.963.494,00	Rp 132.433.532.638,00	Rp 44.801.430.856,00	33,83
09	Ditjen Peny. Haji dan Umrah	Rp (878.235,00)	Rp -	Rp (878.235,00)	-
11	Badan Litbang dan Diklat	Rp 77.073.981.400,00	Rp 69.084.053.776,00	Rp 7.989.927.624,00	11,57
JUMLAH		Rp 45.404.035.721.541,00	Rp 39.577.609.733.459,00	Rp 5.826.425.988.082,00	14,72

Komposisi relisasi belanja Kementerian Agama berdasarkan fungsi adalah sebagai berikut:



B.2.2. Belanja Menurut Program

*Belanja
Kementerian
Agama menurut
Program*

Realisasi Belanja Kementerian Agama dapat dikelompokkan menurut program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama, Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama, Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama, Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah, Program Pendidikan Islam, Program Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Bimbingan Masyarakat Buddha. Rincian anggaran dan realisasi belanja Kementerian Agama TA 2015 menurut program adalah sebagai berikut:

Tabel 19

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2015

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
025.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp 2.976.568.679.000,00	Rp 2.125.005.803.740,00	71,39
025.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	Rp 129.200.000.000,00	Rp 116.841.875.337,00	90,43
025.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	Rp 166.505.829.000,00	Rp 133.765.935.394,00	80,34
025.04	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	Rp 524.524.685.000,00	Rp 415.911.434.476,00	79,29
025.06	Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah	Rp 1.089.936.493.000,00	Rp 844.500.947.085,00	77,48
025.07	Program Pendidikan Islam	Rp 46.672.494.491.000,00	Rp 42.728.599.727.508,00	91,55
025.08	Program Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 5.382.525.401.000,00	Rp 4.225.683.318.905,00	78,51
025.09	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 1.755.778.336.000,00	Rp 1.551.384.023.317,00	88,36
025.10	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 914.798.078.000,00	Rp 775.705.461.255,00	84,80
025.11	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 752.375.828.000,00	Rp 646.506.823.268,00	85,93
025.12	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	Rp 340.202.348.000,00	Rp 262.663.572.415,00	77,21
JUMLAH		Rp 60.704.910.168.000,00	Rp 53.826.568.922.700,00	88,67

B.2.3. Belanja Menurut Sumber Dana

*Belanja
Kementerian
Agama menurut
Sumber Dana*

Realisasi Belanja Kementerian Agama dapat dikelompokkan menurut sumber dana, yaitu sumber dana Rupiah Murni, Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni Pendamping, PNBPN, Badan Layanan Umum, Hibah Langsung Dalam Negeri, Surat Berharga Syariah Negara. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 menurut Sumber Dana adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Sumber Dana
TA 2015

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
01	Rupiah Murni	Rp 57.446.540.767.000,00	Rp 51.657.699.213.621,00	89,92
02	Pinjaman Luar Negeri	Rp 375.680.554.000,00	Rp 233.510.406.620,00	62,16
03	Rupiah Murni Pendamping	Rp 90.000.000.000,00	Rp 75.060.535.728,00	83,40
04	PNBP	Rp 1.304.670.759.000,00	Rp 704.192.064.465,00	53,97
06	Badan Layanan Umum	Rp 760.965.478.000,00	Rp 609.107.782.067,00	80,04
07	Stimulus	Rp -	Rp -	-
10	Hibah Langsung Dalam Negeri	Rp 44.583.027.000,00	Rp 43.373.279.845,00	97,29
12	Hibah Langsung Barang Dalam Negeri	Rp -	Rp -	-
19	Surat Berharga Syariah Negara	Rp 682.469.583.000,00	Rp 503.625.640.354,00	73,79
JUMLAH		Rp 60.704.910.168.000,00	Rp 53.826.568.922.700,00	88,67

Perbandingan realisasi belanja Kementerian Agama menurut Sumber Dana TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Belanja menurut Sumber Dana
TA 2015 dan 2014

Kode	Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
01	Belanja Rupiah Murni	Rp 51.657.699.213.621,00	Rp 44.318.189.705.718,00	Rp 7.339.509.507.903,00	16,56
02	Belanja Pinjaman Luar Negeri	Rp 233.510.406.620,00	Rp 133.194.543.784,00	Rp 100.315.862.836,00	75,32
03	Belanja Rupiah Murni Pendamping	Rp 75.060.535.728,00	Rp 69.953.533.604,00	Rp 5.107.002.124,00	7,30
04	Belanja PNBPN	Rp 704.192.064.465,00	Rp 362.627.672.952,00	Rp 341.564.391.513,00	94,19
06	Belanja BLU	Rp 609.107.782.067,00	Rp 534.984.408.850,00	Rp 74.123.373.217,00	13,86
07	Stimulus	Rp -	Rp -	Rp -	-
10	Hibah Langsung Dalam Negeri	Rp 43.373.279.845,00	Rp 43.891.636.800,00	Rp (518.356.955,00)	(1,18)
12	Hibah Langsung Barang Dalam Negeri	Rp -	Rp -	Rp -	-
19	Surat Berharga Syariah Negara	Rp 503.625.640.354,00	Rp 195.994.351.094,00	Rp 307.631.289.260,00	156,96
JUMLAH		Rp 53.826.568.922.700,00	Rp 45.658.835.852.802,00	Rp 8.167.733.069.898,00	17,89

*Belanja
Kementerian
Agama menurut
Sumber Dana
Rupiah Murni
Rp51.657.699.213.621,00*

Realisasi belanja menurut sumber dana Rupiah Murni pada TA 2015 sebesar Rp51.657.699.213.621,00 atau 89,92 persen dari anggarannya sebesar Rp57.446.540.767.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp(74.349.796.422,00).

Perbandingan realisasi belanja menurut Sumber Dana Rupiah Murni TA 2015 dan TA 2014 Per Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Belanja menurut Sumber Dana Rupiah Murni
Per Unit Eselon I TA 2015 dan TA 2014

Kode Eselon I	Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
01	Sekretariat Jenderal	Rp 2.239.348.663.578,00	Rp 1.709.093.587.010,00	Rp 530.255.076.568,00	31,03
02	Inspektorat Jenderal	Rp 133.765.935.394,00	Rp 117.695.275.320,00	Rp 16.070.660.074,00	13,65
03	Ditjen Bimas Islam	Rp 3.775.242.498.091,00	Rp 2.841.694.600.165,00	Rp 933.547.897.926,00	32,85
04	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 41.244.360.271.860,00	Rp 36.438.975.614.434,00	Rp 4.805.384.657.426,00	13,19
05	Ditjen Bimas Kristen	Rp 1.542.245.013.812,00	Rp 1.128.337.108.625,00	Rp 413.907.905.187,00	36,68
06	Ditjen Bimas Katolik	Rp 775.706.108.455,00	Rp 664.324.699.037,00	Rp 111.381.409.418,00	16,77
07	Ditjen Bimas Hindu	Rp 642.264.971.145,00	Rp 496.957.487.773,00	Rp 145.307.483.372,00	29,24
08	Ditjen Bimas Buddha	Rp 262.309.211.615,00	Rp 166.523.390.063,00	Rp 95.785.821.552,00	57,52
09	Ditjen Peny. Haji dan Umrah	Rp 626.544.938.795,00	Rp 470.571.427.687,00	Rp 155.973.511.108,00	33,15
11	Badan Litbang dan Diklat	Rp 415.911.600.876,00	Rp 284.016.515.604,00	Rp 131.895.085.272,00	46,44
JUMLAH		Rp 51.657.699.213.621,00	Rp 44.318.189.705.718,00	Rp 7.339.509.507.903,00	16,56

Belanja
Kementerian
Agama menurut
Sumber Dana
Pinjaman Luar
Negeri
Rp233.510.406.6
20,00

Realisasi belanja menurut sumber dana pinjaman luar negeri pada TA 2015 sebesar Rp233.510.406.620,00 atau 62,16 persen dari anggarannya sebesar Rp 375.680.554.000,00.

Perbandingan realisasi belanja menurut Sumber Dana Pinjaman Luar Negeri TA 2015 dan TA 2014 Per Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Belanja menurut Sumber Dana Pinjaman Luar Negeri
Per Eselon I TA 2015 dan 2014

Kode Eselon I	Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
01	Sekretariat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -	-
02	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -	-
03	Ditjen Bimas Islam	Rp -	Rp -	Rp -	-
04	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 233.510.406.620,00	Rp 133.194.543.784,00	Rp 100.315.862.836,00	75,32
05	Ditjen Bimas Kristen	Rp -	Rp -	Rp -	-
06	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -	Rp -	-
07	Ditjen Bimas Hindu	Rp -	Rp -	Rp -	-
08	Ditjen Bimas Buddha	Rp -	Rp -	Rp -	-
09	Ditjen Peny. Haji dan Umrah	Rp -	Rp -	Rp -	-
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -	Rp -	-
JUMLAH		Rp 233.510.406.620,00	Rp 133.194.543.784,00	Rp 100.315.862.836,00	75,32

*Belanja
Kementerian
Agama menurut
Sumber Dana
Rupiah Murni
Pendamping
Rp75.060.535.728,00*

Realisasi belanja menurut sumber dana Rupiah Murni Pendamping pada TA 2015 sebesar Rp75.060.535.728,00 atau 83,40 persen dari anggarannya sebesar Rp90.000.000.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp(226.086.030,00).

Perbandingan realisasi belanja menurut Sumber Dana Rupiah Murni Pendamping TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

*Tabel 24
Perbandingan Realisasi Belanja menurut Sumber Dana Rupiah Murni Pendamping Per Eselon I TA 2015 dan TA 2014*

Kode Eselon I	Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
01	Sekretariat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -	-
02	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -	-
03	Ditjen Bimas Islam	Rp -	Rp -	Rp -	-
04	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 75.060.535.728,00	Rp 69.953.533.604,00	Rp 5.107.002.124,00	7,30
05	Ditjen Bimas Kristen	Rp -	Rp -	Rp -	-
06	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -	Rp -	-
07	Ditjen Bimas Hindu	Rp -	Rp -	Rp -	-
08	Ditjen Bimas Buddha	Rp -	Rp -	Rp -	-
09	Ditjen Peny. Haji dan Umrah	Rp -	Rp -	Rp -	-
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -	Rp -	-
JUMLAH		Rp 75.060.535.728,00	Rp 69.953.533.604,00	Rp 5.107.002.124,00	7,30

*Belanja
Kementerian
Agama menurut
Sumber Dana
PNBP
Rp704.192.064.465,00*

Realisasi belanja menurut sumber dana PNBPN pada TA 2015 sebesar Rp704.192.064.465,00 atau 53,97 persen dari anggarannya sebesar Rp1.304.670.759.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp(184.362.000,00).

Perbandingan realisasi belanja menurut Sumber Dana PNBPN TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 25

*Perbandingan Realisasi Belanja menurut Sumber Dana PNBPN
Per Unit Eselon I TA 2015 dan TA 2014*

Kode Eselon I	Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
01	Sekretariat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -	-
02	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -	-
03	Ditjen Bimas Islam	Rp 439.767.121.581,00	Rp 112.766.183.491,00	Rp 327.000.938.090,00	289,98
04	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 250.621.167.011,00	Rp 229.183.015.756,00	Rp 21.438.151.255,00	9,35
05	Ditjen Bimas Kristen	Rp 9.206.096.750,00	Rp 13.409.589.391,00	Rp (4.203.492.641,00)	(31,35)
06	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -	Rp -	-
07	Ditjen Bimas Hindu	Rp 4.241.852.123,00	Rp 6.942.093.264,00	Rp (2.700.241.141,00)	(38,90)
08	Ditjen Bimas Buddha	Rp 356.124.000,00	Rp 326.791.050,00	Rp 29.332.950,00	8,98
09	Ditjen Peny. Haji dan Umrah	Rp (297.000,00)	Rp -	Rp (297.000,00)	-
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -	Rp -	-
JUMLAH		Rp 704.192.064.465,00	Rp 362.627.672.952,00	Rp 341.564.391.513,00	94,19

*Belanja
Kementerian
Agama menurut
Sumber Dana BLU
sebesar
Rp609.107.782.0
67,00*

Realisasi belanja menurut sumber dana Badan Layanan Umum pada TA 2015 sebesar Rp609.107.782.067,00 atau 80,04 persen dari anggarannya sebesar Rp760.965.478.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp(636.025,00)

Perbandingan realisasi belanja menurut Sumber Dana Badan Layanan Umum TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 26

*Perbandingan Realisasi Belanja menurut Sumber Dana BLU
Per Unit Eselon I TA 2015 dan TA 2014*

Kode Eselon I	Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
01	Sekretariat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -	-
02	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -	-
03	Ditjen Bimas Islam	Rp -	Rp -	Rp -	-
04	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 609.107.782.067,00	Rp 534.984.408.850,00	Rp 74.123.373.217,00	13,86
05	Ditjen Bimas Kristen	Rp -	Rp -	Rp -	-
06	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -	Rp -	-
07	Ditjen Bimas Hindu	Rp -	Rp -	Rp -	-
08	Ditjen Bimas Buddha	Rp -	Rp -	Rp -	-
09	Ditjen Peny. Haji dan Umrah	Rp -	Rp -	Rp -	-
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -	Rp -	-
JUMLAH		Rp 609.107.782.067,00	Rp 534.984.408.850,00	Rp 74.123.373.217,00	13,86

*Belanja
Kementerian
Agama menurut
HLDN sebesar
Rp43.373.279.845,00*

Realisasi belanja menurut sumber dana Hibah Langsung Dalam Negeri pada TA 2015 sebesar Rp43.373.279.845,00 atau 97,29 persen dari anggarannya sebesar Rp44.583.027.000,00.

Perbandingan realisasi belanja menurut Sumber Dana Hibah Langsung Dalam Negeri TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

*Tabel 27
Perbandingan Realisasi Belanja menurut Sumber Dana
Hibah Langsung Dalam Negeri Per Unit Eselon I TA 2015 dan 2014*

Kode Eselon I	Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
01	Sekretariat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -	-
02	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -	-
03	Ditjen Bimas Islam	Rp -	Rp -	Rp -	-
04	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 42.773.279.845,00	Rp 43.891.636.800,00	Rp (1.118.356.955,00)	(2,55)
05	Ditjen Bimas Kristen	Rp -	Rp -	Rp -	-
06	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -	Rp -	-
07	Ditjen Bimas Hindu	Rp -	Rp -	Rp -	-
08	Ditjen Bimas Buddha	Rp -	Rp -	Rp -	-
09	Ditjen Peny. Haji dan Umrah	Rp 600.000.000,00	Rp -	Rp 600.000.000,00	-
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -	Rp -	-
JUMLAH		Rp 43.373.279.845,00	Rp 43.891.636.800,00	Rp (518.356.955,00)	(1,18)

*Belanja
Kementerian
Agama menurut
Sumber Dana
SBSN sebesar
Rp503.625.640.354,00*

Realisasi belanja menurut sumber dana Surat Berharga Syariah Negara pada TA 2015 sebesar Rp503.625.640.354,00 atau 73,79 persen dari anggarannya sebesar Rp682.469.583.000,00.

Perbandingan realisasi belanja menurut Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 28

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Surat Berharga Syariah Negara Per Unit Eselon I TA 2015 dan 2014

Kode Eselon I	Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Rp	%
01	Sekretariat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
02	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
03	Ditjen Bimas Islam	Rp 11.304.863.875,00	Rp -	Rp 11.304.863.875,00	Rp -
04	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 274.776.997.653,00	Rp -	Rp 274.776.997.653,00	Rp -
05	Ditjen Bimas Kristen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
06	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
07	Ditjen Bimas Hindu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
08	Ditjen Bimas Buddha	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
09	Ditjen Peny. Haji dan Umrah	Rp 217.543.778.826,00	Rp 195.994.351.094,00	Rp 21.549.427.732,00	Rp 10,99
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp 503.625.640.354,00	Rp 195.994.351.094,00	Rp 307.631.289.260,00	Rp 156,96

Realisasi belanja menurut sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada TA 2015 sebesar Rp503.625.640.354,00 atau 73,79 persen dari anggarannya sebesar Rp682.469.583.000,00.

*Belanja
Kementerian
Agama menurut
Jenis Belanja*

B.2.4. Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Kementerian Agama dapat dikelompokkan menurut jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.

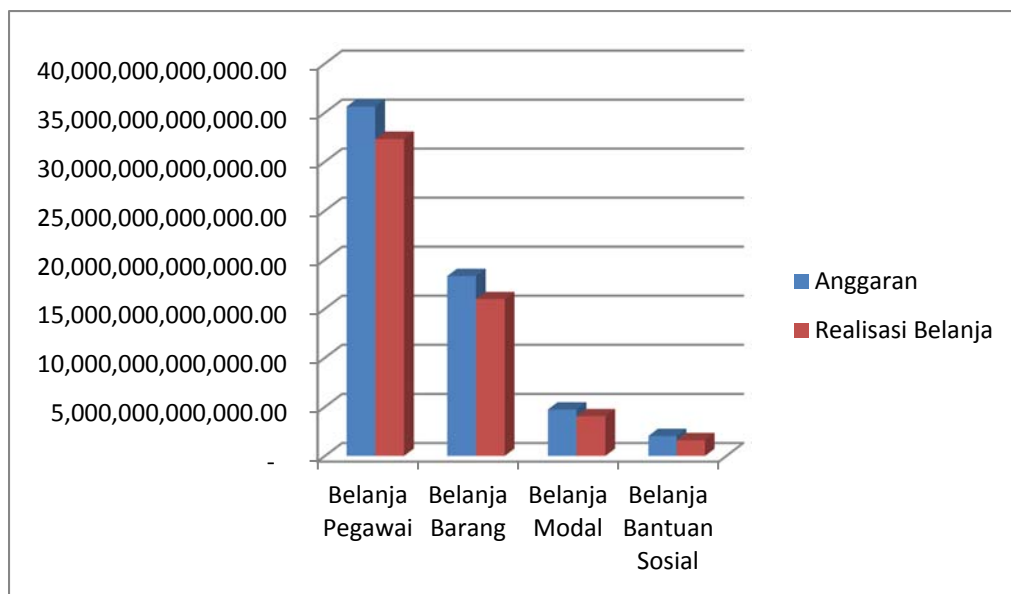
Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 menurut jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 29

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	2015		Realisasi (%)
		Anggaran	Realisasi	
51	Belanja Pegawai	Rp 35.613.250.275.000,00	Rp 32.307.844.307.580,00	90,72
52	Belanja Barang	Rp 18.331.024.663.000,00	Rp 15.972.120.532.556,00	87,13
53	Belanja Modal	Rp 4.727.801.931.000,00	Rp 4.036.206.098.012,00	85,37
57	Belanja Bantuan Sosial	Rp 2.032.833.299.000,00	Rp 1.598.398.877.215,00	78,63
	Jumlah Belanja Bruto	Rp 60.704.910.168.000,00	Rp 53.914.569.815.363,00	88,81
	Pengembalian Belanja	Rp -	Rp (88.000.892.663,00)	-
	JUMLAH	Rp 60.704.910.168.000,00	Rp 53.826.568.922.700,00	88,67

Komposisi anggaran dan realisasi belanja menurut jenis belanja adalah sebagai berikut ini:



Realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp8.167.733.069.898,00 atau 17,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain oleh naiknya belanja pegawai antara lain berupa belanja gaji pokok dan tunjangan seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai.

Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 30

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan TA 2014

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
		TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
51	Belanja Pegawai	Rp 32.270.917.657.206,00	Rp 25.814.875.037.765,00	Rp 6.456.042.619.441,00	25,01
52	Belanja Barang	Rp 15.930.199.356.610,00	Rp 6.868.581.538.515,00	Rp 9.061.617.818.095,00	131,93
53	Belanja Modal	Rp 4.035.683.467.597,00	Rp 2.110.878.780.273,00	Rp 1.924.804.687.324,00	91,18
57	Belanja Bantuan Sosial	Rp 1.589.768.441.287,00	Rp 10.864.500.496.249,00	Rp (9.274.732.054.962,00)	(85,37)
JUMLAH		Rp 53.826.568.922.700,00	Rp 45.658.835.852.802,00	Rp 8.167.733.069.898,00	17,89

*Belanja Pegawai
Kementerian
Agama sebesar
Rp32.270.917.657.206,00*

B.2.4.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp32.270.917.657.206,00 dan Rp25.814.875.037.765,00 atau terjadi kenaikan sebesar (25,01) persen dari TA yang lalu.

Perbandingan realisasi belanja pegawai TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 31

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan TA 2014

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 25.173.030.435.405,00	Rp 24.364.490.021.503,00	Rp 808.540.413.902,00	3,32
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	Rp -	Rp 10.995.900,00	Rp (10.995.900,00)	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	Rp -	Rp 7.560.000,00	Rp (7.560.000,00)	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	Rp 4.781.351.763.351,00	Rp 50.394.565.200,00	Rp 4.730.957.198.151,00	9.387,83
Belanja Honorarium	Rp 175.641.090.522,00	Rp 190.485.183.502,00	Rp (14.844.092.980,00)	(7,79)
Belanja Lembur	Rp 60.941.646.797,00	Rp 51.788.092.499,00	Rp 9.153.554.298,00	17,68
Belanja Vakasi	Rp 13.535.500,00	Rp 249.711.323.044,00	Rp (249.697.787.544,00)	(99,99)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	Rp 2.116.865.836.005,00	Rp 931.452.616.346,00	Rp 1.185.413.219.659,00	127,27
Jumlah Belanja Kotor	Rp 32.307.844.307.580,00	Rp 25.838.340.357.994,00	Rp 6.469.503.949.586,00	25,04
Pengembalian Belanja	Rp (36.926.650.374,00)	Rp (23.465.320.229,00)	Rp (13.461.330.145,00)	57,37
Jumlah Belanja	Rp 32.270.917.657.206,00	Rp 25.814.875.037.765,00	Rp 6.456.042.619.441,00	25,01

*Belanja Barang
Rp15.930.199.356.610,00*

B.2.4.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp15.930.199.356.610,00 dan Rp6.868.581.538.515,00 Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.061.617.818.095,00 atau 131,93 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2014.

Perbandingan realisasi belanja barang TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 32

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
Belanja Barang Operasional	Rp 1.179.691.260.718,00	Rp 967.862.271.297,00	Rp 211.828.989.421,00	21,89
Belanja Barang Non Operasional	Rp 9.945.150.256.683,00	Rp 2.292.097.746.422,00	Rp 7.653.052.510.261,00	333,89
Belanja Barang Persediaan	Rp 142.449.312.174,00		Rp 142.449.312.174,00	-
Belanja Jasa	Rp 1.035.288.608.766,00	Rp 580.490.767.339,00	Rp 454.797.841.427,00	78,35
Belanja Pemeliharaan	Rp 598.444.591.513,00	Rp 409.428.966.703,00	Rp 189.015.624.810,00	46,17
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 1.502.019.210.842,00	Rp 1.901.221.978.711,00	Rp (399.202.767.869,00)	(21,00)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp 116.224.854.094,00	Rp 135.985.873.777,00	Rp (19.761.019.683,00)	(14,53)
Belanja Barang BLU	Rp 529.805.852.621,00	Rp 464.932.139.119,00	Rp 64.873.713.502,00	13,95
Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Rp 508.621.802.495,00	Rp 29.089.288.203,00	Rp 479.532.514.292,00	1.648,48
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Rp 414.424.782.650,00	Rp 127.440.082.933,00	Rp 286.984.699.717,00	225,19
Jumlah Belanja Kotor	Rp 15.972.120.532.556,00	Rp 6.908.549.114.504,00	Rp 9.063.571.418.052,00	131,19
Pengembalian Belanja	Rp (41.921.175.946,00)	Rp (39.967.575.989,00)	Rp (1.953.599.957,00)	4,89
Jumlah Belanja	Rp 15.930.199.356.610,00	Rp 6.868.581.538.515,00	Rp 9.061.617.818.095,00	131,93

B.2.4.2. Belanja Modal

Belanja Modal
Rp4.035.683.467.
597,00

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp4.035.683.467.597,00 dan Rp2.110.878.780.273,00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp1.924.804.687.324,00 atau 91,18 persen dibandingkan TA 2014.

Perbandingan realisasi belanja modal TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 33

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
Belanja Modal Tanah	Rp 229.416.261.775,00	Rp 73.650.204.597,00	Rp 155.766.057.178,00	211,49
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 973.781.409.069,00	Rp 563.225.802.343,00	Rp 410.555.606.726,00	72,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 2.572.772.928.537,00	Rp 1.224.157.646.373,00	Rp 1.348.615.282.164,00	110,17
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 24.431.753.559,00	Rp 13.906.766.259,00	Rp 10.524.987.300,00	75,68
Belanja Modal Lainnya	Rp 156.501.815.626,00	Rp 166.677.254.468,00	Rp (10.175.438.842,00)	(6,10)
Belanja Modal BLU	Rp 79.301.929.446,00	Rp 70.058.605.756,00	Rp 9.243.323.690,00	13,19
Jumlah Belanja Kotor	Rp 4.036.206.098.012,00	Rp 2.111.676.279.796,00	Rp 1.924.529.818.216,00	91,14
Pengembalian Belanja	Rp (522.630.415,00)	Rp (797.499.523,00)	Rp (274.869.108,00)	34,47
Jumlah Belanja	Rp 4.035.683.467.597,00	Rp 2.110.878.780.273,00	Rp 1.924.804.687.324,00	91,18

B.2.4.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp229.416.261.775,00 dan Rp73.650.094.597,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 34

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2015 dan 2014

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
Belanja Modal Tanah	Rp 203.765.723.395,00	Rp 38.010.998.297,00	Rp 165.754.725.098,00	436,07
Belanja Modal Pembebasan Tanah	Rp 2.171.417.770,00	Rp 2.079.149.750,00	Rp 92.268.020,00	4,44
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	Rp 817.637.520,00	Rp 356.300.000,00	Rp 461.337.520,00	129,48
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	Rp 1.247.827.990,00	Rp 964.926.450,00	Rp 282.901.540,00	29,32
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	Rp 20.825.227.300,00	Rp 31.640.626.200,00	Rp (10.815.398.900,00)	(34,18)
Belanja Modal Pengukuran Tanah	Rp 128.861.600,00	Rp 528.690.500,00	Rp (399.828.900,00)	(75,63)
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	Rp 459.566.200,00	Rp 69.513.400,00	Rp 390.052.800,00	561,12
Jumlah Belanja Kotor	Rp 229.416.261.775,00	Rp 73.650.204.597,00	Rp 155.766.057.178,00	211,49
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp (110.000,00)	Rp 110.000,00	(100,00)
Jumlah Belanja	Rp 229.416.261.775,00	Rp 73.650.094.597,00	Rp 155.766.167.178,00	211,49

B.2.4.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp973.672.027.905,00 dan Rp563.192.507.012,00. Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp410.479.520.893,00 atau 11,21 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 35

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2015 dan 2014

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 964.735.113.104,00	Rp 559.825.314.767,00	Rp 404.909.798.337,00	72,33
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	Rp 303.637.500,00	Rp 49.177.226,00	Rp 254.460.274,00	517,44
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan	Rp 127.195.580,00	Rp 1.091.920.000,00	Rp (964.724.420,00)	(88,35)
Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	Rp 28.000.000,00	Rp 68.538.000,00	Rp (40.538.000,00)	(59,15)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan M	Rp 855.835.700,00	Rp 19.844.000,00	Rp 835.991.700,00	4.212,82
Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin	Rp 167.095.000,00	Rp -	Rp 167.095.000,00	-
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	Rp 582.318.220,00	Rp 9.300.000,00	Rp 573.018.220,00	6.161,49
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	Rp 35.669.000,00	Rp 203.059.500,00	Rp (167.390.500,00)	(82,43)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp 6.946.544.965,00	Rp 1.958.648.850,00	Rp 4.987.896.115,00	254,66
Jumlah Belanja Kotor	Rp 973.781.409.069,00	Rp 563.225.802.343,00	Rp 410.555.606.726,00	72,89
Pengembalian Belanja	Rp (109.381.164,00)	Rp (33.295.331,00)	Rp (76.085.833,00)	228,52
Jumlah Belanja	Rp 973.672.027.905,00	Rp 563.192.507.012,00	Rp 410.479.520.893,00	72,88

B.2.4.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.572.455.532.058,00 dan Rp1.224.095.791.297,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp1.348.359.740.761,00 atau 110,15 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2014. Perbandingan Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 36

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2015 dan 2014

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 2.213.235.477.599,00	Rp 970.868.087.256,00	Rp 1.242.367.390.343,00	127,96
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	Rp 427.239.000,00	Rp 143.228.750,00	Rp 284.010.250,00	198,29
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	Rp 6.621.749.486,00	Rp 2.687.904.650,00	Rp 3.933.844.836,00	146,35
Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan	Rp 4.200.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp (25.800.000,00)	(86,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	Rp 28.958.499.935,00	Rp 7.369.359.075,00	Rp 21.589.140.860,00	292,96
Belanja Modal Perijinan Gedung dan Bangunan	Rp 775.065.000,00	Rp 196.498.000,00	Rp 578.567.000,00	294,44
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp 5.236.000,00	Rp (5.236.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	Rp 289.487.400,00	Rp 107.133.100,00	Rp 182.354.300,00	170,21
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp 322.461.210.117,00	Rp 242.750.199.542,00	Rp 79.711.010.575,00	32,84
Jumlah Belanja Kotor	Rp 2.572.772.928.537,00	Rp 1.224.157.646.373,00	Rp 1.348.615.282.164,00	110,17
Pengembalian Belanja	Rp (317.396.479,00)	Rp (61.855.076,00)	Rp (255.541.403,00)	413,13
Jumlah Belanja	Rp 2.572.455.532.058,00	Rp 1.224.095.791.297,00	Rp 1.348.359.740.761,00	110,15

B.2.4.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp24.431.753.559,00 dan Rp13.906.766.259,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp10.524.987.300,00 atau 75,68 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2014.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 37

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2015 dan 2014

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp 14.730.887.927,00	Rp 4.254.932.660,00	Rp 10.475.955.267,00	246,21
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	Rp 20.160.000,00	Rp 5.040.000,00	Rp 15.120.000,00	300,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	Rp 343.765.000,00	Rp 177.020.000,00	Rp 166.745.000,00	94,20
Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	Rp 29.680.817,00	Rp 14.960.000,00	Rp 14.720.817,00	98,40
Belanja Modal Irigasi	Rp 1.311.528.300,00	Rp 4.979.336.000,00	Rp (3.667.807.700,00)	(73,66)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	Rp 6.880.000,00	Rp 157.605.750,00	Rp (150.725.750,00)	(95,63)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	Rp 80.975.000,00	Rp 371.840.000,00	Rp (290.865.000,00)	(78,22)
Belanja Modal Perjalanan Irigasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
Belanja Modal Jaringan	Rp 5.587.455.715,00	Rp 3.373.544.549,00	Rp 2.213.911.166,00	65,63
Belanja Modal Bahan Baku Jaringan	Rp -	Rp 198.100.000,00	Rp (198.100.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	Rp -	Rp 20.400.000,00	Rp (20.400.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	Rp 10.465.400,00	Rp -	Rp 10.465.400,00	-
Belanja Modal Perijinan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	Rp 534.200.000,00	Rp -	Rp 534.200.000,00	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Jaringan	Rp 1.775.755.400,00	Rp 353.987.300,00	Rp 1.421.768.100,00	401,64
Jumlah Belanja Kotor	Rp 24.431.753.559,00	Rp 13.906.766.259,00	Rp 10.524.987.300,00	75,68
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Jumlah Belanja	Rp 24.431.753.559,00	Rp 13.906.766.259,00	Rp 10.524.987.300,00	75,68

B.2.4.3.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp156.405.962.854,00 dan Rp165.975.015.352,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015

mengalami penurunan sebesar Rp(9.569.052.498,00) atau (5,77) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2014. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 38

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 dan 2014

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
Belanja Modal Lainnya	Rp 155.044.234.326,00	Rp 166.190.437.468,00	Rp (11.146.203.142,00)	(6,71)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	Rp 1.457.581.300,00	Rp 486.817.000,00	Rp 970.764.300,00	199,41
Jumlah Belanja Kotor	Rp 156.501.815.626,00	Rp 166.677.254.468,00	Rp (10.175.438.842,00)	(6,10)
Pengembalian Belanja	Rp (95.852.772,00)	Rp (702.239.116,00)	Rp 606.386.344,00	(86,35)
Jumlah Belanja	Rp 156.405.962.854,00	Rp 165.975.015.352,00	Rp (9.569.052.498,00)	(5,77)

B.2.4.3.5. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp79.301.929.446,00 dan Rp70.058.605.756,00. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp9.243.323.690,00 atau 13,19 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2014. Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 39

Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2015 dan 2014

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
Belanja Modal Tanah- BLU	Rp 4.146.147.000,00	Rp 5.663.342.125,00	Rp (1.517.195.125,00)	(26,79)
Belanja Modal PM - BLU	Rp 47.800.842.776,00	Rp 49.604.736.691,00	Rp (1.803.893.915,00)	(3,64)
Belanja Modal GB- BLU	Rp 23.197.996.910,00	Rp 7.675.408.261,00	Rp 15.522.588.649,00	202,24
Belanja Modal JIJ- BLU	Rp 232.902.400,00	Rp 2.244.184.675,00	Rp (2.011.282.275,00)	(89,62)
Belanja Modal Lainnya- BLU	Rp 3.924.040.360,00	Rp 4.870.934.004,00	Rp (946.893.644,00)	(19,44)
Jumlah Belanja Kotor	Rp 79.301.929.446,00	Rp 70.058.605.756,00	Rp 9.243.323.690,00	13,19
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja	Rp 79.301.929.446,00	Rp 70.058.605.756,00	Rp 9.243.323.690,00	13,19

Belanja Bantuan Sosial
Rp1.589.768.441.287,00

B.2.4.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.589.768.441.287,00 dan Rp10.864.500.496.249,00. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 40

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 dan 2014

Uraian	Realisasi Belanja		Naik (Turun)	
	TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	Rp -	Rp 15.248.050.000,00	Rp (15.248.050.000,00)	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	Rp 95.401.247.500,00	Rp 4.296.013.470.558,00	Rp (4.200.612.223.058,00)	(97,78)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	Rp 85.251.751.100,00	Rp 5.188.106.466.722,00	Rp (5.102.854.715.622,00)	(98,36)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	Rp 1.203.773.912.670,00	Rp 128.924.232.000,00	Rp 1.074.849.680.670,00	833,71
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	Rp 212.586.765.945,00	Rp 1.245.789.542.500,00	Rp (1.033.202.776.555,00)	(82,94)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	Rp 1.385.200.000,00	Rp 940.000.000,00	Rp 445.200.000,00	47,36
Jumlah Belanja Kotor	Rp 1.598.398.877.215,00	Rp 10.875.021.761.780,00	Rp (9.276.622.884.565,00)	(85,30)
Pengembalian Belanja	Rp (8.630.435.928,00)	Rp (10.521.265.531,00)	Rp 1.890.829.603,00	(17,97)
Jumlah Belanja	Rp 1.589.768.441.287,00	Rp 10.864.500.496.249,00	Rp (9.274.732.054.962,00)	(85,37)



CALK NERACA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NERACA

Aset Lancar
Rp853.580.016.549,00

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp853.580.016.549,00 dan Rp686.455.327.325,00

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian saldo Aset Lancar pada Kementerian Agama per 31 Desember 2015 dan 2014 tersaji pada Tabel 41

Tabel 41
Rincian Aset Lancar

NO	ASET LANCAR	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 12.466.714.369,00	Rp 4.303.320.797,00	Rp 8.163.393.572,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 4.689.631.678,00	Rp 8.779.981.129,00	Rp (4.090.349.451,00)
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp 27.119.291.379,00	Rp 81.195.567.274,00	Rp (54.076.275.895,00)
4	Kas Pada BLU	Rp 620.506.163.294,00	Rp 422.188.881.629,00	Rp 198.317.281.665,00
5	Investasi Jangka Pendek-BLU	Rp 22.000.000.000,00	Rp 30.886.000.000,00	Rp (8.886.000.000,00)
6	Belanja dibayar dimuka	Rp 1.935.774.562,00	Rp 79.075.000,00	Rp 1.856.699.562,00
7	Uang Muka Belanja	Rp -	Rp 125.698.016,00	Rp (125.698.016,00)
8	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	Rp 11.368.913.052,00	Rp -	Rp 11.368.913.052,00
9	Piutang Bukan Pajak	Rp 27.321.686.073,00	Rp 44.578.978.332,00	Rp (17.257.292.259,00)
10	Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU	Rp 22.844.460.027,00	Rp 19.789.499.395,00	Rp 3.054.960.632,00
11	Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU	Rp 5.465.610.192,00	Rp 6.619.778.199,00	Rp (1.154.168.007,00)
12	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	Rp (1.433.713.723,00)	Rp (586.562.848,00)	Rp (847.150.875,00)
13	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	Rp (1.407.195.110,00)	Rp (167.015.663,00)	Rp (1.240.179.447,00)
14	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	Rp (459.858.064,00)	Rp (438.344.703,00)	Rp (21.513.361,00)
15	Persediaan	Rp 92.213.683.492,00	Rp 59.664.688.425,00	Rp 32.548.995.067,00
16	Persediaan BLU	Rp 8.948.855.328,00	Rp 9.435.782.343,00	Rp (486.927.015,00)
	JUMLAH	Rp 853.580.016.549,00	Rp 686.455.327.325,00	Rp 167.124.689.224,00

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp12.466.714.369,00

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp12.466.714.369,00 dan Rp4.303.320.797,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Perdirjen Perbendaharaan No.37 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun 2015 bahwa sisa dana UP tahun anggaran 2015

yang masih berada pada kas bendahara (baik tunai maupun yang masih ada dalam rekening bank/pos) oleh Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan harus disetorkan kembali ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi pada Wilayah kerja KPPN Pembuku/mitra kerja KPPN pembayar dengan menggunakan SSBP, paling lambat tanggal 30 Desember 2015. Namun masih ada bendahara pengeluaran di beberapa satuan kerja yang belum disiplin dalam hal penyetoran sisa UP/TUP pada tanggal 31 Desember 2015.

Dari nilai nominal pada kas di bendahara pengeluaran telah di GU nihilkan dan sisanya telah disetorkan kembali ke kas negara dan di catat sebagai pengembalian UP tahun lalu pada tahun 2015 dan dicatat sebagai pengembalian UP 815114 (penerimaan pengembalian UP TYL).

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Unit Eselon 1

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp 1.826.292.244,00	Rp 464.318.886,00	Rp 1.361.973.358,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 2.120.848.350,00	Rp 550.487.173,00	Rp 1.570.361.177,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 7.178.535.620,00	Rp 3.106.098.034,00	Rp 4.072.437.586,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 510.649.732,00	Rp 37.653.000,00	Rp 472.996.732,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp 78.752.880,00	Rp 29.487.872,00	Rp 49.265.008,00
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 170.419.350,00	Rp 207.445,00	Rp 170.211.905,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 102.420.686,00	Rp 400.000,00	Rp 102.020.686,00
9	Ditjen PHU	Rp 85.686.900,00	Rp 114.668.387,00	Rp (28.981.487,00)
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp 393.108.607,00	Rp -	Rp 393.108.607,00
JUMLAH		Rp 12.466.714.369,00	Rp 4.303.320.797,00	Rp 8.163.393.572,00

Kas di Bendahara Penerimaan Rp4.689.631.678,00

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp4.689.631.678,00 dan Rp8.779.981.129,00 yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Pemahaman para pengelola keuangan pada satker di lingkungan Kementerian Agama semakin baik. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dimana disebutkan seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung ke kas negara.

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 43

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Unit Eselon 1

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Ditjen Bimas Islam	Rp 3.006.784.880,00	Rp 8.112.145.398,00	Rp (5.105.360.518,00)
2	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 1.420.846.798,00	Rp 400.175.731,00	Rp 1.020.671.067,00
3	Ditjen Bimas Kristen	Rp 262.000.000,00	Rp 267.660.000,00	Rp (5.660.000,00)
JUMLAH		Rp 4.689.631.678,00	Rp 8.779.981.129,00	Rp (4.090.349.451,00)

Kas pada Badan Layanan Umum Rp620.506.163.294,00

C.1.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp620.506.163.294,00 dan Rp422.188.881.629,00 yang merupakan saldo kas pada satuan kerja BLU yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Rincian saldo Kas pada Badan Layanan Umum per Satker BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum Per Satker BLU

NO	URAIAN SATKER BLU	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Alaudin Makasar	Rp 48.435.394.040,00	Rp 29.101.518.765,00	Rp 19.333.875.275,00
2	IAIN Mataram	Rp 11.648.177.299,00	Rp 11.885.784.627,00	Rp (237.607.328,00)
3	UIN Syarif Hidayatullah	Rp 165.420.708.833,00	Rp 127.802.178.903,00	Rp 37.618.529.930,00
4	UIN Sunan Gunung Jati Bandung	Rp 19.432.939.872,00	Rp 12.070.171.749,00	Rp 7.362.768.123,00
5	IAIN SMH Banten	Rp 20.925.693.459,00	Rp 18.006.552.393,00	Rp 2.919.141.066,00
6	IAIN Walisongo Semarang	Rp 20.325.337.986,00	Rp 13.725.811.298,00	Rp 6.599.526.688,00
7	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rp 61.216.622.855,00	Rp 46.328.191.565,00	Rp 14.888.431.290,00
8	IAIN Sunan Ampel	Rp 48.417.409.430,00	Rp 31.196.449.757,00	Rp 17.220.959.673,00
9	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Rp 63.185.234.692,00	Rp 46.768.133.672,00	Rp 16.417.101.020,00
10	IAIN Ar-Raniry Aceh	Rp 25.329.347.483,00	Rp 12.360.638.031,00	Rp 12.968.709.452,00
11	IAIN Sumatera Utara Medan	Rp 28.588.532.662,00	Rp 16.677.817.087,00	Rp 11.910.715.575,00
12	IAIN Imam Bonjol Padang	Rp 3.637.664.598,00	Rp -	Rp 3.637.664.598,00
13	UIN Sulthan Syarif Kasim Riau	Rp 46.567.406.972,00	Rp 37.647.299.713,00	Rp 8.920.107.259,00
14	IAIN Sulthan Thaha Jambi	Rp 2.154.403.316,00	Rp 1.303.124.847,00	Rp 851.278.469,00
15	IAIN Raden Fatah Palembang	Rp 13.692.804.322,00	Rp 10.848.949.356,00	Rp 2.843.854.966,00
16	IAIN Raden Intan Lampung	Rp 41.528.485.475,00	Rp 6.466.259.866,00	Rp 35.062.225.609,00
JUMLAH		Rp 620.506.163.294,00	Rp 422.188.881.629,00	Rp 198.317.281.665,00

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp27.119.291.379,00

C.1.4 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp27.119.291.379,00 dan Rp81.195.567.274,00 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian saldo Kas lainnya dan setara kas per Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Unit Eselon I

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp 675.984.300,00	Rp 795.086.276,00	Rp (119.101.976,00)
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 1.917.485.257,00	Rp 249.115.350,00	Rp 1.668.369.907,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 23.724.943.812,00	Rp 78.641.369.360,00	Rp (54.916.425.548,00)
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 211.014.359,00	Rp 720.742.242,00	Rp (509.727.883,00)
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp 150.791.986,00	Rp 615.399.021,00	Rp (464.607.035,00)
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 73.954.066,00	Rp 45.100.540,00	Rp 28.853.526,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 14.585.725,00	Rp 4.011.716,00	Rp 10.574.009,00
9	Ditjen PHU	Rp 217.340.146,00	Rp 39.809.792,00	Rp 177.530.354,00
10	Badan Litbang dan Dikla	Rp 133.191.728,00	Rp 84.932.977,00	Rp 48.258.751,00
JUMLAH		Rp 27.119.291.379,00	Rp 81.195.567.274,00	Rp (54.076.275.895,00)

Investasi

Jangka

Pendek BLU

Rp22.000.000.000,00

C.1.5 Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek BLU per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp22.000.000.000,00 dan Rp30.886.000.000,00. Nilai investasi jangka pendek BLU per tanggal 31 Desember 2015 merupakan saldo investasi jangka pendek BLU pada satker BLU UIN Alauddin Makassar dan IAIN Raden Fatah Palembang yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam dalam bentuk deposito dengan jangka waktu sebanyak 6 bulan dan dilakukan perpanjangan otomatis

Rincian saldo Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per Satker BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Perbandingan Rincian Investasi Jangka Pendek BLU
TA 2015 dan 2014

NO	URAIAN SATKER BLU	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014
1	UIN Alauddin Makassar	Rp 5.000.000.000,00	Rp 5.000.000.000,00
2	IAIN Raden Fatah Palembang	Rp 17.000.000.000,00	Rp 7.000.000.000,00
3	IAIN Raden Intan Lampung	Rp -	Rp 18.886.000.000,00
JUMLAH		Rp 22.000.000.000,00	Rp 30.886.000.000,00

Piutang Bukan Pajak **C.1.6 Piutang Bukan Pajak**

Rp27.321.686.073,00

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp27.321.686.073,00 dan Rp44.578.978.332,00 yang merupakan semua hak atau klaim Kementerian Agama atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Piutang Bukan Pajak per Unit Eselon 1

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp 19.363.200,00	Rp 22.549.080,00	Rp (3.185.880,00)
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 7.101.900,00	Rp -	Rp 7.101.900,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 24.652.938,00	Rp 9.069.615.577,00	Rp (9.044.962.639,00)
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 1.249.177.230,00	Rp 401.200.000,00	Rp 847.977.230,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -	Rp -
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 2.330.350.000,00	Rp 1.405.450.000,00	Rp 924.900.000,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 428.650.000,00	Rp 432.350.000,00	Rp (3.700.000,00)
9	Ditjen PHU	Rp 23.262.390.805,00	Rp 33.247.813.675,00	Rp (9.985.422.870,00)
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp 27.321.686.073,00	Rp 44.578.978.332,00	Rp (17.257.292.259,00)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan

C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar

Pajak Rp(1.433.713.723,00) dan Rp(586.562.848,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang bukan pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang pada Unit Eselon I.

Rp(1.433.713.723,00)

Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

*Tabel 48
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak
per Unit Eselon 1*

No	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp -	Rp -	Rp -
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp (410.585.723,00)	Rp (79.336.098,00)	Rp (331.249.625,00)
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp (1.021.000,00)	Rp (1.531.000,00)	Rp 510.000,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -	Rp -
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp (854.582.000,00)	Rp (316.227.750,00)	Rp (538.354.250,00)
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp (167.525.000,00)	Rp (189.468.000,00)	Rp 21.943.000,00
9	Ditjen PHU	Rp -	Rp -	Rp -
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp (1.433.713.723,00)	Rp (586.562.848,00)	Rp (847.150.875,00)

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Rp22.844.460.027,00

C.1.8 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari kegiatan operasional BLU per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp22.844.460.027,00 dan Rp19.789.499.395,00. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2015 Kementerian Agama merupakan saldo yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam.

Rincian saldo Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per Satker BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 49
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker BLU

NO	URAIAN SATKER BLU	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	IAIN Mataram	Rp 627,00	Rp 3.173.395,00	Rp (3.172.768,00)
2	UIN Syarif Hidayatullah	Rp 5.438.207.000,00	Rp 3.448.160.000,00	Rp 1.990.047.000,00
3	UIN Sunan Gunung Jati Bandung	Rp 7.354.884.000,00	Rp 4.440.148.000,00	Rp 2.914.736.000,00
4	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rp -	Rp 52.643.000,00	Rp (52.643.000,00)
5	UIN Sunan Ampel Surabaya	Rp (3.117.131.600,00)	Rp -	Rp (3.117.131.600,00)
6	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Rp 11.212.500.000,00	Rp 11.191.575.000,00	Rp 20.925.000,00
7	IAIN Sulthan Thaha Jambi	Rp -	Rp 178.200.000,00	Rp (178.200.000,00)
8	IAIN Raden Intan Lampung	Rp 1.956.000.000,00	Rp 475.600.000,00	Rp 1.480.400.000,00
JUMLAH		Rp 22.844.460.027,00	Rp 19.789.499.395,00	Rp 3.054.960.632,00

C.1.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang dari
Kegiatan
Operasional
BLU
Rp(1.407.195.
110,00)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp(1.407.195.110,00) dan Rp(167.015.663,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang dari kegiatan operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2015 Kementerian Agama merupakan saldo pada satker BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan IAIN Raden Intan Bandar Lampung yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 50
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari
Kegiatan Operasional BLU

NO	URAIAN SATKER BLU	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp (603.395.110,00)	Rp (18.675.663,00)	Rp (584.719.447,00)
2	IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Rp -	Rp (17.820.000,00)	Rp 17.820.000,00
3	IAIN Raden Intan Bandar Lampung	Rp (803.800.000,00)	Rp (130.520.000,00)	Rp (673.280.000,00)
JUMLAH		Rp (1.407.195.110,00)	Rp (167.015.663,00)	Rp (1.240.179.447,00)

C.1.10 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari kegiatan non operasional BLU per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp5.465.610.192,00 dan Rp6.619.778.199,00. Saldo Piutang dari kegiatan non operasional BLU per 31 Desember 2015 Kementerian Agama merupakan saldo yang dikonsolidasikan pada Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam. Rincian saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per Satker BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 51
Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Per Satker BLU

NO	URAIAN SATKER BLU	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Alauddin Makassar	Rp 8.438.355,00	Rp 15.423.693,00	Rp (6.985.338,00)
2	IAIN Mataram	Rp -	Rp -	Rp -
3	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Rp 1.340.075.344,00	Rp 2.633.018.629,00	Rp (1.292.943.285,00)
4	UIN Sunan Gunung Jati Bandung	Rp 100.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Rp 20.000.000,00
5	UIN Sunan Ampel Surabaya	Rp 3.117.131.600,00	Rp 3.117.131.600,00	Rp -
6	UIN Sulthan Syarif Kasim Riau	Rp (22.043.451,00)	Rp (17.495.723,00)	Rp (4.547.728,00)
7	IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Rp 831.400.000,00	Rp 770.400.000,00	Rp 61.000.000,00
8	IAIN Raden Intan Bandar Lampung	Rp 90.608.344,00	Rp 21.300.000,00	Rp 69.308.344,00
JUMLAH		Rp 5.465.610.192,00	Rp 6.619.778.199,00	Rp (1.154.168.007,00)

C.1.11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp(459.858.064,00) dan Rp(438.344.703,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang dari kegiatan non operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2015 Kementerian Agama merupakan saldo pada satker BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sultan Thaha Jambi, dan IAIN Raden Intan Bandar Lampung yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per Satker BLU adalah sebagai berikut:

C.1.11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp(459.858.064,00) dan Rp(438.344.703,00) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang dari kegiatan non operasional BLU yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2015 Kementerian Agama merupakan saldo pada satker BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sultan Thaha Jambi, dan IAIN Raden Intan Bandar Lampung yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per Satker BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 52
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Keg. Non
Operasional BLU

NO	URAIAN SATKER BLU	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Syarif Hidayatullah	Rp (362.257.230,00)	Rp (361.304.703,00)	Rp (952.527,00)
2	IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	Rp (83.140.000,00)	Rp -	Rp (83.140.000,00)
3	IAIN Raden Intan Bandar Lampung	Rp (14.460.834,00)	Rp (77.040.000,00)	Rp 62.579.166,00
JUMLAH		Rp (459.858.064,00)	Rp (438.344.703,00)	Rp (21.513.361,00)

Belanja

Dibayar Di

Muka (Prepaid)

Rp1.935.774.562,00

C.1.12 Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid)

Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.935.774.562,00 dan Rp79.075.000,00. Belanja di bayar di muka merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan.

Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 53
Rincian Belanja Dibayar di Muka

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp 2.166.667,00	Rp -	Rp 2.166.667,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 28.749.990,00	Rp -	Rp 28.749.990,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 414.487.000,00	Rp 79.075.000,00	Rp 335.412.000,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp -	Rp -	Rp -
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp 1.490.370.905,00	Rp -	Rp 1.490.370.905,00
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp -	Rp -	Rp -
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp -	Rp -	Rp -
9	Ditjen PHU	Rp -	Rp -	Rp -
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp 1.935.774.562,00	Rp 79.075.000,00	Rp 1.856.699.562,00

Uang Muka

Belanja

(Prepayment)

Rp0,00

C.1.13 Uang Muka Belanja (Prepayment)

Uang Muka Belanja per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp125.698.016,00. Uang Muka Belanja merupakan pengeluaran Kementerian Agama yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati

Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima
Rp11.368.913.
052,00

C.1.14 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp11.368.913.052,00 dan Rp0,00, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Rincian saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 54
Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

NO	Uraian Eselon I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp 464.000,00	Rp -	Rp 464.000,00
2	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 11.368.449.052,00	Rp -	Rp 11.368.449.052,00
JUMLAH		Rp 11.368.913.052,00	Rp -	Rp 11.368.913.052,00

Persediaan
Rp92.213.683.
492,00

C.1.15 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp92.213.683.492,00 dan Rp59.664.688.425,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian saldo Persediaan per Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 55
Rincian Persediaan per Unit Eselon I

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp 8.870.891.228,00	Rp 6.947.321.147,00	Rp 1.923.570.081,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp 4.532.787.200,00	Rp 3.227.835.985,00	Rp 1.304.951.215,00
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 28.210.998.342,00	Rp 26.289.443.806,00	Rp 1.921.554.536,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 33.824.369.822,00	Rp 16.525.008.458,00	Rp 17.299.361.364,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 4.899.559.022,00	Rp 826.661.520,00	Rp 4.072.897.502,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp 4.641.258.450,00	Rp 463.453.468,00	Rp 4.177.804.982,00
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 624.766.271,00	Rp 339.541.317,00	Rp 285.224.954,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 226.755.707,00	Rp 116.400.199,00	Rp 110.355.508,00
9	Ditjen PHU	Rp 1.975.359.121,00	Rp 1.438.108.402,00	Rp 537.250.719,00
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp 4.406.938.329,00	Rp 3.490.914.123,00	Rp 916.024.206,00
JUMLAH		Rp 92.213.683.492,00	Rp 59.664.688.425,00	Rp 32.548.995.067,00

Persediaan

BLU

Rp8.948.855.328,00

C.1.16 Persediaan Badan Layanan Umum

Persediaan BLU per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp8.948.855.328,00 dan Rp9.435.782.343,00. Persediaan BLU merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jenis persediaan BLU yang disajikan dalam neraca Kementerian Agama berupa persediaan BLU pelayanan pendidikan yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam.

Rincian sa Persediaan BLU per satker BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 56
Rincian Persediaan BLU Per Satker BLU

NO	URAIAN SATKER BLU	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Alaudin Makasar	Rp 186.941.136,00	Rp 255.574.880,00	Rp (68.633.744,00)
2	IAIN Mataram	Rp 517.683.570,00	Rp 517.683.570,00	Rp -
3	UIN Syarif Hidayatullah	Rp 1.575.014.176,00	Rp 1.513.692.416,00	Rp 61.321.760,00
4	UIN Sunan Gunung Jati Bandung	Rp 1.148.205.413,00	Rp 1.387.337.572,00	Rp (239.132.159,00)
5	IAIN SMH Banten	Rp 234.306.349,00	Rp 438.137.018,00	Rp (203.830.669,00)
6	IAIN Walisongo Semarang	Rp 837.678.748,00	Rp 827.469.647,00	Rp 10.209.101,00
7	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rp 855.808.745,00	Rp 533.229.081,00	Rp 322.579.664,00
8	IAIN Sunan Ampel	Rp 372.183.900,00	Rp 364.359.770,00	Rp 7.824.130,00
9	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Rp 1.785.291.070,00	Rp 1.389.257.414,00	Rp 396.033.656,00
10	IAIN Ar-Raniry Aceh	Rp 43.636.878,00	Rp 43.636.878,00	Rp -
11	IAIN Sumatera Utara Medan	Rp 459.558.180,00	Rp 498.908.852,00	Rp (39.350.672,00)
12	UIN Sulthan Syarif Kasim Riau	Rp 360.460.035,00	Rp 360.460.035,00	Rp -
13	IAIN Sulthan Thaha Jambi	Rp -	Rp 661.897.410,00	Rp (661.897.410,00)
14	IAIN Raden Fatah Palembang	Rp 348.943.875,00	Rp 445.413.050,00	Rp (96.469.175,00)
15	IAIN Raden Intan Lampung	Rp 223.143.253,00	Rp 198.724.750,00	Rp 24.418.503,00
JUMLAH		Rp 8.948.855.328,00	Rp 9.435.782.343,00	Rp (486.927.015,00)

Aset Tetap
Rp37.584.723.
077.216,00

C.2 Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp37.584.723.077.216,00 dan Rp34.711.157.004.381,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Agama per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 57
Rincian Aset Tetap

No	Jenis	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Tanah	Rp 12.066.004.403.231,00	Rp 11.911.986.673.758,00	Rp 154.017.729.473,00
2	Tanah BLU	Rp 3.608.861.460.401,00	Rp 3.567.133.729.390,00	Rp 41.727.731.011,00
3	Peralatan dan Mesin	Rp 4.850.510.141.566,00	Rp 3.943.894.559.057,00	Rp 906.615.582.509,00
4	Peralatan dan Mesin BLU	Rp 1.527.707.753.396,00	Rp 1.409.012.506.521,00	Rp 118.695.246.875,00
5	Gedung dan Bangunan	Rp 16.636.965.153.797,00	Rp 14.661.086.032.077,00	Rp 1.975.879.121.720,00
6	Gedung dan Bangunan BLU	Rp 3.387.111.494.329,00	Rp 3.139.798.998.268,00	Rp 247.312.496.061,00
7	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 338.143.940.333,00	Rp 272.471.057.289,00	Rp 65.672.883.044,00
8	Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU	Rp 173.538.253.567,00	Rp 162.071.909.996,00	Rp 11.466.343.571,00
9	Aset Tetap Lainnya	Rp 981.525.550.714,00	Rp 887.872.605.807,00	Rp 93.652.944.907,00
10	Aset Tetap Lainnya BLU	Rp 148.123.052.581,00	Rp 136.618.435.211,00	Rp 11.504.617.370,00
11	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 744.966.878.706,00	Rp 817.950.299.672,00	Rp (72.983.420.966,00)
12	Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU	Rp 1.036.776.910.692,00	Rp 578.616.573.814,00	Rp 458.160.336.878,00
Jumlah		Rp 45.500.234.993.313,00	Rp 41.488.513.380.860,00	Rp 4.011.721.612.453,00
Akumulasi Penyusutan		Rp (7.915.511.916.097,00)	Rp (6.777.356.376.479,00)	Rp (1.138.155.539.618,00)
Nilai Buku Aset Tetap		Rp 37.584.723.077.216,00	Rp 34.711.157.004.381,00	Rp 2.873.566.072.835,00

Tanah

C.2.1 Tanah

Rp12.066.004.403.231,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kementerian Agama per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp12.066.004.403.231,00 dan Rp11.911.986.673.758,00. Kenaikan nilai Tanah per 31 Desember 2015 sebesar Rp154.017.729.473,00. Perubahan saldo tanah yang lain disebabkan diantaranya karena adanya koreksi pencatatan nilai, penghapusan, transfer keluar, reklasifikasi keluar dan penghentian aset dari penggunaan operasional pemerintah dengan nilai mutasi sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2015	Rp 11.911.986.673.758
Mutasi Tambah:	Rp 311.187.266.766
Mutasi Kurang :	Rp (160.894.324.148)
Penyesuaian	Rp 3.724.786.855
Saldo per 31 Desember 2015	Rp 12.066.004.403.231
Akumulasi Penyusutan	Rp -
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp 12.066.004.403.231

Penambahan dan pengurangan nilai tanah non blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.1

Rincian saldo Tanah per Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 58

Rincian Tanah Per Unit Eselon 1

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp 1.995.173.139.109,00	Rp 2.025.177.649.171,00	Rp (30.004.510.062,00)
2	Inspektorat Jenderal	Rp 44.640.704.931,00	Rp 44.640.704.931,00	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 4.760.334.085.903,00	Rp 4.733.374.793.279,00	Rp 26.959.292.624,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 4.855.854.898.303,00	Rp 4.741.726.493.152,00	Rp 114.128.405.151,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 63.446.602.155,00	Rp 60.321.948.795,00	Rp 3.124.653.360,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -	Rp -
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 66.108.347.210,00	Rp 64.276.768.210,00	Rp 1.831.579.000,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 2.523.386.500,00	Rp 2.523.386.500,00	Rp -
9	Ditjen PHU	Rp 139.454.265.485,00	Rp 114.053.809.985,00	Rp 25.400.455.500,00
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp 138.468.973.635,00	Rp 125.891.119.735,00	Rp 12.577.853.900,00
	JUMLAH	Rp 12.066.004.403.231,00	Rp 11.911.986.673.758,00	Rp 154.017.729.473,00

Tanah Badan

C.2.2 Tanah Badan Layanan Umum

Layanan

Umum

Rp3.608.861.4

Nilai aset tetap berupa tanah BLU yang dimiliki Kementerian Agama per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar

Rp3.608.861.460.401,00 dan Rp3.567.133.729.390,00 merupakan saldo yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam. Kenaikan nilai Tanah Badan Layanan Umum per 31 Desember 2015 sebesar Rp41.727.731.011,00 disebabkan antara lain karena adanya pembelian, penyelesaian KDP, pengembangan nilai aset dan koreksi pencatatan dengan nilai mutasi sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	3.567.133.729.390
Mutasi Tambah:	Rp	71.707.925.726
Mutasi Kurang :	Rp	(29.046.982.715)
Penyesuaian	Rp	(933.212.000)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	3.608.861.460.401
Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	3.608.861.460.401

Penambahan dan pengurangan nilai tanah blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.1

Rincian saldo Tanah Badan Layanan Umum per Satker BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 59
Rincian Tanah Badan Layanan Umum Per Satker BLU

NO	URAIAN SATKER BLU	31 DSEMBER 2015	31 DSEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Alaudin Makasar	Rp 300.898.655.000,00	Rp 300.898.655.000,00	Rp -
2	IAIN Mataram	Rp 39.727.170.500,00	Rp 39.727.170.500,00	Rp -
3	UIN Syarif Hidayatullah	Rp 502.170.469.000,00	Rp 501.342.469.000,00	Rp 828.000.000,00
4	UIN Sunan Gunung Jati Bandung	Rp 239.109.396.449,00	Rp 239.109.396.449,00	Rp -
5	IAIN SMH Banten	Rp 140.617.943.801,00	Rp 139.764.896.801,00	Rp 853.047.000,00
6	IAIN Walisongo Semarang	Rp 252.972.973.683,00	Rp 252.972.973.683,00	Rp -
7	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rp 490.573.039.800,00	Rp 490.573.039.800,00	Rp -
8	IAIN Sunan Ampel	Rp 402.619.373.722,00	Rp 418.126.219.791,00	Rp (15.506.846.069,00)
9	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Rp 184.919.910.507,00	Rp 184.462.310.507,00	Rp 457.600.000,00
10	IAIN Ar-Raniry Aceh	Rp 149.144.772.597,00	Rp 149.144.772.597,00	Rp -
11	IAIN Sumatera Utara Medan	Rp 183.920.822.697,00	Rp 183.920.822.697,00	Rp -
12	UIN Sulthan Syarif Kasim Riau	Rp 316.319.531.915,00	Rp 316.272.781.915,00	Rp 46.750.000,00
13	IAIN Sulthan Thaha Jambi	Rp 86.399.620.000,00	Rp 40.847.740.000,00	Rp 45.551.880.000,00
14	IAIN Raden Fatah Palembang	Rp 148.757.976.780,00	Rp 139.260.676.700,00	Rp 9.497.300.080,00
15	IAIN Raden Intan Lampung	Rp 170.709.803.950,00	Rp 170.709.803.950,00	Rp -
	JUMLAH	Rp 3.608.861.460.401,00	Rp 3.567.133.729.390,00	Rp 41.727.731.011,00

Aset Tanah dan Tanah BLU Kementerian Agama seluas 875.603 m² dan 50 ha dengan nilai minimal sebesar Rp88.181.985.540,00 serta tanah dan rumah dinas sebanyak 115 unit dikuasai oleh pihak ketiga secara tidak sah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 (Sembilan) dan 2 lokasi lainnya seluas 797.406 m² telah dan tengah

menghadapi proses pengadilan.

Peralatan dan
Mesin
Rp4.850.510.1
41.566,00

C.2.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp4.850.510.141.566,00 dan Rp3.943.894.559.057,00. Kenaikan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 sebesar Rp906.615.582.509,00 dikarenakan adanya koreksi pencatatan nilai, pembelian, transfer dan hibah masuk, reklasifikasi masuk/ atau aset lainnya ke aset tetap dan pengembangan dengan nilai mutasi sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	3.943.894.559.057
Mutasi Tambah:	Rp	967.541.484.930
Mutasi Kurang :	Rp	(87.042.390.564)
Penyesuaian	Rp	26.116.488.143
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	4.850.510.141.566
Akumulasi Penyusutan	Rp	(3.293.774.386.930)
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	1.556.735.754.636

Penambahan dan pengurangan nilai peralatan dan mesin non blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.3

Rincian saldo Peralatan dan Mesin per Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 60

Rincian Peralatan dan Mesin Per Unit Eselon 1

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp 1.086.332.374.432,00	Rp 898.881.600.274,00	Rp 187.450.774.158,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp 46.378.078.806,00	Rp 43.506.576.056,00	Rp 2.871.502.750,00
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 392.790.015.041,00	Rp 270.825.849.290,00	Rp 121.964.165.751,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 2.674.039.093.508,00	Rp 2.221.931.670.858,00	Rp 452.107.422.650,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 98.042.527.717,00	Rp 77.010.956.323,00	Rp 21.031.571.394,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp 32.978.762.142,00	Rp 22.656.303.205,00	Rp 10.322.458.937,00
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 70.138.952.387,00	Rp 60.207.986.958,00	Rp 9.930.965.429,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 45.477.053.014,00	Rp 28.680.419.183,00	Rp 16.796.633.831,00
9	Ditjen PHU	Rp 221.340.646.707,00	Rp 150.866.465.546,00	Rp 70.474.181.161,00
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp 182.992.637.812,00	Rp 169.326.731.364,00	Rp 13.665.906.448,00
	JUMLAH	Rp 4.850.510.141.566,00	Rp 3.943.894.559.057,00	Rp 906.615.582.509,00

Peralatan dan
Mesin BLU
Rp1.527.707.7
53.396,00

C.2.4 Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum

Nilai aset tetap berupa peralatan dan mesin BLU Kementerian Agama per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar

Rp1.527.707.753.396,00 dan Rp1.409.012.506.521,00 merupakan saldo yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam. Kenaikan nilai Peralatan dan Mesin BLU per 31 Desember 2015 sebesar Rp118.695.246.875,00 antara lain disebabkan karena pembelian peralatan dan mesin di tahun 2015 dengan nilai mutasi sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	1.409.012.506.521
Mutasi Tambah:	Rp	173.031.534.127
Mutasi Kurang :	Rp	(41.637.100.765)
Penyesuaian	Rp	(12.699.186.487)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	1.527.707.753.396
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.135.318.118.047)
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	392.389.635.349

Penambahan dan pengurangan nilai peralatan dan mesin blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.4

Rincian saldo Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Per Satker BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 61
Rincian Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Per Satker BLU

NO	URAIAN SATKER BLU	31 DESEMBER 2015	31 DSEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Alaudin Makasar	Rp 426.498.656.810,00	Rp 416.698.602.010,00	Rp 9.800.054.800,00
2	IAIN Mataram	Rp 22.860.820.332,00	Rp 22.860.820.332,00	Rp -
3	UIN Syarif Hidayatullah	Rp 255.374.350.394,00	Rp 241.436.037.863,00	Rp 13.938.312.531,00
4	UIN Sunan Gunung Jati Bandung	Rp 103.316.223.167,00	Rp 45.742.777.054,00	Rp 57.573.446.113,00
5	IAIN SMH Banten	Rp 21.307.581.090,00	Rp 19.058.566.020,00	Rp 2.249.015.070,00
6	IAIN Walisongo Semarang	Rp 55.798.953.112,00	Rp 49.191.651.579,00	Rp 6.607.301.533,00
7	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rp 161.869.248.780,00	Rp 169.216.166.130,00	Rp (7.346.917.350,00)
8	IAIN Sunan Ampel	Rp 73.811.421.956,00	Rp 55.941.358.456,00	Rp 17.870.063.500,00
9	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Rp 70.888.411.217,00	Rp 73.276.996.835,00	Rp (2.388.585.618,00)
10	IAIN Ar-Raniry Aceh	Rp 33.314.363.682,00	Rp 33.314.363.682,00	Rp -
11	IAIN Sumatera Utara Medan	Rp 44.320.377.465,00	Rp 40.022.963.315,00	Rp 4.297.414.150,00
12	UIN Sulthan Syarif Kasim Riau	Rp 152.422.374.101,00	Rp 145.470.217.059,00	Rp 6.952.157.042,00
13	IAIN Sulthan Thaha Jambi	Rp 33.254.753.439,00	Rp 31.327.772.991,00	Rp 1.926.980.448,00
14	IAIN Raden Fatah Palembang	Rp 35.513.996.386,00	Rp 29.997.406.986,00	Rp 5.516.589.400,00
15	IAIN Raden Intan Lampung	Rp 37.156.221.465,00	Rp 35.456.806.209,00	Rp 1.699.415.256,00
JUMLAH		Rp 1.527.707.753.396,00	Rp 1.409.012.506.521,00	Rp 118.695.246.875,00

Gedung dan
Bangunan
Rp16.636.965.
153.797,00

C.2.5 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp16.636.965.153.797,00 dan Rp14.661.086.032.077,00. Kenaikan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 sebesar

Rp1.975.879.121.720,00 terjadi karena ada pembelian, transfer masuk dan hibah masuk, penyelesaian pembangunan dengan KDP langsung di tahun 2015 sebesar Rp174.215.195.703,00 dengan nilai mutasi sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	14.661.086.032.077
Mutasi Tambah:	Rp	1.844.415.548.857
Mutasi Kurang :	Rp	(199.253.268.214)
Penyesuaian	Rp	330.716.841.077
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	16.636.965.153.797
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.867.210.703.138)
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	13.769.754.450.659

Penambahan dan pengurangan nilai gedung dan bangunan non blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.5

Rincian saldo Gedung dan Bangunan per Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 62
Rincian Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon 1

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp 2.896.494.214.137,00	Rp 2.845.806.702.431,00	Rp 50.687.511.706,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp 51.879.060.989,00	Rp 51.879.060.989,00	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 357.848.391.412,00	Rp 292.189.732.236,00	Rp 65.658.659.176,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 12.384.511.537.268,00	Rp 10.688.021.146.960,00	Rp 1.696.490.390.308,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 232.932.545.297,00	Rp 227.233.427.212,00	Rp 5.699.118.085,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -	Rp -
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 130.347.858.833,00	Rp 124.586.045.901,00	Rp 5.761.812.932,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 24.243.520.559,00	Rp 16.304.005.379,00	Rp 7.939.515.180,00
9	Ditjen PHU	Rp 185.136.034.085,00	Rp 47.244.635.752,00	Rp 137.891.398.333,00
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp 373.571.991.217,00	Rp 367.821.275.217,00	Rp 5.750.716.000,00
	JUMLAH	Rp 16.636.965.153.797,00	Rp 14.661.086.032.077,00	Rp 1.975.879.121.720,00

Gedung dan
Bangunan
BLU
Rp3.387.111.4
94.329,00

C.2.6 Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum

Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangunan BLU Kementerian Agama per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp3.387.111.494.329,00 dan Rp3.139.798.998.268,00 merupakan saldo yang dikonsolidasikan pada neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam. Kenaikan nilai Gedung dan Bangunan BLU per 31 Desember 2015 sebesar Rp247.312.496.061,00 terjadi antara lain karena penyelesaian

pembangunan dengan KDP dengan nilai mutasi sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	3.139.798.998.268
Mutasi Tambah:	Rp	603.256.234.295
Mutasi Kurang :	Rp	(34.149.943.810)
Penyesuaian	Rp	(321.793.794.424)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	3.387.111.494.329
Akumulasi Penyusutan	Rp	(386.627.663.704)
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	3.000.483.830.625

Penambahan dan pengurangan nilai gedung dan bangunan blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.6

Rincian saldo Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Per Satker BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 63

Rincian Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Per Satker BLU

NO	URAIAN SATKER BLU	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Alaudin Makasar	Rp 349.164.469.015,00	Rp 345.485.960.015,00	Rp 3.678.509.000,00
2	IAIN Mataram	Rp 70.832.704.821,00	Rp 70.832.704.821,00	Rp -
3	UIN Syarif Hidayatullah	Rp 692.510.374.543,00	Rp 691.636.395.468,00	Rp 873.979.075,00
4	UIN Sunan Gunung Jati Bandung	Rp 235.268.945.531,00	Rp 234.003.509.982,00	Rp 1.265.435.549,00
5	IAIN SMH Banten	Rp 104.884.217.193,00	Rp 35.043.349.281,00	Rp 69.840.867.912,00
6	IAIN Walisongo Semarang	Rp 75.526.347.978,00	Rp 71.817.066.728,00	Rp 3.709.281.250,00
7	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rp 421.424.729.007,00	Rp 420.305.261.889,00	Rp 1.119.467.118,00
8	IAIN Sunan Ampel	Rp 151.216.228.956,00	Rp 147.465.554.628,00	Rp 3.750.674.328,00
9	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Rp 416.140.174.211,00	Rp 323.251.973.551,00	Rp 92.888.200.660,00
10	IAIN Ar-Raniry Aceh	Rp 86.751.979.000,00	Rp 86.751.979.000,00	Rp -
11	IAIN Sumatera Utara Medan	Rp 119.390.461.472,00	Rp 118.520.305.472,00	Rp 870.156.000,00
12	UIN Sulthan Syarif Kasim Riau	Rp 275.523.131.871,00	Rp 265.258.833.129,00	Rp 10.264.298.742,00
13	IAIN Sulthan Thaha Jambi	Rp 100.498.275.595,00	Rp 82.685.186.345,00	Rp 17.813.089.250,00
14	IAIN Raden Fatah Palembang	Rp 149.903.899.204,00	Rp 144.843.789.704,00	Rp 5.060.109.500,00
15	IAIN Raden Intan Lampung	Rp 138.075.555.932,00	Rp 101.897.128.255,00	Rp 36.178.427.677,00
JUMLAH		Rp3.387.111.494.329,00	Rp3.139.798.998.268,00	Rp 247.312.496.061,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp338.143.940.333,00

C.2.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp338.143.940.333,00 dan Rp272.471.057.289,00. Kenaikan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2015 sebesar Rp65.672.883.044,00 terjadi antara lain karena adanya pembelian dan transfer dengan nilai mutasi sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	272.471.057.289
Mutasi Tambah:	Rp	34.322.487.825
Mutasi Kurang :	Rp	(625.750.695)
Penyesuaian	Rp	31.976.145.914
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	338.143.940.333
Akumulasi Penyusutan	Rp	(96.877.480.948)
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	241.266.459.385

Penambahan dan pengurangan nilai jalan, irigasi, dan jaringan non blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.7

Rincian saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

*Tabel 64
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Unit Eselon 1*

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp 36.958.743.950,00	Rp 32.847.180.122,00	Rp 4.111.563.828,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp 599.782.858,00	Rp 599.782.858,00	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 514.024.738,00	Rp 392.568.738,00	Rp 121.456.000,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 236.583.642.419,00	Rp 185.710.510.560,00	Rp 50.873.131.859,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 39.630.687.375,00	Rp 35.215.219.375,00	Rp 4.415.468.000,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp 43.000.000,00	Rp 43.000.000,00	Rp -
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 7.359.363.850,00	Rp 4.743.233.250,00	Rp 2.616.130.600,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 735.746.786,00	Rp 642.800.786,00	Rp 92.946.000,00
9	Ditjen PHU	Rp 5.218.625.530,00	Rp 1.920.415.273,00	Rp 3.298.210.257,00
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp 10.500.322.827,00	Rp 10.356.346.327,00	Rp 143.976.500,00
	JUMLAH	Rp 338.143.940.333,00	Rp 272.471.057.289,00	Rp 65.672.883.044,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU Rp173.538.253.567,00

C.2.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU Kementerian Agama per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp173.538.253.567,00 dan Rp162.071.909.996,00 merupakan saldo yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam. Kenaikan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.466.343.571,00 terjadi antara lain karena adanya penyelesaian pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan, pengembangan melalui Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai mutasi sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	162.071.909.996
Mutasi Tambah:	Rp	44.028.621.139
Mutasi Kurang :	Rp	(2.643.535.104)
Penyesuaian	Rp	(29.918.742.464)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	173.538.253.567
Akumulasi Penyusutan	Rp	(82.743.279.452)
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	90.794.974.115

Penambahan dan pengurangan nilai jalan, irigasi, dan jaringan blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.8

Rincian saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU Per Satker BLU sebagai berikut:

Tabel 65
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum
Per Satker BLU

NO	URAIAN SATKER BLU	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Alaudin Makasar	Rp 53.101.106.775,00	Rp 52.901.644.775,00	Rp 199.462.000,00
2	IAIN Mataram	Rp 857.016.100,00	Rp 857.016.100,00	Rp -
3	UIN Syarif Hidayatullah	Rp 5.234.436.614,00	Rp 5.208.607.670,00	Rp 25.828.944,00
4	UIN Sunan Gunung Jati Bandung	Rp 9.468.852.041,00	Rp 8.645.499.041,00	Rp 823.353.000,00
5	IAIN SMH Banten	Rp 10.115.778.769,00	Rp 3.425.233.242,00	Rp 6.690.545.527,00
6	IAIN Walisongo Semarang	Rp 21.045.211.720,00	Rp 21.045.211.720,00	Rp -
7	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rp 6.048.608.150,00	Rp 6.048.608.150,00	Rp -
8	IAIN Sunan Ampel	Rp 4.085.509.384,00	Rp 4.085.509.384,00	Rp -
9	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Rp 3.207.885.000,00	Rp 3.207.885.000,00	Rp -
10	IAIN Ar-Raniry Aceh	Rp 2.039.543.000,00	Rp 2.039.543.000,00	Rp -
11	IAIN Sumatera Utara Medan	Rp 9.353.329.600,00	Rp 9.353.329.600,00	Rp -
12	UIN Sulthan Syarif Kasim Riau	Rp 8.793.347.152,00	Rp 8.491.178.152,00	Rp 302.169.000,00
13	IAIN Sulthan Thaha Jambi	Rp 14.533.506.365,00	Rp 14.022.102.265,00	Rp 511.404.100,00
14	IAIN Raden Fatah Palembang	Rp 5.348.473.647,00	Rp 4.812.420.647,00	Rp 536.053.000,00
15	IAIN Raden Intan Lampung	Rp 20.305.649.250,00	Rp 17.928.121.250,00	Rp 2.377.528.000,00
	JUMLAH	Rp 173.538.253.567,00	Rp 162.071.909.996,00	Rp 11.466.343.571,00

Aset Tetap Lainnya Rp981.525.550.714,00

C.2.9 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Kementerian Agama per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp981.525.550.714,00 dan Rp887.872.605.807,00. Saldo Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp93.652.944.907,00 disebabkan antara lain karena adanya pembelian, transfer masuk dengan nilai mutasi sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	887.872.605.807
Mutasi Tambah:	Rp	127.880.613.694
Mutasi Kurang :	Rp	(42.298.901.322)
Penyesuaian	Rp	8.071.232.535
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	981.525.550.714
Akumulasi Penyusutan	Rp	(51.490.752.487)
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	930.034.798.227

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap lainnya non blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.9

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 66
Rincian Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp 28.051.753.959,00	Rp 29.310.338.391,00	Rp (1.258.584.432,00)
2	Inspektorat Jenderal	Rp 862.078.441,00	Rp 862.078.441,00	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 21.344.110.662,00	Rp 17.278.924.017,00	Rp 4.065.186.645,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 835.405.622.950,00	Rp 749.840.457.072,00	Rp 85.565.165.878,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 12.663.846.468,00	Rp 10.121.803.968,00	Rp 2.542.042.500,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp 147.647.320,00	Rp 59.800.000,00	Rp 87.847.320,00
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 10.260.384.531,00	Rp 9.589.317.331,00	Rp 671.067.200,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 9.427.218.876,00	Rp 9.116.048.711,00	Rp 311.170.165,00
9	Ditjen PHU	Rp 55.381.194.485,00	Rp 53.952.072.025,00	Rp 1.429.122.460,00
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp 7.981.693.022,00	Rp 7.741.765.851,00	Rp 239.927.171,00
JUMLAH		Rp 981.525.550.714,00	Rp 887.872.605.807,00	Rp 93.652.944.907,00

*Aset Tetap
Lainnya BLU
Rp148.123.05
2.581,00*

C.2.10 Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum

Saldo Aset Tetap Lainnya BLU Kementerian Agama per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp148.123.052.581,00 dan Rp136.618.435.211,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan merupakan saldo yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam. Kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya BLU per 31 Desember 2015 sebesar Rp11.504.617.370,00, antara lain disebabkan karena pembelian, pengembangan nilai, koreksi pencatatan, transfer dan hibah masuk

dengan nilai mutasi sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	136.618.435.211
Mutasi Tambah:	Rp	16.402.894.190
Mutasi Kurang :	Rp	(3.779.676.920)
Penyesuaian	Rp	(1.118.599.900)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	148.123.052.581
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.469.531.391)
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	146.653.521.190

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap lainnya non blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.10

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Per Satker BLU sebagai berikut:

Tabel 67
Rincian Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Per Satker BLU

NO	URAIAN SATKER BLU	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Alaudin Makasar	Rp 10.850.791.570,00	Rp 10.019.572.970,00	Rp 831.218.600,00
2	IAIN Mataram	Rp 4.690.188.431,00	Rp 4.690.188.431,00	Rp -
3	UIN Syarif Hidayatullah	Rp 29.712.963.571,00	Rp 26.655.304.024,00	Rp 3.057.659.547,00
4	UIN Sunan Gunung Jati Bandung	Rp 31.180.204.172,00	Rp 29.792.553.883,00	Rp 1.387.650.289,00
5	IAIN SMH Banten	Rp 2.969.388.652,00	Rp 2.944.714.252,00	Rp 24.674.400,00
6	IAIN Walisongo Semarang	Rp 7.659.554.805,00	Rp 6.476.087.790,00	Rp 1.183.467.015,00
7	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rp 9.646.053.986,00	Rp 9.124.222.986,00	Rp 521.831.000,00
8	IAIN Sunan Ampel	Rp 7.026.515.315,00	Rp 7.026.515.315,00	Rp -
9	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Rp 18.194.083.588,00	Rp 17.128.347.138,00	Rp 1.065.736.450,00
10	IAIN Ar-Raniry Aceh	Rp 2.189.521.212,00	Rp 2.189.521.212,00	Rp -
11	IAIN Sumatera Utara Medan	Rp 4.572.585.554,00	Rp 3.544.905.554,00	Rp 1.027.680.000,00
12	UIN Sulthan Syarif Kasim Riau	Rp 7.322.455.035,00	Rp 6.206.587.656,00	Rp 1.115.867.379,00
13	IAIN Sulthan Thaha Jambi	Rp 4.464.385.632,00	Rp 4.167.043.007,00	Rp 297.342.625,00
14	IAIN Raden Fatah Palembang	Rp 1.512.590.313,00	Rp 933.573.063,00	Rp 579.017.250,00
15	IAIN Raden Intan Lampung	Rp 6.131.770.745,00	Rp 5.719.297.930,00	Rp 412.472.815,00
	JUMLAH	Rp 148.123.052.581,00	Rp 136.618.435.211,00	Rp 11.504.617.370,00

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp744.966.878.706,00

C.2.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp744.966.878.706,00 dan Rp817.950.299.672,00. Kenaikan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp(72.983.420.966,00) terjadi karena sudah menjadi aset melalui penyelesaian pembangunan dengan nilai mutasi sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	817.950.299.672
Mutasi Tambah:	Rp	1.877.653.058.799
Mutasi Kurang :	Rp	(1.740.320.035.181)
Penyesuaian	Rp	(210.316.444.584)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	744.966.878.706
Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	744.966.878.706

Penambahan dan pengurangan nilai konstruksi dalam pengerjaan non blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.11

Rinciannya saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 68
Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan Per Unit Eselon 1

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp 55.987.294.540,00	Rp 42.189.723.809,00	Rp 13.797.570.731,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 32.423.681.107,00	Rp 25.911.163.297,00	Rp 6.512.517.810,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 384.589.926.186,00	Rp 550.067.085.896,00	Rp (165.477.159.710,00)
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 82.795.465.588,00	Rp 60.889.494.971,00	Rp 21.905.970.617,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -	Rp -
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 1.466.282.300,00	Rp 246.156.300,00	Rp 1.220.126.000,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 1.908.025.000,00	Rp 2.453.299.180,00	Rp (545.274.180,00)
9	Ditjen PHU	Rp 180.685.706.785,00	Rp 136.193.376.219,00	Rp 44.492.330.566,00
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp 5.110.497.200,00	Rp -	Rp 5.110.497.200,00
JUMLAH		Rp 744.966.878.706,00	Rp 817.950.299.672,00	Rp (72.983.420.966,00)

Konstruksi dalam Pengerjaan BLU Rp1.036.776.910.692,00

C.2.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Badan Layanan Umum

Saldo konstruksi dalam pengerjaan BLU Kementerian Agama per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.036.776.910.692,00 dan Rp578.616.573.814,00 merupakan saldo pada Satker BLU yang dikonsolidasikan dalam neraca Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam. Penurunan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan BLU per 31 Desember 2015 sebesar Rp458.160.336.878,00 dengan nilai mutasi sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	578.616.573.814
Mutasi Tambah:	Rp	766.552.790.169
Mutasi Kurang :	Rp	(637.996.940.977)
Penyesuaian	Rp	329.604.487.686
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	1.036.776.910.692
Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	1.036.776.910.692

Penambahan dan pengurangan nilai konstruksi dalam pengerjaan blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.12

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum Per Satker BLU sebagai berikut:

Tabel 69

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum

Per Satker BLU

NO	URAIAN SATKER BLU	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UN Alaudin Makasar	Rp 128.992.179.001,00	Rp 95.727.219.001,00	Rp 33.264.960.000,00
2	IAIN Mataram	Rp 24.446.534.658,00	Rp 24.446.534.658,00	Rp -
3	UN Syarif Hidayatullah	Rp 144.488.478.103,00	Rp 52.068.016.246,00	Rp 92.420.461.857,00
4	UN Sunan Gunung Jati Bandung	Rp 17.209.398.300,00	Rp 49.779.500,00	Rp 17.159.618.800,00
5	IAIN SMH Banten	Rp 5.131.158.500,00	Rp 5.131.158.500,00	Rp -
6	IAIN Walisongo Semarang	Rp -	Rp -	Rp -
7	UN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rp 81.086.249.647,00	Rp 900.280.806,00	Rp 80.185.968.841,00
8	IAIN Sunan Ampel	Rp 298.882.070.435,00	Rp 64.804.215.585,00	Rp 234.077.854.850,00
9	UN Maulana Malik Ibrahim Malang	Rp 44.604.972.152,00	Rp 65.635.219.152,00	Rp (21.030.247.000,00)
10	IAIN Ar-Raniry Aceh	Rp 231.938.430.366,00	Rp 231.938.430.366,00	Rp -
11	IAIN Sumatera Utara Medan	Rp 7.407.011.500,00	Rp 2.495.913.500,00	Rp 4.911.098.000,00
12	UN Sulthan Syarif Kasim Riau	Rp 50.785.858.130,00	Rp 32.288.661.600,00	Rp 18.497.196.530,00
13	IAIN Sulthan Thaha Jambi	Rp -	Rp -	Rp -
14	IAIN Raden Fatah Palembang	Rp 849.671.900,00	Rp 849.671.900,00	Rp -
15	IAIN Raden Intan Lampung	Rp 954.898.000,00	Rp 2.281.473.000,00	Rp (1.326.575.000,00)
	JUMLAH	Rp 1.036.776.910.692,00	Rp 578.616.573.814,00	Rp 458.160.336.878,00

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(7.915.511.
916.097,00)

C.2.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp(7.915.511.916.097,00) dan Rp(6.777.356.376.479,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP. Nilai akumulasi penyusutan tahun 2015 mengalami penurunan dari nilai akumulasi penyusutan tahun 2014, hal ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan penyusutan sesuai ketentuan teknis perhitungan dan penyajian penyusutan BMN dalam Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 145/KMK.06/2015 yang mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2014.

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 70

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Peralatan dan Mesin	Rp 4.850.510.141.566,00	Rp (3.293.774.386.930,00)	Rp 1.556.735.754.636,00
2	Peralatan dan Mesin BLU	Rp 1.527.707.753.396,00	Rp (1.135.318.118.047,00)	Rp 392.389.635.349,00
3	Gedung dan Bangunan	Rp 16.636.965.153.797,00	Rp (2.867.210.703.138,00)	Rp 13.769.754.450.659,00
4	Gedung dan Bangunan BLU	Rp 3.387.111.494.329,00	Rp (386.627.663.704,00)	Rp 3.000.483.830.625,00
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 338.143.940.333,00	Rp (96.877.480.948,00)	Rp 241.266.459.385,00
6	Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU	Rp 173.538.253.567,00	Rp (82.743.279.452,00)	Rp 90.794.974.115,00
7	Aset Tetap Lainnya	Rp 981.525.550.714,00	Rp (51.490.752.487,00)	Rp 930.034.798.227,00
8	Aset Tetap Lainnya BLU	Rp 148.123.052.581,00	Rp (1.469.531.391,00)	Rp 146.653.521.190,00
	JUMLAH	Rp 28.043.625.340.283,00	Rp (7.915.511.916.097,00)	Rp 20.128.113.424.186,00

Piutang
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
Rp(21.758.102,00)

C.3. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Jumlah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp(21.758.102,00) dan 0,00 . Nilai Tagihan TP/TGR terdapat pada Eselon I Sekretariat Jenderal dan Ditjen Pendidikan Islam yang merupakan nilai atas tuntutan ganti rugi yang belum dicatat namun sudah disetor ke kas Negara.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
Rp(742.730,00)

C.3.1 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Jumlah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp(742.730,00) dan Rp0,00 . Nilai Tagihan TP/TGR terdapat pada Eselon I Sekretariat Jenderal dan Ditjen Pendidikan Islam

Aset Lainnya **C.4 Aset Lainnya**

Rp1.684.575.598.477,00

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp1.684.575.598.477,00 dan Rp1.808.282.120.492,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 71
Rincian Aset Lainnya

NO	ASET LAINNYA	TA 2015	TA 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Aset Tak Berwujud	Rp 87.533.022.965,00	Rp 79.768.834.512,00	Rp 7.764.188.453,00
2	Aset Tak Berwujud-BLU	Rp 34.255.714.111,00	Rp 28.795.789.316,00	Rp 5.459.924.795,00
3	Aset Lain-Lain	Rp 138.316.764.424,00	Rp 117.097.834.877,00	Rp 21.218.929.547,00
4	Aset Lain-Lain BLU	Rp 26.203.937.931,00	Rp 14.151.872.055,00	Rp 12.052.065.876,00
5	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	Rp 1.505.597.044.704,00	Rp 1.657.177.288.743,00	Rp (151.580.244.039,00)
Jumlah		Rp 1.791.906.484.135,00	Rp 1.896.991.619.503,00	Rp (105.085.135.368,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		Rp (99.483.712.000,00)	Rp (81.162.828.983,00)	Rp (18.320.883.017,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BLU		Rp (7.848.681.099,00)	Rp (7.546.670.028,00)	Rp (302.011.071,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		Rp (29.155.123,00)	Rp -	Rp (29.155.123,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud-BLU		Rp 30.662.564,00	Rp -	Rp 30.662.564,00
JUMLAH		Rp 1.684.575.598.477,00	Rp 1.808.282.120.492,00	Rp (123.706.522.015,00)

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp87.533.022.965,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp87.533.022.965,00 dan Rp79.768.834.512,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Kementerian Agama berupa software, lisensi, hasil kajian/penelitian, dan aset tak berwujud lainnya. Kenaikan nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp7.764.188.453,00 terjadi karena pembelian, pengembangan nilai, koreksi pencatatan nilai, transfer dan hibah masuk dengan nilai mutasi sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	79.768.834.512
Mutasi Tambah:	Rp	7.397.075.137
Mutasi Kurang :	Rp	(157.733.053)
Penyesuaian	Rp	524.846.369
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	87.533.022.965
Akumulasi Penyusutan	Rp	(29.155.123)
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	87.503.867.842

Penambahan dan pengurangan nilai aset tak berwujud non blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.13

Rincian saldo Aset Tak Berwujud per Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 72
Rincian Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon 1

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp 17.028.853.569,00	Rp 15.979.230.151,00	Rp 1.049.623.418,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp 1.281.994.200,00	Rp 873.319.200,00	Rp 408.675.000,00
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 3.665.622.648,00	Rp 3.115.452.648,00	Rp 550.170.000,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 23.370.910.967,00	Rp 20.872.364.016,00	Rp 2.498.546.951,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 1.210.933.600,00	Rp 1.082.378.600,00	Rp 128.555.000,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -	Rp -
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 440.986.294,00	Rp 226.893.000,00	Rp 214.093.294,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 1.062.216.300,00	Rp 722.175.800,00	Rp 340.040.500,00
9	Ditjen PHU	Rp 36.701.589.387,00	Rp 34.612.233.397,00	Rp 2.089.355.990,00
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp 2.769.916.000,00	Rp 2.284.787.700,00	Rp 485.128.300,00
JUMLAH		Rp 87.533.022.965,00	Rp 79.768.834.512,00	Rp 7.764.188.453,00

C.4.2 Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum

Aset Tak Berwujud BLU Rp34.255.714.111,00

Saldo aset tak berwujud (ATB) BLU per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp34.255.714.111,00 dan Rp28.795.789.316,00. Aset Tak Berwujud BLU merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya BLU per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.459.924.795,00 dengan nilai mutasi sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	28.795.789.316
Mutasi Tambah:	Rp	5.786.071.045
Mutasi Kurang :	Rp	-
Penyesuaian	Rp	(326.146.250)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	34.255.714.111
Akumulasi Penyusutan	Rp	30.662.564
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	34.286.376.675

Penambahan dan pengurangan nilai aset tak berwujud blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.14

Rincian saldo Aset Tak Berwujud BLU per satker BLU sebagai berikut:

Tabel 73

Rincian Aset Tak Berwujud Per Satker BLU

NO	URAIAN SATKER BLU	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Alaudin Makasar	Rp 3.658.371.755,00	Rp 3.658.371.755,00	Rp -
2	IAIN Mataram	Rp 344.250.000,00	Rp 344.250.000,00	Rp -
3	UIN Syarif Hidayatullah	Rp 12.447.317.596,00	Rp 11.081.985.601,00	Rp 1.365.331.995,00
4	UIN Sunan Gunung Jati Bandung	Rp -	Rp -	Rp -
5	IAIN SMH Banten	Rp 1.060.747.800,00	Rp 878.147.800,00	Rp 182.600.000,00
6	IAIN Walisongo Semarang	Rp 1.371.592.550,00	Rp 518.327.550,00	Rp 853.265.000,00
7	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rp 7.999.226.800,00	Rp 7.041.907.500,00	Rp 957.319.300,00
8	IAIN Sunan Ampel	Rp 628.500.000,00	Rp 598.500.000,00	Rp 30.000.000,00
9	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Rp 765.782.665,00	Rp 736.282.665,00	Rp 29.500.000,00
10	IAIN Ar-Raniry Aceh	Rp 473.435.000,00	Rp 473.435.000,00	Rp -
11	IAIN Sumatera Utara Medan	Rp 1.545.213.500,00	Rp 354.929.500,00	Rp 1.190.284.000,00
12	UIN Sulthan Syarif Kasim Riau	Rp 2.366.210.945,00	Rp 1.946.428.945,00	Rp 419.782.000,00
13	IAIN Sulthan Thaha Jambi	Rp 634.346.500,00	Rp 299.629.000,00	Rp 334.717.500,00
14	IAIN Raden Fatah Palembang	Rp 875.040.000,00	Rp 815.040.000,00	Rp 60.000.000,00
15	IAIN Raden Intan Lampung	Rp 85.679.000,00	Rp 48.554.000,00	Rp 37.125.000,00
JUMLAH		Rp 34.255.714.111,00	Rp 28.795.789.316,00	Rp 5.459.924.795,00

C.4.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp138.316.76
4.424,00

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp138.316.764.424,00 dan Rp117.097.834.877,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Agama serta dalam proses penghapusan dari BMN. Kenaikan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 sebesar Rp21.218.929.547,00 terjadi antara lain karena adanya reklasifikasi dengan nilai mutasi sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	117.097.834.877
Mutasi Tambah:	Rp	49.363.407.667
Mutasi Kurang :	Rp	(34.460.922.757)
Penyesuaian	Rp	6.316.444.637
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	138.316.764.424
Akumulasi Penyusutan	Rp	(99.483.712.000)
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	38.833.052.424

Penambahan dan pengurangan nilai aset lain-lain non blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.15

Rincian saldo Aset Lain-lain per unit eselon 1 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-lain Per Unit Eselon 1

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp 45.462.501.656,00	Rp 39.264.691.357,00	Rp 6.197.810.299,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp 162.590.350,00	Rp 162.590.350,00	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 980.631.030,00	Rp 897.422.030,00	Rp 83.209.000,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 77.283.357.451,00	Rp 64.769.672.161,00	Rp 12.513.685.290,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 1.941.760.706,00	Rp 623.125.387,00	Rp 1.318.635.319,00
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp 211.166.900,00	Rp 102.874.900,00	Rp 108.292.000,00
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 1.788.222.210,00	Rp 952.051.384,00	Rp 836.170.826,00
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 89.221.900,00	Rp 754.708.750,00	Rp (665.486.850,00)
9	Ditjen PHU	Rp 557.469.263,00	Rp 226.254.320,00	Rp 331.214.943,00
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp 9.839.842.958,00	Rp 9.344.444.238,00	Rp 495.398.720,00
	JUMLAH	Rp 138.316.764.424,00	Rp 117.097.834.877,00	Rp 21.218.929.547,00

Aset Lain-Lain
BLU
Rp26.203.937.
931,00

C.4.4 Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum

Saldo aset lain-lain BLU per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp26.203.937.931,00 dan Rp14.151.872.055,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Agama serta dalam proses penghapusan dari BMN. Kenaikan nilai Aset Lain-lain BLU per 31 Desember 2015 sebesar Rp12.052.065.876,00 terjadi antara lain karena adanya reklasifikasi dengan nilai mutasi sebagai berikut:

Penambahan dan pengurangan nilai aset lain-lain blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.16

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	14.151.872.055
Mutasi Tambah:	Rp	22.286.068.924
Mutasi Kurang :	Rp	(1.663.015.665)
Penyesuaian	Rp	(8.570.987.383)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	26.203.937.931
Akumulasi Penyusutan	Rp	(7.848.681.099)
Saldo Buku per 31 Desember 2014	Rp	18.355.256.832

Penambahan dan pengurangan nilai aset lain-lain non blu secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.16

Rincian saldo Aset Lain-lain BLU per Satker BLU sebagai berikut:

Tabel 75
Rincian Aset Lain-lain Per Satker BLU

NO	URAIAN SATKER BLU	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	UIN Alaudin Makasar	Rp 1.268.105.000,00	Rp 1.268.105.000,00	Rp -
2	IAIN Mataram	Rp 266.779.625,00	Rp 27.911.940,00	Rp 238.867.685,00
3	UIN Syarif Hidayatullah	Rp 655.296.000,00	Rp 654.500.000,00	Rp 796.000,00
4	UIN Sunan Gunung Jati Bandung	77.158.000,0	Rp -	Rp 77.158.000,00
5	IAIN SMH Banten	Rp 1.019.857.373,00	Rp 142.358.000,00	Rp 877.499.373,00
6	IAIN Walisongo Semarang	Rp 31.442.000,00	Rp 1.019.857.373,00	Rp (988.415.373,00)
7	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rp -	Rp 31.442.000,00	Rp (31.442.000,00)
8	IAIN Ar-Raniry Aceh	Rp 4.491.291.300,00	Rp 4.491.291.300,00	Rp -
9	IAIN Sumatera Utara Medan	Rp 4.554.507.377,00	Rp 4.910.360.377,00	Rp (355.853.000,00)
10	UIN Sulthan Syarif Kasim Riau	Rp 1.018.940.150,00	Rp 404.421.000,00	Rp 614.519.150,00
11	IAIN Sulthan Thaha Jambi	Rp (27.638.211,00)	Rp 334.187.865,00	Rp (361.826.076,00)
12	IAIN Raden Fatah Palembang	Rp 19.892.000,00	Rp 19.892.000,00	Rp -
13	IAIN Raden Intan Lampung	Rp 12.828.307.317,00	Rp 847.545.200,00	Rp 11.980.762.117,00
JUMLAH		Rp 26.203.937.931,00	Rp 14.151.872.055,00	Rp 12.052.065.876,00

Dana yang
Dibatasi
Pergunaannya
Rp1.505.597.044.704,00

C.4.5 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1.505.597.044.704,00 dan Rp1.657.177.288.743,00. Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Nomor S-3410/PB.6/2011 tanggal 30 Maret 2011, aset bersih (net asset) Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (LK PIH) disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Agama pada akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset bersih berdasarkan LK PIH per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.505.597.044.704,00.

Pada Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015 *Unaudited* ini, sesuai dengan PMK Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 200/PMK.05/2012, Dana Abadi Umat (DAU) yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) tidak lagi disajikan sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya. Berdasarkan BAB VI Pasal 12 PMK Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya menjelaskan bahwa ikhtisar laporan keuangan Unit Badan Lainnya (BP-DAU) menjadi lampiran LK BUN dan LKPP, bukan lagi suplemen LKKL.

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(107.330.885.658,00)

C.4.6 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 tersaji sebesar Rp(107.330.885.658,00) dan Rp(88.709.499.011,00).

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 76
Rincian Akumulasi Aset Lainnya

NO	ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
A	Aset Tak Berwujud	Rp 87.533.022.965,00	Rp (29.155.123,00)	Rp 87.503.867.842,00
B	Aset Tak Berwujud BLU	Rp 34.255.714.111,00	Rp 30.662.564,00	Rp 34.286.376.675,00
JUMLAH		Rp 121.788.737.076,00	Rp 1.507.441,00	Rp 121.790.244.517,00
C	Aset Lain-Lain	Rp 138.316.764.424,00	Rp (99.483.712.000,00)	Rp 38.833.052.424,00
D	Aset Lain-Lain BLU	Rp 26.203.937.931,00	Rp (7.848.681.099,00)	Rp 18.355.256.832,00
JUMLAH		Rp 164.520.702.355,00	Rp (107.332.393.099,00)	Rp 57.188.309.256,00

Kewajiban
Jangka
Pendek
Rp2.370.831.417.205,00

KEWAJIBAN

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014 tersaji sebesar Rp2.370.831.417.205,00 dan Rp2.303.660.474.196,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

Tabel 77
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

NO	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	TA 2015	TA 2014
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp 2.303.205.177.801,00	Rp 2.243.984.194.207,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 19.650.705.177,00	Rp 12.074.330.292,00
3	Uang Muka dari KPPN	Rp 12.466.714.369,00	Rp 4.303.320.797,00
4	Hibah Yang Belum Disahkan	Rp 35.342.855.000,00	Rp -
5	Pendapatan Yang Ditangguhkan	Rp -	Rp 43.068.019.962,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp 165.964.858,00	Rp 230.608.938,00
JUMLAH		Rp 2.370.831.417.205,00	Rp 2.303.660.474.196,00

Uang Muka
dari KPPN
Rp12.466.714.369,00

C.5.1 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp12.466.714.369,00 dan Rp4.303.320.797,00 merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh

Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Atas uang muka tersebut telah disetorkan ke kas Negara di tahun 2015 pada tanggal dan NTPN sebagaimana disajikan dalam suplemen LKKA 2015.

Utang kepada Pihak Ketiga C.5.2 Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp2.303.205.177.801,00 dan Rp2.243.984.194.207,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya.

Rp2.303.205.177.801,00

Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 78
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Per Unit Eselon I

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp 3.992.805.885,00	Rp 3.375.309.531,00	Rp 617.496.354,00
2	Inspektorat Jenderal	Rp 710.311.540,00	Rp 356.209.599,00	Rp 354.101.941,00
3	Ditjen Bimas Islam	Rp 22.472.968.702,00	Rp 12.461.547.136,00	Rp 10.011.421.566,00
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 741.874.476.699,00	Rp 506.218.678.390,00	Rp 235.655.798.309,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp 7.969.751.322,00	Rp 41.859.656.050,00	Rp (33.889.904.728,00)
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp 7.408.260.430,00	Rp 11.693.854.838,00	Rp (4.285.594.408,00)
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp 519.867.808,00	Rp 5.339.426.534,00	Rp (4.819.558.726,00)
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp 10.150.903.207,00	Rp 3.387.367.712,00	Rp 6.763.535.495,00
9	Ditjen PHU	Rp 1.486.718.932,00	Rp 691.970.020,00	Rp 794.748.912,00
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp 1.022.068.572,00	Rp 1.422.885.654,00	Rp (400.817.082,00)
11	BPIH	Rp 1.505.597.044.704,00	Rp 1.657.177.288.743,00	Rp (151.580.244.039,00)
JUMLAH		Rp2.303.205.177.801,00	Rp 2.243.984.194.207,00	Rp 59.220.983.594,00

Utang Jangka Pendek Lainnya C.5.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp165.964.858,00 dan Rp230.608.938,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Saldo utang jangka pendek lainnya merupakan saldo di Unit Eselon 1 Ditjen Pendidikan Islam.

Rp165.964.858,00

Rincian saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Per Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 79
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Unit Eselon I

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	1.615.888,00	-	1.615.888,00
2	Ditjen Bimas Islam	2.185.738,00	-	2.185.738,00
3	Ditjen Pendidikan Islam	162.049.082,00	230.608.938,00	(68.559.856,00)
4	Ditjen Bimas Kristen	114.150,00	-	114.150,00
JUMLAH		Rp 165.964.858,00	Rp 230.608.938,00	Rp (64.644.080,00)

Pendapatan
Yang
Ditangguhkan
Rp

C.5.4 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Jumlah Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp43.068.019.962,00 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan.

Hibah Yang
Belum
Disahkan
sebesar
Rp35.342.855.
000,00

C.5.5 Hibah Yang Belum Disahkan

Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp35.342.855.000,00 dan Rp0,00. Nilai Hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2015 terdapat pada Eselon Sekretariat Jenderal, Ditjen Pendidikan Islam, dan Ditjen PHU.

Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp19.650.705.
177,00

C.5.6 Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp19.650.705.177,00 dan Rp12.074.330.292,00 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.

Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per Unit Eselon 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 80
Rincian Pendapatan Diterima di Muka Per Unit Eselon 1

NO	URAIAN ESELON I	31 DESEMBER 2015	31 DESEMBER 2014	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Sekretariat Jenderal	Rp 191.986.072,00	Rp 313.012.933,00	Rp (121.026.861,00)
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
3	Ditjen Bimas Islam	Rp -	Rp -	Rp -
4	Ditjen Pendidikan Islam	Rp 19.458.719.105,00	Rp 11.761.317.359,00	Rp 7.697.401.746,00
5	Ditjen Bimas Kristen	Rp -	Rp -	Rp -
6	Ditjen Bimas Katolik	Rp -	Rp -	Rp -
7	Ditjen Bimas Hindu	Rp -	Rp -	Rp -
8	Ditjen Bimas Buddha	Rp -	Rp -	Rp -
9	Ditjen PHU	Rp -	Rp -	Rp -
10	Badan Litbang dan Diklat	Rp -	Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp 19.650.705.177,00	Rp 12.074.330.292,00	Rp 7.576.374.885,00

Terkait dengan pengakuan Pendapatan Nikah Rujuk, bahwa Kementerian Agama belum mencatat adanya pendapatan diterima dimuka karena pengakuan Pendapatan Nikah Rujuk adalah ketika uang sudah masuk ke Kas Negara.

Ekuitas

Rp37.752.024.774.205,00

C.6 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp37.752.024.774.205,00 dan Rp34.902.233.978.002,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas



CALK LAPORAN OPERASIONAL

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

D.1. PENDAPATAN

PNBP

Rp1.905.820.326.505,00

Jumlah Pendapatan Kementerian Agama untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.905.820.326.505,00 dan Rp0,00. Pendapatan Kementerian Agama merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Beban Pegawai

D.2 Beban Pegawai

Rp32.686.059.428.307,00

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp32.686.059.428.307,00 dan Rp0,00 .

Perbandingan Beban Pegawai TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 81

*Perbandingan Beban Pegawai
TA 2015 dan TA 2014*

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014	Naik (Turun) %
1	Beban gaji Pokok PNS	Rp 9.493.817.968.670,00	Rp -	Rp 9.493.817.968.670,00
2	Pengembalian beban gaji poko PNS	Rp (1.077.047.411,00)	Rp -	Rp (1.077.047.411,00)
3	Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 232.327.128,00	Rp -	Rp 232.327.128,00
4	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp (155.184.098,00)	Rp -	Rp (155.184.098,00)
5	Beban Tunj Suami/ Istri PNS	Rp 716.973.860.425,00	Rp -	Rp 716.973.860.425,00
6	Pengembalian Beban Tunj Suami/ Istri PNS	Rp (214.725.275,00)	Rp -	Rp (214.725.275,00)
7	Beban Tunj. Anak PNS	Rp 238.791.755.912,00	Rp -	Rp 238.791.755.912,00
8	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	Rp (46.319.379,00)	Rp -	Rp (46.319.379,00)
9	Beban Tunj. Struktural PNS	Rp 106.028.669.102,00	Rp -	Rp 106.028.669.102,00
10	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	Rp (123.679.804,00)	Rp -	Rp (123.679.804,00)
11	Beban Tunj. Fung PNS	Rp 863.014.479.300,00	Rp -	Rp 863.014.479.300,00
12	Pengembalian Beban Tunj. Fung PNS	Rp (673.768.241,00)	Rp -	Rp (673.768.241,00)
13	Beban Tunj.PPh PNS	Rp 254.661.148.069,00	Rp -	Rp 254.661.148.069,00
14	Pengembalian Beban Tunj.PPh PNS	Rp (5.276.831,00)	Rp -	Rp (5.276.831,00)
15	Beban Tunj. Beras PNS	Rp 596.732.183.114,00	Rp -	Rp 596.732.183.114,00
16	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	Rp (80.089.371,00)	Rp -	Rp (80.089.371,00)
17	Beban Tunj. Lauk pauk PNS	Rp 7.267.000,00	Rp -	Rp 7.267.000,00
18	Beban Uang Makan PNS	Rp 1.714.245.511.036,00	Rp -	Rp 1.714.245.511.036,00
19	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	Rp (2.376.081.549,00)	Rp -	Rp (2.376.081.549,00)
20	Beban Tunj Perbaikan Penghasilan PNS	Rp (1.456.400,00)	Rp -	Rp (1.456.400,00)
21	Pengembalian Beban Tunj.Cacat PNS	Rp (9.022.274,00)	Rp -	Rp (9.022.274,00)
22	Beban Tunj Khusus Peralihan PNS	Rp 13.448.000,00	Rp -	Rp 13.448.000,00
23	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS	Rp 165.193.230,00	Rp -	Rp 165.193.230,00
24	Beban Tunj. Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil PNS	Rp 3.456.523.623,00	Rp -	Rp 3.456.523.623,00
25	Pengembalian Beban Tunj. Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil PNS	Rp (3.406.250,00)	Rp -	Rp (3.406.250,00)
26	Beban Tunj. Guru/Dosen/ PNS yg diperkejakan pd sekolah/ PT Swasta/	Rp (174.640.200,00)	Rp -	Rp (174.640.200,00)
27	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga pengajar Biasa pd PT utk mengikuti	Rp 100.725.000,00	Rp -	Rp 100.725.000,00
28	Beban Tunj. Khusus Papua PNS	Rp 14.107.290.000,00	Rp -	Rp 14.107.290.000,00
29	Pengembalian Beban Tunj. Khusus Papua PNS	Rp (3.462.500,00)	Rp -	Rp (3.462.500,00)
30	Beban Tunj. Lain lain Termasuk Uang Duka PNS Dlm dan LN	Rp 4.890.084.701,00	Rp -	Rp 4.890.084.701,00
31	Pengembalian Beban Tunj. Lain lain Termasuk Uang Duka PNS Dlm dan LN	Rp (812,00)	Rp -	Rp (812,00)
32	Beban Tunj. Umum PNS	Rp 110.151.321.048,00	Rp -	Rp 110.151.321.048,00
33	Pengembalian Beban Tunj. Umum PNS	Rp (429.150.843,00)	Rp -	Rp (429.150.843,00)
34	Beban Tunj. Profesi Guru	Rp 10.702.806.199.775,00	Rp -	Rp 10.702.806.199.775,00
35	Pengembalian Beban Tunj. Profesi Guru	Rp (4.200.250.964,00)	Rp -	Rp (4.200.250.964,00)

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014	Naik (Turun) %
36	Beban Tunj. Profesi Dosen	Rp 418.236.962.501,00	Rp -	Rp 418.236.962.501,00
37	Pengembalian Beban Tunj. Profesi Dosen	Rp (31.247.435,00)	Rp -	Rp (31.247.435,00)
38	Beban Tunj. Kehormatan Profesor	Rp 47.554.615.704,00	Rp -	Rp 47.554.615.704,00
39	Pengembalian Beban Tunj. Kehormatan Profesor	Rp (4.100.000,00)	Rp -	Rp (4.100.000,00)
40	Beban Tunj. Tambahan Penghasilan Guru PNS	Rp 49.652.379.614,00	Rp -	Rp 49.652.379.614,00
41	Pengembalian Beban Tunj. Tambahan Penghasilan Guru PNS	Rp (553.169.110,00)	Rp -	Rp (553.169.110,00)
42	Beban Tunj. Khusus Guru/Dosen	Rp 2.395.734.300,00	Rp -	Rp 2.395.734.300,00
43	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	Rp (22.680.000,00)	Rp -	Rp (22.680.000,00)
44	Beban Uang Makan PNS TNI/Polri	Rp (308.911.000,00)	Rp -	Rp (308.911.000,00)
45	Beban Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri	Rp 35.985.600,00	Rp -	Rp 35.985.600,00
46	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri	Rp (88.901.006,00)	Rp -	Rp (88.901.006,00)
47	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga pengajar Biasa pd PT utk mengikuti	Rp 234.075.000,00	Rp -	Rp 234.075.000,00
48	Pengembalian Beban Tunj. Medis TNI/Polri	Rp (330,00)	Rp -	Rp (330,00)
49	Beban Tunj. Lain lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/Polri	Rp 73.223.732,00	Rp -	Rp 73.223.732,00
50	Beban gaji Pokok Peg Non PNS	Rp 2.587.572.054,00	Rp -	Rp 2.587.572.054,00
51	Pengembalian Beban gaji Pokok Peg Non PNS	Rp (5.043.000,00)	Rp -	Rp (5.043.000,00)
52	Beban Tunj. Peg Non PNS	Rp 50.413.832.502,00	Rp -	Rp 50.413.832.502,00
53	Pengembalian Beban Tunj. Peg Non PNS	Rp (518.233.000,00)	Rp -	Rp (518.233.000,00)
54	Beban Pembulatan gaji Peg Non PNS	Rp 8.770.000,00	Rp -	Rp 8.770.000,00
55	Beban Tunj. Lainnya Non PNS	Rp 46.323.120.143,00	Rp -	Rp 46.323.120.143,00
56	Pengembalian Beban Tunj. Lainnya Non PNS	Rp (2.122.500,00)	Rp -	Rp (2.122.500,00)
57	Beban Tunj. Tenaga Pendidik Non PNS	Rp 4.451.063.171.569,00	Rp -	Rp 4.451.063.171.569,00
58	Pengembalian Beban Tunj. Tenaga Pendidik Non PNS	Rp (1.143.435.550,00)	Rp -	Rp (1.143.435.550,00)
59	Beban Tunj. Tenaga Penyuluh Non PNS	Rp 319.356.930.995,00	Rp -	Rp 319.356.930.995,00
60	Pengembalian Beban Tunj. Tenaga Penyuluh Non PNS	Rp (183.870.000,00)	Rp -	Rp (183.870.000,00)
61	Beban Uang Honor Tetap	Rp 175.497.681.722,00	Rp -	Rp 175.497.681.722,00
62	Pengembalian Beban Uang Honor Tetap	Rp (447.708.038,00)	Rp -	Rp (447.708.038,00)
63	Beban Uang Lembur	Rp 60.959.783.297,00	Rp -	Rp 60.959.783.297,00
64	Pengembalian Beban Uang Lembur	Rp (124.446.000,00)	Rp -	Rp (124.446.000,00)
65	Beban Peg (Tunj. Khusus/Kegiatan)	Rp 2.128.485.415.140,00	Rp -	Rp 2.128.485.415.140,00
66	Pengembalian Beban Peg (Tunj. Khusus/Kegiatan)	Rp (24.488.273.374,00)	Rp -	Rp (24.488.273.374,00)
67	Beban Peg Transito	Rp 1.000.120.336,00	Rp -	Rp 1.000.120.336,00
68	Pengembalian Beban Peg Transito	Rp (5.231.135,00)	Rp -	Rp (5.231.135,00)
69	Beban Gaji dan Tunj.	Rp 149.485.032.645,00	Rp -	Rp 149.485.032.645,00
JUMLAH		Rp 32.686.059.428.307,00	Rp -	Rp 32.686.059.428.307,00

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp332.124.014.
892,00*

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp332.124.014.892,00 dan Rp0,00 .

Perbandingan Beban Persediaan TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 82
Perbandingan Beban Persediaan TA 2015 dan TA 2014

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	Rp 298.739.972.224,00	Rp -	Rp 298.739.972.224,00
2	Beban Persediaan Amunisi	Rp 3.399.200,00	Rp -	Rp 3.399.200,00
3	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	Rp 1.877.992.414,00	Rp -	Rp 1.877.992.414,00
4	Beban Persediaan Bahan baku	Rp 25.133.893.397,00	Rp -	Rp 25.133.893.397,00
5	Beban Persediaan utk tujuan strategis /berjaga-jaga	Rp 1.529.402.091,00	Rp -	Rp 1.529.402.091,00
6	Beban Persediaan Lainnya	Rp 4.839.355.566,00	Rp -	Rp 4.839.355.566,00
JUMLAH		Rp 332.124.014.892,00	Rp -	Rp 332.124.014.892,00

Beban Barang dan Jasa Rp12.477.588.790.387,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp12.477.588.790.387,00 dan Rp0,00 .

Perbandingan Beban Barang dan Jasa TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 83
Perbandingan Beban Barang dan Jasa TA 2015 dan TA 2014

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	Rp 569.023.711.171,00	Rp -	Rp 569.023.711.171,00
2	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	Rp (330.087.673,00)	Rp -	Rp (330.087.673,00)
3	Beban Pengadaan Bahan Makanan	Rp 914.289.700,00	Rp -	Rp 914.289.700,00
4	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp 2.744.417.026,00	Rp -	Rp 2.744.417.026,00
5	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 3.370.276.597,00	Rp -	Rp 3.370.276.597,00
6	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp (42.500,00)	Rp -	Rp (42.500,00)
7	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 319.107.039.126,00	Rp -	Rp 319.107.039.126,00
8	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp (280.689.097,00)	Rp -	Rp (280.689.097,00)
9	Beban Barang Operasional Lainnya	Rp 259.014.015.657,00	Rp -	Rp 259.014.015.657,00
10	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	Rp (953.989.882,00)	Rp -	Rp (953.989.882,00)
11	Beban Bahan	Rp 1.265.916.595.944,00	Rp -	Rp 1.265.916.595.944,00
12	Pengembalian Beban Bahan	Rp (327.437.285,00)	Rp -	Rp (327.437.285,00)
13	Beban Barang Transito	Rp 31.088.000,00	Rp -	Rp 31.088.000,00
14	Beban Honor Output Kegiatan	Rp 810.319.984.538,00	Rp -	Rp 810.319.984.538,00
15	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	Rp (3.088.864.042,00)	Rp -	Rp (3.088.864.042,00)
16	Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp 7.862.587.941.373,00	Rp -	Rp 7.862.587.941.373,00
17	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp (7.832.158.055,00)	Rp -	Rp (7.832.158.055,00)
18	Beban Langganan Listrik	Rp 140.046.635.581,00	Rp -	Rp 140.046.635.581,00
19	Pengembalian Beban Langganan Listrik	Rp (65.498.321,00)	Rp -	Rp (65.498.321,00)
20	Beban Langganan Telepon	Rp 22.020.786.620,00	Rp -	Rp 22.020.786.620,00
21	Pengembalian Beban Langganan Telepon	Rp (5.258.747,00)	Rp -	Rp (5.258.747,00)
22	Beban Langganan Air	Rp 12.085.349.703,00	Rp -	Rp 12.085.349.703,00
23	Pengembalian Beban Langganan Air	Rp (4.667.785,00)	Rp -	Rp (4.667.785,00)
24	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp 41.795.592.255,00	Rp -	Rp 41.795.592.255,00
25	Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp (57.455.629,00)	Rp -	Rp (57.455.629,00)

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014	Naik (Turun) %
26	Beban Jasa Pos dan Giro	Rp 700.048.457,00	Rp -	Rp 700.048.457,00
27	Pengembalian Beban Jasa Pos dan Giro	Rp (274.270,00)	Rp -	Rp (274.270,00)
28	Beban Jasa Konsultan	Rp 4.578.847.282,00	Rp -	Rp 4.578.847.282,00
29	Beban Sewa	Rp 105.748.377.875,00	Rp -	Rp 105.748.377.875,00
30	Pengembalian Beban Sewa	Rp (52.867.000,00)	Rp -	Rp (52.867.000,00)
31	Beban Jasa Profesi	Rp 686.014.636.775,00	Rp -	Rp 686.014.636.775,00
32	Pengembalian Beban Jasa Profesi	Rp (4.372.979.324,00)	Rp -	Rp (4.372.979.324,00)
33	Beban Jasa Lainnya	Rp 34.086.707.842,00	Rp -	Rp 34.086.707.842,00
34	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	Rp (4.800.000,00)	Rp -	Rp (4.800.000,00)
35	Beban Barang	Rp 87.796.087.765,00	Rp -	Rp 87.796.087.765,00
36	Beban Jasa	Rp 20.917.463.602,00	Rp -	Rp 20.917.463.602,00
37	Beban Aset Ekstrakomtabel Tanah	Rp (421.552.000,00)	Rp -	Rp (421.552.000,00)
38	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	Rp 15.539.582.803,00	Rp -	Rp 15.539.582.803,00
39	Beban Aset Ekstrakomtabel Ged dan Bangunan	Rp 35.989.244.804,00	Rp -	Rp 35.989.244.804,00
40	Beban Aset Ekstrakomtabel Jln, Irigasi dan Jaringan	Rp (2.355.329.796,00)	Rp -	Rp (2.355.329.796,00)
41	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	Rp (586.373.402,00)	Rp -	Rp (586.373.402,00)
42	Beban Aset Ekstrakomtabel KDP	Rp 140.765.700,00	Rp -	Rp 140.765.700,00
43	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset tak Berwujud	Rp 1.674.651.022,00	Rp -	Rp 1.674.651.022,00
44	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	Rp 338.346.103,00	Rp -	Rp 338.346.103,00
45	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya - BLU	Rp (31.640.000,00)	Rp -	Rp (31.640.000,00)
46	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset tak Berwujud - BLU	Rp (19.941.337.765,00)	Rp -	Rp (19.941.337.765,00)
47	Beban Penyediaan brg dan jasa BLU lainnya	Rp 215.799.609.639,00	Rp -	Rp 215.799.609.639,00
JUMLAH		Rp 12.477.588.790.387,00	Rp -	Rp 12.477.588.790.387,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp672.309.838.562,00

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp672.309.838.562,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Beban Pemeliharaan TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 84
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2015 dan TA 2014

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Ged dan Bangunan	Rp 381.293.079.415,00	Rp -	Rp 381.293.079.415,00
2	Pengembalian Beban Pemeliharaan Ged dan Bangunan	Rp (26.715.325,00)	Rp -	Rp (26.715.325,00)
3	Beban Pemeliharaan Ged dan Bangunan Lainnya	Rp 10.756.302.170,00	Rp -	Rp 10.756.302.170,00
4	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 177.512.923.670,00	Rp -	Rp 177.512.923.670,00
5	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp (83.798.052,00)	Rp -	Rp (83.798.052,00)
6	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non	Rp 3.555.939.674,00	Rp -	Rp 3.555.939.674,00
7	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 5.096.219.665,00	Rp -	Rp 5.096.219.665,00
8	Beban Pemeliharaan Jln dan Jembatan	Rp 2.142.532.000,00	Rp -	Rp 2.142.532.000,00
9	Beban Pemeliharaan Irigasi	Rp 93.560.409,00	Rp -	Rp 93.560.409,00
10	Beban Pemeliharaan Jaringan	Rp 4.021.705.833,00	Rp -	Rp 4.021.705.833,00
11	Beban Pemeliharaan Lainnya	Rp 1.334.256.329,00	Rp -	Rp 1.334.256.329,00
12	Beban Pemeliharaan	Rp 10.106.139.423,00	Rp -	Rp 10.106.139.423,00
13	Beban Persediaan bahan utk pemeliharaan	Rp 73.529.652.408,00	Rp -	Rp 73.529.652.408,00
14	Beban Persediaan Suku Cadang	Rp 2.978.040.943,00	Rp -	Rp 2.978.040.943,00
JUMLAH		Rp 672.309.838.562,00	Rp -	Rp 672.309.838.562,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp1.640.817.337.061,00*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.640.817.337.061,00 dan Rp0,00 .

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 85

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2015 dan TA 2014*

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	Rp 477.144.615.034,00	Rp -	Rp 477.144.615.034,00
2	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	Rp (5.019.534.605,00)	Rp -	Rp (5.019.534.605,00)
3	Beban Perjalanan Tetap	Rp 13.188.300.834,00	Rp -	Rp 13.188.300.834,00
4	Pengembalian Beban Perjalanan Tetap	Rp (5.760.000,00)	Rp -	Rp (5.760.000,00)
5	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 211.811.000.561,00	Rp -	Rp 211.811.000.561,00
6	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp (560.155.350,00)	Rp -	Rp (560.155.350,00)
7	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 452.733.209.461,00	Rp -	Rp 452.733.209.461,00
8	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp (6.680.147.922,00)	Rp -	Rp (6.680.147.922,00)
9	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 349.461.617.952,00	Rp -	Rp 349.461.617.952,00
10	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp (11.703.473.357,00)	Rp -	Rp (11.703.473.357,00)
11	Beban Perjalanan Biasa- Luar Negeri	Rp 10.037.428.526,00	Rp -	Rp 10.037.428.526,00
12	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa- Luar Negeri	Rp (8.255.400,00)	Rp -	Rp (8.255.400,00)
13	Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	Rp 106.187.425.568,00	Rp -	Rp 106.187.425.568,00
14	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	Rp (274.501.836,00)	Rp -	Rp (274.501.836,00)
15	Beban Perjalanan	Rp 44.505.567.595,00	Rp -	Rp 44.505.567.595,00
JUMLAH		Rp 1.640.817.337.061,00	Rp -	Rp1.640.817.337.061,00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp561.545.903.106,00*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp561.545.903.106,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 86
Perbandingan Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
TA 2015 dan TA 2014

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014	Naik (Turun) %
1	Beban Tanah utk diserahkan kpd Masy/Pemda	Rp 152.664.225.859,00	Rp -	Rp 152.664.225.859,00
2	Beban Peralatan dan Mesin utk diserahkan kpd Masy/Pemda	Rp 80.629.319.389,00	Rp -	Rp 80.629.319.389,00
3	Beban Ged dan Bangunan utk diserahkan kpd Masy/Pemda	Rp 11.557.985.003,00	Rp -	Rp 11.557.985.003,00
4	Beban Jln, Irigasi dan Jaringan utk diserahkan kpd Masy/Pemda	Rp 340.164.000,00	Rp -	Rp 340.164.000,00
5	Beban Brg Fisik Lainnya utk Diserahkan ke Masy/Pemda	Rp 57.777.971.962,00	Rp -	Rp 57.777.971.962,00
6	Beban Brg Lainnya utk Diserahkan ke Masy/Pemda	Rp 255.572.465.683,00	Rp -	Rp 255.572.465.683,00
7	Beban Persediaan Tanah dan bangunan utk dijual atau diserahkan kpd	Rp 390.283.300,00	Rp -	Rp 390.283.300,00
8	Beban PersediaanPeralatan dan mesin utk diserahkan kpd Masya	Rp 533.062.000,00	Rp -	Rp 533.062.000,00
9	Beban Persediaan Aset tetap lainnya diserahkan ke Masya	Rp 179.215.000,00	Rp -	Rp 179.215.000,00
10	Beban persediaan aset lain-lain utk diserahkan kpd masy	Rp (82.400.684,00)	Rp -	Rp (82.400.684,00)
11	Beban brg persediaan lainnya utk dijual/ Diserahkan kpd Masy	Rp 1.983.611.594,00	Rp -	Rp 1.983.611.594,00
JUMLAH		Rp 561.545.903.106,00	Rp -	Rp 561.545.903.106,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial

Rp1.599.185.342.852,00

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.599.185.342.852,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Beban Bantuan Sosial TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 87
Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2015 dan TA 2014

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014	Naik (Turun) %
1	Beban Bantuan sosial utk rehabilitas sosial dlm bentuk uang	Rp (72.000.000,00)	Rp -	Rp (72.000.000,00)
2	Beban Bantuan sosial utk rehabilitas sosial dlm bentuk barang/jasa	Rp 278.000.000,00	Rp -	Rp 278.000.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Utk Jaminan Sosial dlm bentuk Uang	Rp 94.888.247.500,00	Rp -	Rp 94.888.247.500,00
4	Pengembalian Beban Bantuan Sosial Utk Jaminan Sosial dlm bentuk uang	Rp (59.385.900,00)	Rp -	Rp (59.385.900,00)
5	Beban bantuan Sosial utk Jaminan Sosial dlm bentuk Brg/Jasa	Rp 12.562.500,00	Rp -	Rp 12.562.500,00
6	Beban Bantuan Sosial Utk Pemberdayaan Sosial dlm bentuk uang	Rp 66.964.937.900,00	Rp -	Rp 66.964.937.900,00
7	Pengembalian Beban Bantuan Sosial Utk Pemberdayaan Sosial dlm bentuk uang	Rp (1.608.532.528,00)	Rp -	Rp (1.608.532.528,00)
8	Beban Bantuan Sosial Utk Pemberdayaan Sosial dlm bentuk Barang/Jasa	Rp 27.998.152.265,00	Rp -	Rp 27.998.152.265,00
9	Beban Bantuan Sosial Utk Perlindungan Sosial dlm bentuk Uang	Rp1.203.773.912.670,00	Rp -	Rp1.203.773.912.670,00
10	Pengembalian Beban Bantuan Sosial Utk Perlindungan Sosial dlm bentuk Uang	Rp (6.812.025.000,00)	Rp -	Rp (6.812.025.000,00)
11	Beban Bantuan Sosial Utk Penanggulangan Kemiskinan dlm bentuk uang	Rp 212.586.765.945,00	Rp -	Rp 212.586.765.945,00
12	Pengembalian Beban Bantuan Sosial Utk Penanggulangan Kemiskinan dlm bentuk	Rp (150.492.500,00)	Rp -	Rp (150.492.500,00)
13	Beban Bantuan Sosial Utk Penanggulangan Bencana dlm bentuk Uang	Rp 1.385.200.000,00	Rp -	Rp 1.385.200.000,00
JUMLAH		Rp1.599.185.342.852,00	Rp -	Rp1.599.185.342.852,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp1.186.927.433
3.529,00*

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.186.927.433.529,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 88
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2015 dan TA 2014

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 683.861.050.721,00	Rp -	Rp 683.861.050.721,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 455.560.817.338,00	Rp -	Rp 455.560.817.338,00
3	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	Rp 12.165.388.223,00	Rp -	Rp 12.165.388.223,00
4	Beban Penyusutan Irigasi	Rp 8.324.319.997,00	Rp -	Rp 8.324.319.997,00
5	Beban Penyusutan Jaringan	Rp 6.144.644.001,00	Rp -	Rp 6.144.644.001,00
6	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp 17.540.364.537,00	Rp -	Rp 17.540.364.537,00
7	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU	Rp (8.099.994,00)	Rp -	Rp (8.099.994,00)
8	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp (24.000,00)	Rp -	Rp (24.000,00)
9	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	Rp 178.887.657,00	Rp -	Rp 178.887.657,00
10	Beban Penyusutan Aset Tetap yg tdk digunakan dlm operasional Pemerintah	Rp 3.139.659.449,00	Rp -	Rp 3.139.659.449,00
11	Beban Penyusutan Aset Tetap yg tdk digunakan dlm operasional Pemerintah-BLU	Rp 20.425.600,00	Rp -	Rp 20.425.600,00
JUMLAH		Rp 1.186.927.433.529,00	Rp -	Rp 1.186.927.433.529,00

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp4.604.013.428
8,00*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp4.604.013.428,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 89
Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2015 dan TA 2014

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang PNPB	Rp 3.341.553.890,00	Rp -	Rp 3.341.553.890,00
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	Rp 24.000,00	Rp -	Rp 24.000,00
3	Beban penyisihan piutang BLU pelayanan pendidikan	Rp 1.240.179.447,00	Rp -	Rp 1.240.179.447,00
4	Beban penyisihan piutang sewa tanah BLU	Rp (2.055.224,00)	Rp -	Rp (2.055.224,00)
5	Beban penyisihan piutang sewa ged BLU	Rp 10.799.781,00	Rp -	Rp 10.799.781,00
6	Beban penyisihan piutang sewa ruangan BLU	Rp 18.060.834,00	Rp -	Rp 18.060.834,00
7	Beban penyisihan piutang dr kegiatan non operasional lainnya BLU	Rp (5.292.030,00)	Rp -	Rp (5.292.030,00)
8	Beban penyisihan piutang tdk tertagih jangka parj- tuntutan	Rp 742.730,00	Rp -	Rp 742.730,00
JUMLAH		Rp 4.604.013.428,00	Rp -	Rp 4.604.013.428,00

D.11 Beban Lain-lain

*Beban Lain-lain
Rp(37.490.912,
00)*

Beban lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp(37.490.912,00) dan Rp0,00

Perbandingan Beban Lain-lain TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 90
Perbandingan Rincian Beban lain-lain
TA 2015 dan TA 2014

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014	Naik (Turun) %
1	Beban cad tunj. Beras PNS/TNI/Polri	Rp 9.631.860,00	Rp -	Rp 9.631.860,00
2	Beban Cad. Lainnya	Rp 2.705.600,00	Rp -	Rp 2.705.600,00
3	Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	Rp (140.288.895,00)	Rp -	Rp (140.288.895,00)
4	Beban Lain-lain	Rp 90.460.523,00	Rp -	Rp 90.460.523,00
JUMLAH		Rp (37.490.912,00)	Rp -	Rp (37.490.912,00)

D.12. SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL

*Kegiatan Non
Operasional
Rp118.987.804.
347,00*

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp118.987.804.347,00. Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan pelepasan aset non lancar sebesar Rp2.478.168.506,00, beban pelepasan aset non lancar sebesar Rp(13.734.547.370,00), pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp133.562.245.766,00, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp3.318.062.555,00.



CALK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp34.945.301.997.964,00</i>	E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing masing sebesar Rp34.945.301.997.964,00 dan Rp0,00. Dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 1 Januari 2015 tersebut adalah merupakan reklasifikasi dari akun-akun neraca
<i>Defisit LO</i> <i>Rp(49.136.316.480.360,00)</i>	E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp(49.136.316.480.360,00) dan Rp0,00.
<i>Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan</i> <i>Rp104.283.703.894,00</i>	E.3 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp104.283.703.894,00 dan Rp0,00
<i>Penyesuai Nilai Aset</i> <i>Rp104.283.703.894,00</i>	E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp104.283.703.894,00 dan Rp0,00
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar</i> <i>Rp(17.377.814.472,00)</i>	E..4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp(17.377.814.472,00) dan Rp0,00.
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i> <i>Rp2.826.008.701,00</i>	E.5 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.826.008.701,00 dan Rp0,00.

<i>Selisih Revaluasi Aset Tetap</i> <i>Rp(4.529.615.787,00)</i>)	E.6 Selisih Revaluasi Aset Tetap Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp(4.529.615.787,00) dan Rp0,00.
<i>Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi</i> <i>Rp(38.145.851.772,00)</i>	E.7 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Jumlah Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan atas nilai/kuantitas AT atau AT lainnya yang tidak termasuk di nilai ulang. Koreksi aset tetap dan aset lainnya untuk 31 Desember 2015 dan 2014 adalah koreksi kurang masing-masing sebesar Rp(38.145.851.772,00) dan Rp0,00
<i>Transaksi Antar Entitas</i> <i>Rp51.856.133.367.179,00</i>	E.8 Transaksi Antar Entitas Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp51.856.133.367.179,00 dan Rp0,00.
<i>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</i> <i>Rp2.806.722.776.241,00</i>	E.9 Kenaikan/Penurunan Ekuitas Jumlah Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp2.806.722.776.241,00 dan Rp0,00
<i>Ekuitas Akhir</i> <i>Rp37.752.024.774.205,00</i>	E.10 Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp37.752.024.774.205,00 dan Rp0,00



CALK PENGUNGKAPAN PENTING

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENGUNGKAPAN PENTING

Terkait pemekaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, sehingga menambah entitas pelaporan pada tahun 2015. Terdapat permasalahan terhadap penyajian neraca disebabkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk Kalimantan Utara sudah terbentuk sedangkan KPKNLnya masih gabung dengan KPKNL Kalimantan Timur. Hal ini menyebabkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara belum bisa menyajikan saldo awal BMN dari Satuan Kerja yang ditahun 2015 menjadi Satuan Kerja Kalimantan Utara.



MUTASI ASET

Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah

Saldo per 1 Januari 2015		Rp	11.911.986.673.758
	Mutasi Tambah:	Rp	311.187.266.766
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	35.859.613.297
2	Pembelian	Rp	61.596.569.741
3	Transfer Masuk	Rp	21.663.409.000
4	Hibah Masuk	Rp	44.857.063.655
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	64.208.148.314
6	Reklasifikasi Masuk	Rp	27.330.054.413
7	Perolehan Lainnya	Rp	2.091.880.000
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	594.935.000
9	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	1.125.852.000
10	Pengembangan Nilai Aset	Rp	13.443.543.860
11	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	7.810.937.686
12	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	Rp	24.487.113.000
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp	49.950.000
14	Pengembangan Melalui KDP	Rp	6.068.196.800
	Mutasi Kurang :	Rp	(160.894.324.148)
1	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp	(7.485.039.132)
4	Penghapusan	Rp	(1.567.035.900)
5	Transfer Keluar	Rp	(31.721.006.200)
6	Reklasifikasi Keluar	Rp	(32.956.157.661)
7	Koreksi Pencatatan	Rp	(86.039.233.255)
8	Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(1.125.852.000)
	Penyesuaian	Rp	3.724.786.855
Saldo per 31 Desember 2015		Rp	12.066.004.403.231
	Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Saldo Buku per 31 Desember 2015		Rp	12.066.004.403.231

Penambahan dan Pengurangan Nilai Tanah BLU

Saldo per 1 Januari 2015		Rp	3.567.133.729.390
	Mutasi Tambah:	Rp	71.707.925.726
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	2.646.000.000
2	Pembelian	Rp	853.047.000
3	Transfer Masuk	Rp	-
4	Hibah Masuk	Rp	45.551.880.000
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	386.500.000
6	Reklasifikasi Masuk	Rp	2.618.037.000
7	Perolehan Lainnya	Rp	-
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	-
9	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	-
10	Pengembangan Nilai Aset	Rp	2.596.279.280
11	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	7.562.816.646
12	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	Rp	-
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp	-
14	Pengembangan Melalui KDP	Rp	9.493.365.800
	Mutasi Kurang :	Rp	(29.046.982.715)
1	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp	(18.866.129.069)
2	Penghapusan	Rp	-
3	Transfer Keluar	Rp	-
4	Reklasifikasi Keluar	Rp	(10.180.853.646)
5	Koreksi Pencatatan	Rp	-
6	Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	-
	Penyesuaian	Rp	(933.212.000)
Saldo per 31 Desember 2015		Rp	3.608.861.460.401
	Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Saldo Buku per 31 Desember 2015		Rp	3.608.861.460.401

Penambahan dan Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo per 1 Januari 2015		Rp	3.943.894.559.057
	Mutasi Tambah:	Rp	967.541.484.930
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	924.337.580
2	Pembelian	Rp	867.535.221.878
3	Transfer Masuk	Rp	9.116.938.588
4	Hibah Masuk	Rp	733.470.302
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	55.335.217.969
6	Pembatalan Penghapusan	Rp	2.608.100
7	Reklasifikasi Masuk	Rp	28.745.234.954
8	Perolehan Lainnya	Rp	267.775.100
9	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	545.736.962
10	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	556.942.490
11	Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	Rp	161.192.550
12	Pengembangan Nilai Aset	Rp	2.491.264.422
13	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	40.964.435
16	Pengembangan Melalui KDP	Rp	1.084.579.600
	Mutasi Kurang :	Rp	(87.042.390.564)
1	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp	(11.450.851.071)
4	Penghapusan	Rp	(2.742.605.771)
5	Transfer Keluar	Rp	(12.645.043.718)
6	Hibah Keluar	Rp	(89.524.447)
7	Reklasifikasi Keluar	Rp	(30.094.544.455)
8	Koreksi Pencatatan	Rp	(3.223.849.420)
9	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	Rp	(296.732.809)
11	Usulan Barang Hilang ke Pengelola	Rp	(139.544.500)
12	Penghapusan Semu karena Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	Rp	(15.051.500)
13	Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(26.344.642.873)
	Penyesuaian	Rp	26.116.488.143
Saldo per 31 Desember 2015		Rp	4.850.510.141.566
	Akumulasi Penyusutan	Rp	(3.293.774.386.930)
Saldo Buku per 31 Desember 2015		Rp	1.556.735.754.636

Penambahan dan Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin BLU

Saldo per 1 Januari 2015		Rp	1.409.012.506.521
	Mutasi Tambah:	Rp	173.031.534.127
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	53.313.426.263
2	Pembelian	Rp	78.738.838.140
3	Transfer Masuk	Rp	1.419.263.639
4	Hibah Masuk	Rp	1.839.857.250
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	20.530.549.513
6	Reklasifikasi Masuk	Rp	15.148.793.122
7	Perolehan Lainnya	Rp	-
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	39.810.000
9	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	-
10	Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	Rp	2.017.500
11	Pengembangan Nilai Aset	Rp	1.090.757.000
12	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	614.721.700
13	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	Rp	-
14	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp	-
15	Pengembangan Melalui KDP	Rp	293.500.000
16	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	-
17	Penghapusan	Rp	-
	Mutasi Kurang :	Rp	(41.637.100.765)
1	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp	(13.726.990.575)
2	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	Rp	-
3	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	-
4	Penghapusan	Rp	-
5	Transfer Keluar	Rp	(1.398.838.039)
6	Hibah Keluar	Rp	-
7	Reklasifikasi Keluar	Rp	(15.447.613.250)
8	Koreksi Pencatatan	Rp	(244.987.500)
9	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	Rp	-
10	Reklasifikasi BMN ke BPYPDS	Rp	-
11	Usulan Barang Hilang ke Pengelola	Rp	-
12	Penghapusan Semu karena Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	Rp	-
13	Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(10.818.671.401)
	Penyesuaian	Rp	(12.699.186.487)
Saldo per 31 Desember 2015		Rp	1.527.707.753.396
	Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.135.318.118.047)
Saldo Buku per 31 Desember 2015		Rp	392.389.635.349

Penambahan dan Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan

Saldo per 1 Januari 2015		Rp	14.661.086.032.077
	Mutasi Tambah:	Rp	1.844.415.548.857
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	44.484.107.259
2	Pembelian	Rp	11.868.352.058
3	Transfer Masuk	Rp	26.520.865.972
4	Hibah Masuk	Rp	7.214.479.000
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	1.192.112.739.307
6	Pembatalan Penghapusan	Rp	30.962.000
7	Reklasifikasi Masuk	Rp	18.240.018.791
9	Perolehan Lainnya	Rp	5.179.087.677
10	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	22.936.327.363
11	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	3.228.373.554
12	Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	Rp	1.402.257.601
13	Pengembangan Nilai Aset	Rp	44.981.499.683
14	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	60.971.815.685
15	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	Rp	14.419.978.750
16	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp	20.295.803.121
17	Pengembangan Melalui KDP	Rp	370.528.881.036
	Mutasi Kurang :	Rp	(199.253.268.214)
1	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp	(46.062.340.538)
3	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	Rp	(49.585.387.130)
4	Penghapusan	Rp	(1.173.193.000)
5	Transfer Keluar	Rp	(34.687.904.433)
6	Hibah Keluar	Rp	(190.859.000)
7	Reklasifikasi Keluar	Rp	(26.012.485.917)
8	Koreksi Pencatatan	Rp	(20.873.829.553)
9	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	Rp	(390.884.000)
10	Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(20.276.384.643)
	Penyesuaian	Rp	330.716.841.077
Saldo per 31 Desember 2015		Rp	16.636.965.153.797
	Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.867.210.703.138)
Saldo Buku per 31 Desember 2015		Rp	13.769.754.450.659

Penambahan dan Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan BLU

Saldo per 1 Januari 2015		Rp	3.139.798.998.268
	Mutasi Tambah:	Rp	603.256.234.295
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	-
2	Pembelian	Rp	1.778.738.680
3	Transfer Masuk	Rp	-
4	Hibah Masuk	Rp	1.315.478.000
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	483.368.222.086
6	Pembatalan Penghapusan	Rp	-
7	Reklasifikasi Masuk	Rp	20.106.466.383
8	Bangun Guna Serah	Rp	-
9	Perolehan Lainnya	Rp	-
10	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	1.389.085.000
11	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	-
12	Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	Rp	-
13	Pengembangan Nilai Aset	Rp	7.228.073.431
14	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	3.257.752.600
15	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	Rp	-
16	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp	-
17	Pengembangan Melalui KDP	Rp	84.812.418.115
18	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	-
	Mutasi Kurang :	Rp	(34.149.943.810)
1	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp	(245.578.482)
3	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	-
4	Penghapusan	Rp	-
5	Transfer Keluar	Rp	-
6	Hibah Keluar	Rp	-
7	Reklasifikasi Keluar	Rp	-
8	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp	(22.436.967.805)
9	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	Rp	-
10	Reklasifikasi BMN ke BPYPDS	Rp	-
12	Penghapusan Semu karena Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra	Rp	-
13	Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(11.467.397.523)
	Penyesuaian	Rp	(321.793.794.424)
Saldo per 31 Desember 2015		Rp	3.387.111.494.329
	Akumulasi Penyusutan	Rp	(386.627.663.704)
Saldo Buku per 31 Desember 2015		Rp	3.000.483.830.625

Saldo per 1 Januari 2015		Rp	272.471.057.289
	Mutasi Tambah:	Rp	34.322.487.825
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	475.505.000
2	Pembelian	Rp	5.322.173.891
3	Transfer Masuk	Rp	40.000.000
4	Hibah Masuk	Rp	-
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	22.051.096.622
6	Reklasifikasi Masuk	Rp	1.713.838.400
7	Perolehan Lainnya	Rp	32.299.000
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	1.791.724.252
9	Pengembangan Nilai Aset	Rp	1.474.973.060
10	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	34.040.000
11	Pengembangan Melalui KDP	Rp	1.386.837.600
	Mutasi Kurang :	Rp	(625.750.695)
1	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp	(2.752.500)
2	Transfer Keluar	Rp	(25.600.000)
3	Reklasifikasi Keluar	Rp	(517.871.795)
4	Koreksi Pencatatan	Rp	(24.599.000)
5	Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(54.927.400)
	Penyesuaian	Rp	31.976.145.914
Saldo Buku per 31 Desember 2015		Rp	338.143.940.333
	Akumulasi Penyusutan	Rp	(96.877.480.948)
Saldo Buku per 31 Desember 2015		Rp	241.266.459.385

Penambahan dan Pengurangan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU

Saldo per 1 Januari 2015		Rp	162.071.909.996
	Mutasi Tambah:	Rp	44.028.621.139
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	-
2	Pembelian	Rp	997.945.944
3	Transfer Masuk	Rp	27.463.520
4	Hibah Masuk	Rp	2.200.000.000
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	35.888.121.991
6	Reklasifikasi Masuk	Rp	2.616.071.584
7	Perolehan Lainnya	Rp	-
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	713.283.000
9	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	-
10	Pengembangan Nilai Aset	Rp	-
11	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	-
12	Pengembangan Melalui KDP	Rp	1.585.735.100
	Mutasi Kurang :	Rp	(2.643.535.104)
1	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp	-
2	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	-
3	Penghapusan	Rp	-
4	Transfer Keluar	Rp	(27.463.520)
5	Reklasifikasi Keluar	Rp	(2.616.071.584)
6	Koreksi Pencatatan	Rp	-
7	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	Rp	-
8	Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	-
	Penyesuaian	Rp	(29.918.742.464)
Saldo per 31 Desember 2015		Rp	173.538.253.567
	Akumulasi Penyusutan	Rp	(82.743.279.452)
Saldo Buku per 31 Desember 2015		Rp	90.794.974.115

Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya

Saldo per 1 Januari 2015		Rp	887.872.605.807
	Mutasi Tambah:	Rp	127.880.613.694
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	345.454.426
2	Pembelian	Rp	95.924.097.483
3	Transfer Masuk	Rp	2.087.882.303
4	Hibah Masuk	Rp	63.838.300
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	22.697.410.259
6	Reklasifikasi Masuk	Rp	1.231.075.558
7	Perolehan Lainnya	Rp	493.327.287
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	742.319.000
9	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	146.378.000
10	Pengembangan Nilai Aset	Rp	313.954.000
11	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	10.599.964
12	Pengembangan Melalui KDP	Rp	3.824.277.114
	Mutasi Kurang :	Rp	(42.298.901.322)
1	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp	(7.434.909.110)
3	Penghapusan	Rp	(513.773.000)
4	Transfer Keluar	Rp	(15.778.992.508)
5	Hibah Keluar	Rp	(208.595.993)
6	Reklasifikasi Keluar	Rp	(3.686.358.871)
7	Koreksi Pencatatan	Rp	(13.110.636.089)
8	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	Rp	(4.035.000)
10	Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(1.561.600.751)
	Penyesuaian	Rp	8.071.232.535
Saldo per 31 Desember 2015		Rp	981.525.550.714
	Akumulasi Penyusutan	Rp	(51.490.752.487)
Saldo Buku per 31 Desember 2015		Rp	930.034.798.227

Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Lainnya BLU

Saldo per 1 Januari 2015		Rp	136.618.435.211
	Mutasi Tambah:	Rp	16.402.894.190
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	1.349.949.789
2	Pembelian	Rp	9.614.794.209
3	Transfer Masuk	Rp	681.044.913
4	Hibah Masuk	Rp	-
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	1.638.528.372
6	Reklasifikasi Masuk	Rp	3.067.393.907
7	Perolehan Lainnya	Rp	-
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	29.655.000
9	Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	-
10	Pengembangan Nilai Aset	Rp	21.528.000
11	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	-
12	Pengembangan Melalui KDP	Rp	-
13	Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	Rp	-
14	Reklasifikasi Keluar	Rp	-
	Mutasi Kurang :	Rp	(3.779.676.920)
1	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	Rp	(31.238.100)
2	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	Rp	-
3	Penghapusan	Rp	-
4	Transfer Keluar	Rp	(681.044.913)
5	Hibah Keluar	Rp	-
6	Reklasifikasi Keluar	Rp	(3.067.393.907)
7	Koreksi Pencatatan	Rp	-
8	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	Rp	-
9	Usulan Barang Hilang ke Pengelola	Rp	-
10	Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	-
	Penyesuaian	Rp	(1.118.599.900)
Saldo per 31 Desember 2015		Rp	148.123.052.581
	Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.469.531.391)
Saldo Buku per 31 Desember 2015		Rp	146.653.521.190

Penambahan dan Pengurangan Nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	817.950.299.672
Mutasi Tambah:	Rp	1.877.653.058.799
Pengembangan Melalui KDP	Rp	1.877.653.058.799
Mutasi Kurang :	Rp	(1.740.320.035.181)
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	(1.740.320.035.181)
Penyesuaian	Rp	(210.316.444.584)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	744.966.878.706
Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	744.966.878.706

Penambahan dan Pengurangan Nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan BLU

Saldo per 1 Januari 2015	Rp	578.616.573.814
Mutasi Tambah:	Rp	766.552.790.169
Pengembangan Melalui KDP	Rp	766.552.790.169
Mutasi Kurang :	Rp	(637.996.940.977)
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	(637.996.940.977)
Penyesuaian	Rp	329.604.487.686
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	1.036.776.910.692
Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Saldo Buku per 31 Desember 2015	Rp	1.036.776.910.692

Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tak Berwujud

Saldo per 1 Januari 2015		Rp	79.768.834.512
	Mutasi Tambah:	Rp	7.397.075.137
1	Pembelian	Rp	6.537.733.339
2	Transfer Masuk	Rp	11.400.000
3	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	166.391.500
4	Reklasifikasi Masuk	Rp	232.629.298
5	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	223.451.000
6	Pengembangan Nilai Aset	Rp	225.470.000
	Mutasi Kurang :	Rp	(157.733.053)
1	Transfer Keluar	Rp	(29.250.000)
2	Reklasifikasi Keluar	Rp	(122.811.580)
3	Usulan Barang Hilang ke Pengelola	Rp	(5.671.473)
	Penyesuaian	Rp	524.846.369
Saldo per 31 Desember 2015		Rp	87.533.022.965
	Akumulasi Penyusutan	Rp	(29.155.123)
Saldo Buku per 31 Desember 2015		Rp	87.503.867.842

Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tak Berwujud BLU

Saldo per 1 Januari 2015		Rp	28.795.789.316
	Mutasi Tambah:	Rp	5.786.071.045
1	Penambahan Saldo Awal	Rp	-
2	Pembelian	Rp	5.579.173.545
3	Transfer Masuk	Rp	-
4	Hibah (Masuk)	Rp	-
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	-
6	Reklasifikasi Masuk	Rp	-
7	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	-
8	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lain	Rp	-
9	Pengembangan Nilai Aset	Rp	206.897.500
10	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	Rp	-
	Mutasi Kurang :	Rp	-
1	Transfer Keluar	Rp	-
2	Reklasifikasi Keluar	Rp	-
3	Koreksi Pencatatan	Rp	-
4	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	-
	Penyesuaian	Rp	(326.146.250)
Saldo per 31 Desember 2015		Rp	34.255.714.111
	Akumulasi Penyusutan	Rp	30.662.564
Saldo Buku per 31 Desember 2015		Rp	34.286.376.675

Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Lain-Lain

Saldo per 1 Januari 2015		Rp	117.097.834.877
	Mutasi Tambah:	Rp	49.363.407.667
1	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lain	Rp	49.363.407.667
	Mutasi Kurang :	Rp	(34.460.922.757)
2	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp	(21.040.996.645)
3	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp	(2.378.387.118)
5	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp	(34.762.000)
6	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	Rp	(88.515.000)
7	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan)	Rp	(5.825.060.950)
9	Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN yang dihentikan)	Rp	(34.000.000)
10	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	Rp	(5.059.201.044)
	Penyesuaian	Rp	6.316.444.637
Saldo per 31 Desember 2015		Rp	138.316.764.424
	Akumulasi Penyusutan	Rp	(99.483.712.000)
Saldo Buku per 31 Desember 2015		Rp	38.833.052.424

Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Lain-Lain BLU

Saldo per 1 Januari 2015		Rp	14.151.872.055
	Mutasi Tambah:	Rp	22.286.068.924
1	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lain	Rp	22.286.068.924
2	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan Penggunaannya)	Rp	-
3	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp	-
	Mutasi Kurang :	Rp	(1.663.015.665)
1	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan Penggunaannya)	Rp	
2	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp	(1.642.590.065)
3	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp	(20.425.600)
4	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp	-
5	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp	-
6	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	Rp	-
7	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan)	Rp	-
8	Reklasifikasi BMN ke BPYBDS (BMN yang dihentikan)	Rp	-
9	Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN yang dihentikan)	Rp	-
10	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	Rp	-
	Penyesuaian	Rp	(8.570.987.383)
Saldo per 31 Desember 2015		Rp	26.203.937.931
	Akumulasi Penyusutan	Rp	(7.848.681.099)
Saldo Buku per 31 Desember 2014		Rp	18.355.256.832